



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20.a TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20a Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);






2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 -2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20.a TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20a Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 20.a) diubah sebagai berikut :

1. Dilakukan penyesuaian terkait kebijakan keuangan daerah pada BAB III;
2. Dilakukan penyesuaian SKPD penanggungjawab program pada BAB IV; dan
3. Dilakukan penyesuaian lampiran program kegiatan berdasarkan OPD atas penetapan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Januari 2018

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


WINARNI MONOARFA

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR
GORONTALO NOMOR 20a TAHUN 2017**

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 JANUARI 2018

**TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2018**

**RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1. LATAR BELAKANG	I.1
	1.2. LANDASAN HUKUM	I.1
	1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I.2
	1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I.3
	1.5. SISTIMATIKA	I.3
BAB II	EVALUASI CAPAIAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II.1
	2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
	2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II.1
	2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II.4
	2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II.16
	2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II.22
	2.1.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH	II.22
	2.1.4.2 INFRASTRUKTUR WILAYAH	II.34
	2.1.4.3 INVESTASI	II.41
	2.1.4.4 SUMBERDAYA MANUSIA	II.42
	2.1.5 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II.42
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.1
	3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III.1
	3.1.1 KONDISI EKONOMI MAKRO PROVINSI GORONTALO	III.1
	3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018	III.8
	3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.11
	3.2.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018	III.11
	3.2.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH	III.24
	3.2.3 UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN	III.27
	3.3. BELANJA DAERAH	III.21
	3.3.1 KEBIJAKAN TERKAIT DGN PERENCANAAN BELANJA	III.30
	3.3.2 KEBIJAKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	III.34
	3.3.3 KEBIJAKAN BELANJA BERDASARKAN OPD	III.37



	3.4 PEMBIAYAAN DAERAH	III.39
	3.4.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	III.39
	3.4.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	III.40
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV.1
	4.1. TEMA PEMBANGUNAN 2018	IV.2
	4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV.3
	4.3. ISU STRATEGI	IV.5
	4.4 SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	IV.8
	4.5 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	IV.18
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018	V.1
	5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	V.1
BAB VI	PENUTUP	VI.1
	LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. GAMBAR 1.1 KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL, DAERAH DAN SKPD	I.2
2. GAMBAR 2.1 PETA PROVINSI GORONTALO	II.2
3. TABEL 2.1 LUAS WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	II.2
4. TABEL 2.2 JUMLAH PENDUDUK GORONTALO 2012 - 2016	II.3
5. TABEL 2.3 KONDISI DEMOGRAFI PROVINSI GORONTALO	II.4
6. TABEL 2.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI GORONTALO	II.5
7. TABEL 2.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN	II.6
8. TABEL 2.6 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	II.6
9. TABEL 2.7 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA DI SEKTOR FORMAL-INFORMAL	II.7
10. TABEL 2.8 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA	II.8
11. TABEL 2.9 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	II.8
12. TABEL 2.10 JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	II.10
13. TABEL 2.11 GARIS KEMISKINAN PROVINSI GORONTALO	II.11
14. TABEL 2.12 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015-2016	II.12
15. TABEL 2.13 PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA 2014-2016	II.13
16. TABEL 2.14 LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010	II.14
17. TABEL 2.15. LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA, TAHUN 2014-2016	II.14
18. TABEL 2.16 ANGKA PARTISIPASI MURNI DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2015-2016	II.17
19. TABEL 2.17 PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN 2012-2016	II.27
20. TABEL 2.18 HUBUNGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI PERIKANAN 2012 - 2016	II.28
21. TABEL 2.19 DATA KERAGAAN KOPERASI PER KABUPATEN/KOTA	II.31
22. TABEL 2.20 PERKEMBANGAN IKM PROVINSI GORONTALO	II.32
23. TABEL 2.21 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	II.42
24. TABEL 3.1. NILAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015 DAN 2016 (TAHUN DASAR 2000)	III.2



25. TABEL 3.2 LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010	III.2
26. TABEL 3.3. PDRB PERKAPITA TAHUN DASAR 2010 TAHUN 2014 - 2015	III.3
27. TABEL 3.4 LAJU INFLASI KOTA GORONTALO DESEMBER 2016, TAHUN KALENDER 2016	III.4
28. TABEL 3.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN	III.5
29. TABEL 3.6 GARIS KEMISKINAN PROVINSI GORONTALO	III.7
30. TABEL 3.7 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN	III.7
31. TABEL 3.8 PERKIRAAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2017-2018	III.11
32. TABEL 3.9 PROYEKSI INDIKATOR MAKRO 2017-2018	III.11
33. TABEL 3.10 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2017	III.13
34. TABEL 3.11 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH	III.14
35. TABEL 3.12 PERTUMBUHAN PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN DAERAH TERHADAP TARGET 2012-2016	III.15
36. TABEL 3.13 KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	III.25
37. TABEL 3.14 PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH	III.25
38. TABEL 3.15 RINGKASAN PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA APBD 2012-2016	III.32
39. TABEL 3.16 PERKEMBANGAN PERSENTASE REALISASI BELANJA	III.32
40. TABEL 3.17 REALISASI ANGGARAN BELANJA SEMESTER I 2017	III.33
41. TABEL 3.18 PERBANDINGAN KEBIJAKAN BELANJA PADA APBD TA.2017 DAN KU-APBD TA.2018	III.33
42. TABEL 3.19 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	III.40
43. TABEL 3.20 KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA KU-APBD TAHUN 2018	III.41
44. TABEL 4.1 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	IV.4
45. TABEL 4.2 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	IV.17
46. TABEL 4.3 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2018	IV.19
47. TABEL 4.4 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI	IV.24
48. TABEL 5.1 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI GORONTALO 2018	V.1



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2018 dilakukan dalam rangka penyesuaian dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018 menjadi penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 yang juga merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing - masing SKPD maupun seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana amanah undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan lebih dieksplisitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD ini memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan program - program Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). RKPD juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan RKPD ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

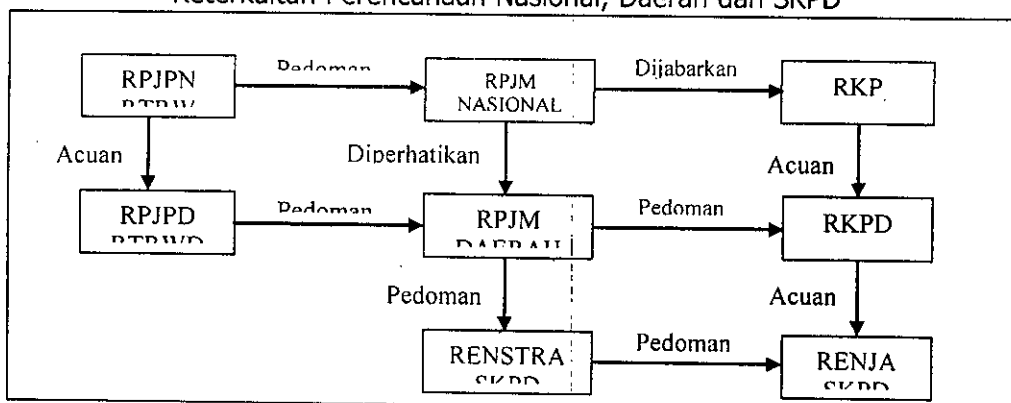


6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2017 – 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Disamping itu, Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1.1
Keterkaitan Perencanaan Nasional, Daerah dan SKPD





1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD 2017 - 2022;
2. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
4. Sebagai dasar pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;

1.5 Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjelasan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD



Menjelaskan hasil capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 sebagai tahun terakhir periode RPJMD 2012-2017

2.3 Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015-2016.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2018

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2018 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2018.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2018, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2018, SKPD pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menurut sejarah, jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare - Pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo dan Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat disekitar wilayah seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

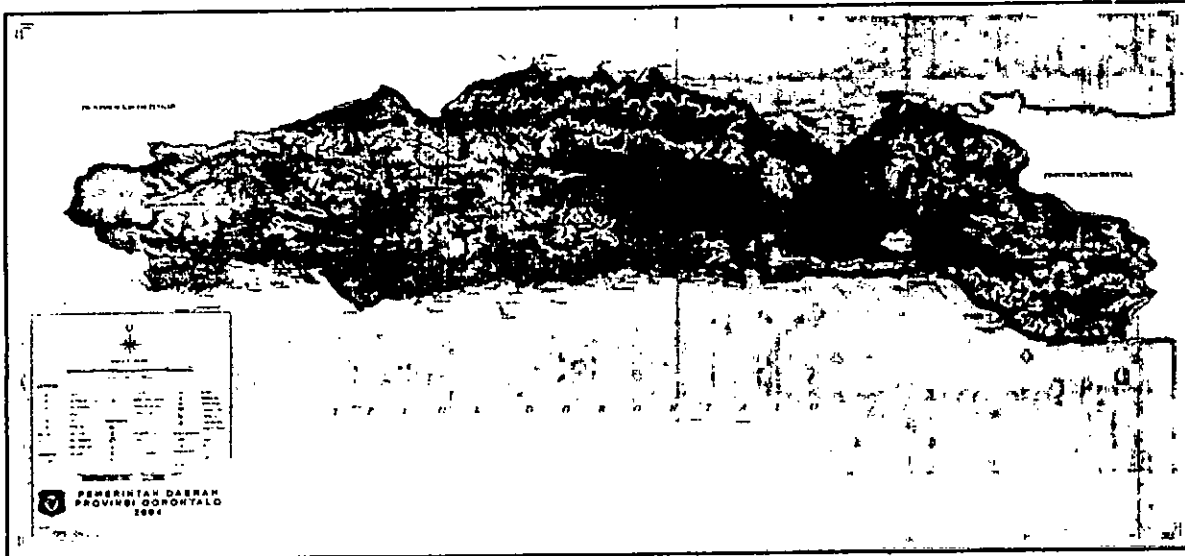
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001, wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo sebagai provinsi yang ke 32 secara geografis terletak diantara antara $0^{\circ} 19' - 0^{\circ} 57'$ Lintang Utara dan $121^{\circ} 23' - 125^{\circ} 14'$ Bujur Timur, yang diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi Sulut di sebelah Timur, Teluk Tomini di sebelah Selatan, dan Provinsi Sulteng di sebelah Barat. Awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota.

Wilayah Gorontalo terletak di antara $0^{\circ}19' - 1^{\circ}15'$ Lintang Utara dan $121^{\circ}23' - 123^{\circ}43'$ Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Peta Provinsi Gorontalo



Wilayah Provinsi Gorontalo dengan Luas 12.215,44 km², hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah administrasi pemerintahan, yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km².

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Sumber Data
01	Kabupaten Gorontalo	2.207,58	18,07	UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 6 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007
02	Kabupaten Boalemo	2.517,36	20,61	UU No. 50 Thn 1999 dan UU No. 6 Thn 2003
03	Kabupaten Pohuwato	4.244,31	34,75	UU No. 6 Thn 2003
04	Kabupaten Bonbol	1.889,04	15,46	UU No. 6 Thn 2003
05	Kabupaten Gorontalo Utara	1.676,15	13,72	UU No. 11 Thn 2007
06	Kota Gorontalo	66,25	0,54	UU No. 29 Thn 1959 dan UU No. 22 Thn 1999
Provinsi Gorontalo		12.215,44	100	UU No. 38 Thn 2000

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, (Hasil Olahan), Dirjen PUM Kemendagri

Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda.

Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung yang terendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 berpenduduk sebanyak 1.150.765 jiwa. Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 35,03 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

Tabel. 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2012-2016

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
01	Kab. Gorontalo	368.053	365.781	368.149	370.441	372.856
02	Kab. Boalemo	136.269	141.547	145.580	149.832	154.008
03	Kab. Pohuwato	135.338	139.675	143.338	146.896	150.385
04	Kab. Bone Bolango	147.692	148.971	151.094	153.166	155.238
05	Kab. Gorontalo Utara	108.079	108.324	109.502	110.700	111.824
06	Kota Gorontalo	188.761	193.692	197.970	202.202	206.454
Provinsi Gorontalo		1.084.192	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah kabupaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 66,25 Km² namun memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan kepadatan penduduk mencapai 3.116 jiwa/km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 35 jiwa/km² dengan luas wilayah 4.244,31 km².

Dengan total wilayah Provinsi Gorontalo yang seluas 12.215,44 km² memiliki kepadatan penduduk mencapai 94,21 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo mencapai mencapai 1,55 %, sedangkan sex ratio sebesar 100,38 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,38 penduduk laki-laki, dengan rincian sebagaimana table 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Demografi Provinsi Gorontalo 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.084.192	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765
- Laki – Laki	Jiwa	543.086	550.004	558.862	567.695	567.482
- Perempuan	Jiwa	541.106	547.986	556.771	565.542	574.283
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,09	1,27	2,89	1,55	1,55
Kepadatan Penduduk	Org/Km ²	87	88	90	92	94,21
Sex Ratio	%	100,36	100,37	100,38	100,38	100,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), yang merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks standar hidup. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, dan selanjutnya metode perhitungannya direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik mengadopsi metodologi perhitungan IPM yang baru mulai tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

Perubahan mendasar dalam perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator harapan lama sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup.

Beberapa perubahan tersebut menjadikan IPM dengan metode baru memiliki sejumlah keunggulan dibanding IPM yang dihitung dengan metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Hasil perhitungan IPM se-Provinsi Gorontalo dengan menggunakan metode baru tahun dasar 2010 diuraikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo
Tahun 2014-2015

Provinsi/ Kab/Kota	Angka Harapan Hidup		Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		2014	2015
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
Boalemo	67.29	67.49	11.89	12,07	6,12	6.15	7598	7817	62.18	62.86
Gorontalo	66.53	66.63	11.89	11.99	6,31	6.53	8032	8398	62.90	63,63
Pohuwato	62.33	62.43	11.68	12,03	6.53	6.54	8925	9146	61.74	62,50
Bone Bolango	67.50	67.60	12.33	12,76	7,67	7.70	8669	8900	66.03	66.83
Gorontalo Utara	64.79	64.99	11.68	11,96	6.53	6.59	7999	8178	61.92	62,55
Kota Gorontalo	71.68	71.69	13.76	14,18	10.24	10.28	11019	11269	74.97	75,62
PROVINSI GORONTALO	67.00	67.12	12.49	12,70	6.96	6.97	8762	9035	65.17	65.86

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo. Pada Tahun 2015, IPM Provinsi Gorontalo telah mencapai 65,86. Angka ini meningkat sebesar 0,69 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 65,17. Pada tahun 2015 capaian Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo berstatus "sedang", masih sama dengan status yang dicapai tahun 2014.

Selama periode 2014 hingga 2015, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Angka harapan hidup Provinsi Gorontalo tahun 2015 hingga 67,12 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,70 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,05 tahun, meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran perkapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai 9,04 juta rupiah pada tahun 2015, atau meningkat Rp. 273 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 62,50 (Kabupaten Pohuwato) hingga 75,62 (Kota Gorontalo). Pada dimensi Angka Harapan Hidup berkisar antara 62,43 tahun (Kabupaten Pohuwato) hingga 71,69 tahun (Kota Gorontalo), untuk dimensi Angka Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,96 tahun (Kabupaten Gorontalo Utara) hingga 14,18 tahun (Kota Gorontalo), Sementara untuk Rata-rata Lama sekolah berkisar antara 6,23 tahun (Kabupaten Boalemo) hingga 10,29 tahun (Kota Gorontalo). Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan di tingkat Kabupaten/Kota berkisar antara 7,82 juta rupiah pertahun (kabupaten Boalemo) hingga 11,27 juta rupiah pertahun (Kota Gorontalo).

b. Ketenagakerjaan

Dari sisi capaian ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 mencapai 562.196 orang, berkurang 1.206 orang dari keadaan Februari Tahun 2016 sebesar 563.402 orang, atau bertambah 44.408 orang dari keadaan Agustus 2015 sebesar 517.788 orang. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari Agustus 2015 – Agustus 2016 ini disebabkan proporsi penduduk usia kerja yang masuk pasar kerja mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, peningkatan TPAK ini belum cukup diimbangi penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2016 jumlah penduduk yang bekerja sebesar 546.668 orang, berkurang 5.119 orang dari keadaan Februari 2016 sebesar 541.549 orang, namun bertambah 52.981 orang dari keadaan Agustus 2015 yang sebesar 493.687 orang. Sedangkan jumlah penganggur pada Agustus 2016 sebesar 15.528 orang, berkurang 6.325 orang dari keadaan Februari 2016 yang sebesar 21.853 orang, dan berkurang 8.573 orang dari keadaan Agustus 2015 sebesar 24.101 orang.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo pada Agustus 2016 sebesar 2,76 persen (dari angkatan kerja). Hal ini menunjukkan penurunan tingkat pengangguran yang sangat signifikan dibandingkan TPT Februari 2016 sebesar 3,88 persen atau TPT Agustus 2015 sebesar 4,65 persen. Uraian jelas mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan

Kegiatan Utama	2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Angkatan Kerja	534.012	517.788	563.402	562.196
Bekerja	517.687	493.687	541.549	546.668
Pengangguran	16.325	24.101	21.853	15.528
Bukan Angkatan Kerja	270.619	295.718	257.849	265.935
Sekolah	70.311	78.825	79.484	75.928
Mengurus Rumah Tangga	166.751	185.526	152.535	168.119
Lainnya	33.557	31.367	25.830	21.888
Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas	804.631	813.506	821.251	828.131
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,06	4,65	3,88	2,76
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,37	63,65	68,60	67,89

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2017

Jika dilihat dari lapangan usaha, maka sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada bulan Agustus 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 30,63 persen atau 167.445 jiwa dari total penduduk yang bekerja, Sedangkan sektor industri sebesar 7,44 persen atau 40.665 jiwa, di sektor perdagangan 20,01 persen atau sebesar 109.389 jiwa, sektor jasa kemasyarakatan 25,09 persen 137.175 jiwa

dan sektor lainnya 16,83 persen atau 91.994 jiwa, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel. 2.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014-2016

Lapangan Pekerjaan Utama	2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	169.345	188.033	174.931	171.104	154.644	167.445
Industri	19.196	41.165	40.789	35.684	48.891	40.665
Perdagangan	104.106	84.147	108.775	97.500	122.875	109.389
Jasa Kemasyarakatan	104.443	85.080	115.787	102.859	104.633	137.175
Lainnya	110.849	80.712	77.405	86.540	110.506	91.994
Total	507.939	479.137	517.687	493.687	541.549	546.668

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2017

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal, Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2016 tercatat 216.948 orang atau 39,69 persen pekerja di Gorontalo bekerja pada kegiatan formal dan 329.720 orang atau 60,31 persen bekerja pada kegiatan informal.

Tabel 2.7
Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal- Informal Provinsi Gorontalo, 2014-2016

Sektor Formal- Informal	2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Formal	190,698	160,122	176,523	183,333	205.875	216.948
Informal	317,241	319,015	341,164	310,354	335.674	329.720
Jumlah	507,939	479,137	517,687	493,687	541.549	546.668

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2017

Dari orang yang bekerja pada Agustus 2016, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah buruh/karyawan/pegawai yaitu 196.671 orang atau 35,98 persen, diikuti berusaha sendiri sejumlah 131.916 orang atau 24,13 persen, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 87.761 orang atau 16,05 persen, sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 20.277 orang atau 3,71 persen.



Tabel 2.8
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Status Pekerjaan Utama 2014-2016

Status Pekerjaan Utama	2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	133,799	114,649	121,900	124,472	127.989	131.916
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	73,686	79,911	88,285	70,515	84.928	87.761
Berusaha dibantu Buruh Tetap	15,205	16,316	19,333	19,155	28.503	20.277
Buruh/Karyawan/Pegawai	175,493	143,806	157,190	164,178	177.372	196.671
Pekerja Bebas di Pertanian	23,821	31,366	22,470	59,657	21.459	25.661
Pekerja Bebas di Non Pertanian	25,366	27,389	25,038	27.220	24.728	20.756
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	60,569	65,700	83,471	55,710	76.570	63.626
Jumlah	507,939	479,137	517,687	493,687	541.549	546.668

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Pada Agustus 2016, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebanyak 76.896 orang atau 14,07 persen.

Tabel 2.9
Penduduk yang bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan 2014-2016

Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<= SD	311,270	300,343	297,908	281,462	292.861	281.507
SMP - SMA	142,556	132,851	157,060	158,284	193.133	188.165
Universitas	54,113	45,943	62,719	53,941	55.555	76.896
Jumlah	507,939	479,137	517,687	493,687	541.549	546.668

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

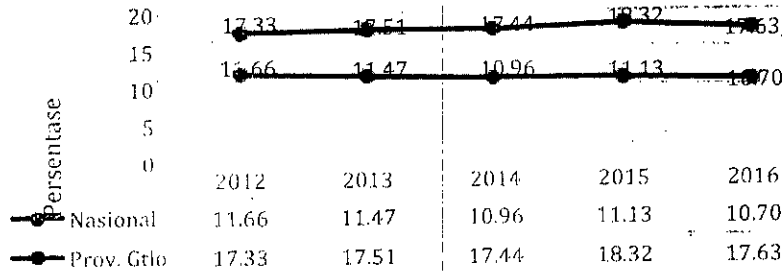
c. Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur oleh indikator kemiskinan. Data sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo diperoleh data selama kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Dimana pada tahun 2015 mengalami peningkatan angka kemiskinan yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan BBM serta kondisi perekonomian nasional yang tidak stabil. Namun demikian tahun 2016 kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana tahun 2015 persentase angka



kemiskinan sebesar 18,32 persen, turun menjadi 17,63 persen tahun 2016 atau sebesar 0,69 persen.

Grafik 2.1
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2012-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 sebesar 17,72 persen, maka terjadi penurunan sebesar 0,09 persen pada September tahun 2016 sebesar 17,63 persen. Jumlah penduduk miskin September 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203,69 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2016 sebanyak 203,19 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret - September 2016 bertambah sebanyak 500 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan. Penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 60 jiwa, sedangkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 560 jiwa. Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2016 sebesar 88,21 persen berada di pedesaan, sisanya 11,79 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin.

Dari data sebaran kemiskinan kabupaten/Kota se-Provinsi, maka dapat dilihat bahwa jumlah kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo yaitu untuk tahun 2016 sebesar 80,42 ribu penduduk miskin, sementara jumlah penduduk miskin terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 11.95 ribu penduduk. Namun jika dihat dari persentase kemiskinan menunjukkan bahwa persentase tertinggi berada di Kabupaten Boelamo untuk tahun 2016 sebesar 21,79 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 21,67 persen dan terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,79 persen, yang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2015-2016

No	Kab/Kota	Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	Kab. Boalemo	32.19	21,67	33,55	21,79
2.	Kab. Gorontalo	80.52	21,80	80.42	21,57
3.	Kab. Pohuwato	32.70	22,43	32.28	21,47
4.	Kab. Bone Bolango	28,19	18,49	26.68	17,19
5.	Kab. Gorontalo Utara	21.06	18,93	22.32	19,96
6.	Kota Gorontalo	12.18	6,05	11.95	5,79
	Provinsi Gorontalo	206.84	18,32	202.88	17,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Sementara itu terdapat dimensi lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks yang menunjukkan cukup berhasilnya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga pada tahun 2016 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 18,32 persen menjadi 17,63 persen atau sebesar 0,69 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjadi 2.787 pada September 2016, yang sebelumnya 4,116 pada Maret 2016. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2016 sebesar Rp 284.232 per kapita per bulan dan pada September 2016 menjadi Rp 286.968 per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp. 2.736 per kapita per bulan atau naik sebesar 0,96 persen.

Pada September 2016, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp 211.756/kapita/bln dan perdesaan sebesar Rp. 226.546 /kapita/bln. Di sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp 75.400 /kapita/bln dan perdesaan sebesar Rp 59.453 /kapita/bln, maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi. Hal

ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih dibandingkan wilayah perdesaan.

Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2016 sebesar Rp. 287.156 / per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp. 285.999 per kapita per bulan, dengan total garis kemiskinan Provinsi baik perkotaan dan pedesaan pada September 2016 sebesar Rp. 286.968 perkapita perbulan.

Tabel 2.11
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menurut Daerah
Tahun 2016

Rincian	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2015	209.232	75.076	284.308
September 2015	211.756	75.400	287.156
Perubahan (%)	1,21	0,43	1,00
Perdesaan			
Maret 2015	224.958	59.232	284.190
September 2015	226.546	59.453	285.999
Perubahan (%)	0,71	0,37	0,64
Kota+Desa			
Maret 2015	219.469	64.764	284.232
September 2015	221.772	65.196	286.968
	1,05	0,67	0,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

2.1.2.2. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebesar 6,52 persen, mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding tahun 2015 sebesar 6,22 persen. Pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,45 persen, diikuti oleh Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 14,92 persen dan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,04. Struktur PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tidak menunjukkan perubahan yang berarti yang masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan perikanan (37,44 persen); Konstruksi (12,00 persen); dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,95 persen).

Jika dilihat sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2016, Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,34 persen, diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan



Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,02 persen; dan Kategori Jasa Keuangan sebesar 0,68 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2016 mengalami kontraksi 3,36 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi 12,26 persen. Selain itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil, Transportasi dan Pergudangan juga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,63 persen; 0,21 persen dan 0,97 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,52 persen terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali Ekspor dan Impor. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,35 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 6,75 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,52 persen.

Struktur Ekonomi Gorontalo tahun 2016 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (60,62 persen), diikuti Impor Barang dan Jasa (40,25 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (30,53 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi gorontalo tahun 2016, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 4,09 persen; diikuti PMTB sebesar 1,83 persen.

Tabel 2:12
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2015-2016 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	Triw IV-2015	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw IV-2015	Triw III-2016	Triw IV-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 516,73	3.307,87	2.910,05	1 849,04	2.362,01	2.072,43
B Pertambangan dan Penggalian	98,17	95,52	102,13	77,08	73,41	78,37
C Industri Pengolahan	313,31	340,45	337,40	225,08	238,42	236,92
D Pengadaan Listrik dan Gas	2,85	3,66	3,84	3,93	4,82	5,03
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,82	4,48	4,56	2,77	3,17	3,21
F Konstruksi	990,10	963,59	1.009,38	745,59	716,96	746,77
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	801,04	903,63	895,93	584,76	642,39	641,07
H Transportasi dan Pergudangan	472,50	510,09	503,67	340,62	362,61	359,11
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	170,71	184,34	189,10	125,74	133,91	136,98
J Informasi dan Komunikasi	191,43	211,47	215,18	166,56	180,38	184,59
K Jasa Keuangan dan Asuransi	282,88	330,40	356,53	212,09	242,24	258,57
L Real Estate	144,75	155,58	159,35	112,07	116,26	119,12
M,N Jasa Perusahaan	7,38	7,95	8,02	5,44	5,72	5,77
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	640,05	596,71	615,09	526,77	483,48	501,86
P Jasa Pendidikan	322,46	318,99	339,23	253,53	246,76	255,00
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271,79	289,46	290,99	209,42	219,38	220,21
R,S, Jasa lainnya	126,82	131,50	132,98	101,09	103,57	104,64



T,U						
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7.356,01	8.355,70	8.073,42	5.541,58	6.135,51	5.929,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2014-2016 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9 511,57	10 584,22	11.916,05	7 698,32	8 026,19	8.540,21
B Pertambangan dan Penggalian	331,42	375,72	380,96	283,11	294,31	294,53
C Industri Pengolahan	1 051,50	1 191,32	1.333,94	843,70	883,01	941,23
D Pengadaan Listrik dan Gas	11,71	10,08	12,99	15,29	15,55	17,42
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,76	14,01	16,94	10,25	10,50	12,06
F Konstruksi	2 971,32	3 525,79	3.820,19	2 470,12	2 711,44	2.849,32
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 624,85	2 997,64	3.484,22	2 151,87	2 275,61	2.500,71
H Transportasi dan Pergudangan	1 535,45	1 790,68	1.974,18	1 207,88	1 324,74	1.410,38
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	540,44	639,59	721,03	446,92	482,90	524,98
J Informasi dan Komunikasi	631,10	721,78	828,34	587,23	644,77	710,71
K Jasa Keuangan dan Asuransi	930,75	1 077,03	1.316,27	742,57	817,90	968,83
L Real Estate	463,94	541,92	617,52	396,25	428,83	464,45
M,N Jasa Perusahaan	24,30	28,07	31,20	20,19	21,32	22,57
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 214,14	2 358,85	2.422,50	1 906,73	1 978,49	1.976,63
P Jasa Pendidikan	1 051,89	1 186,51	1.288,66	894,72	958,61	994,83
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	862,82	1 014,32	1.144,74	726,38	803,68	871,82
R,S, T,U Jasa lainnya	423,69	478,63	513,92	374,18	392,59	406,47
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	25 193,65	28 536,15	31.823,65	20 775,70	22 070,45	23.507,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Jika dibandingkan antara triwulan IV-2016 terhadap triwulan triwulan IV-2015 (y-on-y), maka terjadi pelambatan sebesar 0,63 persen, yaitu dari 7,65 persen (tw.IV 2015) menjadi 7,02 persen (tw.IV 2016). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 27,82 persen, diikuti Jasa Keuangan sebesar 21,91 persen, dan pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 16,12 persen.

Struktur perekonomian Gorontalo pada triwulan IV-2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (36,04 persen); Konstruksi (12,50 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (11,10 persen). Sumber utama pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan IV-2016 adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,04 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,02 persen; dan Kategori Jasa Keuangan 0,84 persen.



Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 (persen)

Lapangan Usaha		Tw. IV-2016 terhadap Tw. III- 2016	Triw IV- 2016 Terhadap Triw IV 2015	Kumulatif Tw. IV-2016 terhadap Kumulatif Tw. IV-2015	Sumber Pertumbuha n Tw. IV- 2016 (y-on-y)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-12,26	12,12	6,43	4,04
B	Pertambangan dan Penggalian	6,76	1,67	0,08	0,02
C	Industri Pengolahan	-0,63	5,22	6,58	0,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,28	27,82	12,04	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,20	16,12	14,92	0,01
F	Konstruksi	4,16	0,16	5,09	0,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,21	9,70	9,91	1,02
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,97	5,43	6,47	0,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	8,94	8,71	0,20
J	Informasi dan Komunikasi	2,33	10,82	10,23	0,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,74	21,91	18,45	0,84
L	Real Estate	2,46	6,29	8,31	0,13
M,N	Jasa Perusahaan	0,74	5,96	5,91	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,80	-4,73	-0,09	-0,45
P	Jasa Pendidikan	3,34	0,58	3,78	0,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	5,15	8,48	0,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,03	3,51	3,54	0,06
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-3,36	7,02	6,52	7,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan
Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2014-2016 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	4,24	6,43	2,40	1,57	2,34
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,95	0,08	0,05	0,05	0,00
C	Industri Pengolahan	6,00	4,66	6,58	0,25	0,19	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,46	1,72	12,04	0,01	0,00	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,34	2,46	14,92	0,00	0,00	0,01
F	Konstruksi	7,85	9,77	5,09	0,93	1,16	0,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,05	5,73	9,91	0,83	0,59	0,39
H	Transportasi dan Pergudangan	8,57	9,67	6,47	0,49	0,56	0,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,93	8,05	8,71	0,15	0,17	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	9,02	9,80	10,23	0,25	0,28	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,54	10,15	18,45	0,17	0,36	0,68
L	Real Estate	7,85	8,22	8,31	0,15	0,16	0,16
M,N	Jasa Perusahaan	5,96	5,57	5,91	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,92	3,76	-0,09	0,64	0,35	-0,01
P	Jasa Pendidikan	13,55	7,14	3,78	0,55	0,31	0,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,84	10,64	8,48	0,30	0,37	0,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,28	4,92	3,54	0,10	0,09	0,06
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,27	6,23	6,52	7,27	6,22	6,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

2.1.2.3. Kesejahteraan Sosial

Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT, melakukan penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Penanganan dilakukan melalui pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Di tahun 2016

penanganan Masyarakat Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan terhadap 917 orang PMKS yang dibagi menjadi masing-masing kegiatan yaitu pemberian pelayanan kepada penyandang cacat, perlindungan sosial kepada anak terlantar, pemberian pelayanan bagi lansia, rehabilitasi sosial kepada penyandang tuna sosial. Pemberian layanan terhadap masyarakat miskin untuk 1.220 KK (244 KUBE) serta pembangunan 2 unit MCK dan 8 Paket sarana penunjang dilokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berjumlah 403 KK. Disamping itu, dilakukan layanan dan pembinaan terhadap pilar - pilar kesejahteraan sosial masyarakat bagi 43 lembaga sosial masyarakat atau sebanyak 77 orang.

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi berupaya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, kesehatan gratis, perlindungan sosial bagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya serta program-program lainnya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan sosial, beasiswa miskin dan lain sebagainya.

2.1.2.4. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisan program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Hingga tahun 2016, jumlah organisasi pemuda yang terdapat di Provinsi Gorontalo masih sebanyak 34 kelompok, sedangkan organisasi olahraga berjumlah 24 kelompok.

Dari upaya pengembangan prestasi pemuda dan olahraga, Provinsi Gorontalo selama tahun 2016 telah berpartisipasi dalam berbagai event baik nasional maupun internasional. Tercatat bahwa 19 medali yang diraih Provinsi Gorontalo dari beberapa cabang olahraga, diantaranya karate, tenis meja, pencak silat, sepak takraw, dan bulu tangkis.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit

unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus di genjot oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Tahapan dan penjenjangan pembinaan peningkatan prestasi siswa dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi, hingga ke tahap Nasional dan Internasional. Jenis lomba dan pertandingan berupa Lomba O2SN (olimpiade olahraga siswa nasional), OSN (olimpiade sains nasional), FLS2N (festifal lomba seni siswa nasional), olimpiade matematika, dan lainnya.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pembangunan sektor pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal diantaranya adalah: Program PAUD, program pendidikan dasar, program pendidikan menengah, program pendidikan untuk kesetaraan, masyarakat, kursus dan kelembagaan dan program pendidikan khusus serta pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin. Kemudian melalui program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mempercepat keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.

Dari berbagai program dan kebijakan yang dilakukan tersebut capaian sektor pendidikan hingga tahun 2016 relatif cukup baik. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2016, untuk SD/MI sebesar 111,40 persen, SMP/MTs sebesar 99,75 persen, dan SMA/MA/SMK sebesar 93,54 persen. Jika dibandingkan tahun 2015, APK SD/MI sebesar 114,23, APK SMP/MTs sebesar 98,85 dan SMA/MA/SMK sebesar 89,92, maka terjadi peningkatan Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTs sebesar 0,9 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 3,62 persen. Sementara untuk APK SD/MI mengalami penurunan sebesar 2,83 persen.

Sementara untuk APK PAUD dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan. Capaian Tahun 2015 sebesar 52,9 %. Pada tahun 2016 Indikator Kinerja ini sudah melebihi yang ditetapkan yaitu dengan target 53,19 % dan capaian hasil 53,44 %. Indikator kinerja pendukung dalam upaya meningkatkan APK tersebut dilakukan melalui penyediaan 736 TK, 37 buah RA dan Kelompok Bermain (KB) 985 buah, Tempat Penitipan Anak (TPA) 60 lembaga, SPS sebanyak 198 lembaga, sehingga total lembaga PAUD 2.016 lembaga.

Indikator lainnya menunjukkan pembangunan pendidikan yang dilihat dari Angka Partisipasi Murni, dimana pada tahun 2016 untuk APM SD/MI sebesar 98,34



persen, SMP/MTs sebesar 75,43 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 76,13 persen. Jika dibandingkan dengan pencapaian APM tahun 2015, dimana untuk APM SD/MI sebesar 101,66 persen, SMP/ MTs sebesar 74,80 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 71,34 persen, maka terjadi peningkatan Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK masing-masing sebesar 0,63 persen dan 4,79 persen, sementara untuk SD/MI mengalami penurunan sebesar 3,32 persen. Pencapaian APM untuk SD/MI dan SMA/MA/SMK tahun 2016 telah memenuhi target, sementara SMP/MTs belum mencapai target RPJMD (2012-2017) untuk tahun 2016, yang dapat diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar
Provinsi Gorontalo tahun 2015-2016

No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		2015	2016	2015	2016
1.	SD/MI	101,66	98,34	114,23	111,40
2.	SMP/MTs	74,80	75,43	98,85	99,75
3.	SMA/MA/SMK	71,34	76,13	89,92	93,54

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2017

Sementara itu, melalui program peningkatan pendidikan formal maupun non formal diperoleh capaian peningkatan angka melek huruf pada tahun 2016 menjadi 99,81 persen, capaian tersebut lebih baik dari tahun 2015 yang mencapai 99,71 persen. Dalam kebijakan penerapan pendidikan gratis atau lebih dikenal dengan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) di tahun 2015 telah mengakomodir siswa SMA/MA/SMK sederajat sebanyak 47.124 siswa yang memperoleh bantuan operasional sekolah, jumlah tersebut terdiri dari SMA Negeri dan Swasta sebanyak 26.893 siswa, untuk SMK Negeri dan Swasta sebanyak 18.287 siswa, untuk MA Negeri sebanyak 1.784 siswa dan untuk SMALB sebanyak 160 siswa. Namun untuk tahun 2016 sebagaimana Permendagri 52 tahun 2016 tentang Penyusunan APBD 2016 bantuan operasional sekolah dialihkan menjadi bantuan hibah barang berupa perlengkapan sekolah, meubelair. Disamping itu melalui program yang sama diberikan insentif untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, untuk tenaga pendidik PKLK, insentif tenaga kependidikan PKLK, insentif guru daerah terpencil dan insentif untuk guru kontrak dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.572 orang tahun 2015 dan 2.107 orang guru pada tahun 2016 yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

Untuk pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan, terus dilakukan melalui Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat, Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan, Melaksanakan sosialisasi/ pemyarakat berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan, Peningkatan

pelayanan perpustakaan dan arsip, Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi, konservasi, restorasi, Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian, hibah/ sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak. Dari upaya - upaya tersebut pada tahun 2016 jumlah pengunjung mencapai 260.321 orang telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 7.000 orang, untuk jumlah buku ditahun 2016 sebanyak 348.042 Eksemplar, sedangkan koleksi buku dan judul terbitan daerah sebanyak 30 judul. Pada tahun 2016 jumlah pustakawan berjumlah 2 orang dan tenaga teknis perpustakaan berjumlah 15 orang yang bertugas dalam pengolahan buku, pemegang kelas bahan pustaka dan IT perpustakaan. Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam hal kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo telah menganggarkan kegiatan peningkatan SDM khususnya pelatihan dan diklat pustakawan/tenaga teknis perpustakaan kepada 90 orang tenaga pengelola kearsipan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap pemustaka (masyarakat) dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif, Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan. Melalui upaya tersebut status kesehatan dan gizi masyarakat terus membaik, yang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja urusan kesehatan, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH) yang mengalami peningkatan, yang semula 67,00 tahun pada Tahun 2014 menjadi 67,12 tahun pada Tahun 2015. Namun demikian, jika dilihat dari indikator kinerja kesehatan khususnya untuk Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami peningkatan dimana AKB tahun 2016 sebesar 15,0 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan posisi tahun 2015 sebesar 11,6 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tahun 2016 belum melampaui capaian target RPJMD 2012-2017 yaitu 12,8 per 1.000 kelahiran hidup.

Faktor yang mempengaruhi antara lain jarak dan transportasi ke tempat pelayanan kesehatan yang jauh, lingkungan yang tidak ber-PHBS seperti tinggal di lingkungan yang tidak sehat (kebiasaan merokok di dalam rumah, ventilasi rumah kurang memenuhi syarat untuk sirkulasi dan pencahayaan), asupan gizi seperti pemberian MP- ASI terlalu dini, pemberian MP-ASI tidak sesuai umur, kualitas MP-ASI kurang baik/tidak memenuhi kebutuhan gizi, penggunaan susu formula, terutama karena botol susu dan dot kurang bersih, minum air mentah/tidak dimasak, makanan dan minuman tercemar kuman penyakit, pemberian ASI kurang memadai, imunisasi yang tidak lengkap, faktor perilaku ibu dan keluarga seperti

pada saat ibu hamil sering mengkonsumsi obat-obatan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, kemungkinan ibu merokok atau sering menghirup asap rokok (perokok pasif) dan adanya penyakit infeksi.

Sama halnya dengan Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2016 sebesar 16,3 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 12,8 per 1.000 kelahiran hidup, dan belum mencapai target RPJMD untuk 2016 sebesar 16,2 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian balita di Provinsi Gorontalo antara lain disebabkan oleh Diare : 20%, Ispa : 8%, Typoid : 4%, Kelainan saluran cerna : 4%, Lain-lain : 64%.

Demikian halnya untuk angka kematian neonatal tahun 2016 sebesar 11,0, meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 8,0. Penyebabnya diantaranya adalah Berat bayi lahir rendah (BBLR) karena ibu hamil kurang gizi, kurang darah, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, Afiksia (pendarahan saat hamil dan persalinan), serta penyebab lainnya yaitu kelainan kongenital yang dipengaruhi oleh sering mengkonsumsi obat-obatan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, kemungkinan ibu merokok atau sering menghirup asap rokok

Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak yang ditandai masih tingginya angka kematian ibu (AKI) tahun 2015 yang mencapai 253,4 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 301,7 per 100.000 kelahiran hidup (November 2016) masih jauh dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 102,0 per 100.000 KH. Meningkatnya Angka Kematian Ibu diantaranya disebabkan oleh kondisi fisik dan kesehatan Ibu Hamil seperti anemia, infeksi, kekurangan energi kronik (KEK), hipertensi, malaria dan atau pendarahan *post partum*. Selain itu dipengaruhi oleh faktor umur ibu hamil yakni (1) terlalu muda < 20 tahun, (2) terlalu tua > 35 tahun, (3) terlalu dekat jarak kehamilan dan (4) terlalu banyak anak.

Sementara itu untuk prevalensi kekurangan gizi tahun 2015 sebesar 24,5 point untuk tahun 2015, belum mencapai target RPJMD untuk tahun 2015 sebesar 13,78% dan tahun 2016 sebesar 22,25% dari yang ditargetkan sebesar 13,56% tahun 2016. Perbaikan status gizi masyarakat antara lain melalui perbaikan status gizi anak balita. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi, tercatat Persentase Balita Gizi Buruk tahun 2016 sebesar 4,56% menurun dibanding tahun 2015 sebesar 5,7 persen. Namun demikian masih belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 3,34 persen. Kondisi ini menunjukkan status gizi masyarakat perlu menjadi perhatian dan intervensi program kegiatan untuk mendorong peningkatan gizi masyarakat. Dari upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan gizi buruk di Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa Tingkat capaian indikator kinerja persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dengan indikasi medis maupun tanpa indikasi medis yang terdeteksi telah dirawat, baik itu rawat inap di



TFC, puskesmas perawatan dan di rumah sakit maupun rawat jalan di puskesmas non perawatan dan rumah sakit pada tahun 2016 telah mencapai target 100% dengan kata lain seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan.

Pemanfaatan akses air bersih dan kelayakan sanitasi untuk meningkatkan hidup bersih dan layak nya kehidupan masyarakat juga terus dikembangkan, dimana untuk melihat tingkat kelayakan hidup penduduk yang sehat dapat dilihat dari Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat di provinsi Gorontalo tahun 2014 yaitu 42,5% meningkat di tahun 2015 menjadi 63,8% dan tahun 2016 meningkat menjadi 69,5% sebagaimana target yang ditetapkan tahun 2016 yakni 69,56%. Sementara untuk persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar di Provinsi Gorontalo tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu 56,27, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 50,27%. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 63,5%.

Sasaran pembangunan bidang kesehatan lainnya ditandai dengan Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS di rumah tangga sangat penting peranannya dalam dalam mencegah penyakit baik penyakit non menular (seperti gizi buruk, gizi kurang, masalah ibu hamil dan bersalin) maupun penyakit menular (seperti flu, dimana virus penyebabnya akan mati dengan sabun/detergen). Terwujudnya peningkatan perilaku masyarakat yang ber PHBS, khususnya pada tatanan rumah tangga dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Jumlah rumah tangga yang ber PHBS berdasarkan hasil pemantauan terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2016 mencapai 73,7 % dari jumlah yang di pantau menjadi 74% di tahun 2016.

Untuk membantu peningkatan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi melalui program Jamkesda telah membantu pelayanan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004. Untuk tahun 2016, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan jamkes kepada 220.000 jiwa, dengan total anggaran Jamkesda sebesar Rp. 60.747.926.339.

Untuk ketersediaan tenaga medis per 1000 penduduk Tahun 2016 rasionya untuk dokter spesialis mencapai 0,04 dari yang ditargetkan sebesar 0,06, dokter gigi 0,03 dari target sebesar 0,04, dokter umum 0,14 dari target yang ingin dicapai sebesar 0,29, perawat sebesar 0,85 dari target sebesar 1,49, bidan 0,69 dari yang ditargetkan sebesar 0,91, apoteker sebesar 0,04 dari target sebesar 0,07 dan nutrisisionis sebesar 0,17, dari target 0,33 . Dari kondisi tersebut terlihat bahwa Gorontalo masih sangat kekurangan Tenaga kesehatan.

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 terdiri dari RSUD sebanyak 9 unit, RS Swasta 4 unit, sehingga total Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo sejumlah 13 unit, dengan rasio per 1.000 penduduk sebesar

0,011, Puskesmas 93 unit dengan rasio 0,08 per 1.000 penduduk. Sementara Puskesmas pembantu sejumlah 232 unit, Puskesmas keliling 86 unit, dan Posyandu sebanyak 1.308, dan Desa Siaga aktif sebanyak 525.

c. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo dari tahun 2016 sebesar 72,09, dibawah target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 87. Hal ini disebabkan mulai tahun 2015 terjadi perubahan formula perhitungan dan penambahan jumlah parameter oleh Kementerian yang menyebabkan pergeseran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tahun 2014, IKLH Provinsi Gorontalo sebesar 98.73, namun setelah perubahan perhitungan tahun 2015 IKLH menjadi 72,09, sementara penentuan target IKLH terlalu tinggi masih menggunakan parameter yang lama. Disamping itu tekanan lingkungan pada tahun ini juga relative meningkat setiap tahunnya. Pencapaian nilai IKLH tersebut akan terus ditingkatkan dengan tingkat capaian sampai akhir RPJMD (2017) sebesar 90.

Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup masih sangat parsial, belum ada program yang mengintegrasikan beberapa sektor terkait untuk bersinergi dalam satu lokus sasaran dan target lokasi sehingga hasil pencapaian kinerja dapat lebih optimal. Hal lainnya adalah ketersediaan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorium lingkungan yang belum tersedia serta anggaran yang sifatnya masih terbatas, menyebabkan pengelolaan lingkungan di Gorontalo belum terlalu efektif.

Upaya dalam menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup di tahun 2016 dilakukan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melalui penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH serta salah satu program pengembangan riset daerah melalui kegiatan penelitian Evaluasi Status Capaian & Implementasi CTI di Provinsi Gorontalo, Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan hasil tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Gorontalo (SLHD) tahun 2016, Laporan Environment Quality Index (EQI) dan tersusunnya laporan SPM bidang LH tahun 2016, kondisi kualitas udara ambiet di Kab/Kota masih baik, gambaran Status Mutu air Sungai yaitu Sungai Bone: Cemar Ringan – sedang, sungai, Biyonga: cemar ringan-sedang, sungai Paguyaman: cemar ringan-sedang, sungai

Buladu: cemar sedang-berat, sungai Taluduyunu: cemar ringan-sedang, sungai Andagile Atinggola: cemar ringan-sedang, sungai Randangan pohuwato: cemar ringan-sedang. Disamping itu dilakukan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir, pembinaan kegiatan atau usaha untuk peningkatan penilaian kinerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan pada kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan.

Selain itu, juga telah dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan data dan informasi lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten dan kota dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Isu - isu yang menjadi perhatian dalam bidang lingkungan hidup di provinsi Gorontalo untuk kedepan adalah kerusakan Danau Limboto, penurunan kualitas air Danau Limboto, pencemaran air sungai, kerusakan mangrove dan terumbu karang, tingkat ketaataan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah.

Disamping itu untuk revitalisasi danau limboto yang dilaksanakan mulai Tahun 2014. Untuk tahap awal dilakukan pengerukan danau limboto, pembersihan enceng gondok, dan pembangunan tanggul pencegah banjir yang kemudian dilanjutkan di tahun 2015 sampai dengan 2016 dilakukan pekerjaan pengerukan dan pembangunan tanggul pembatas.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan, KUMKM dan pariwisata merupakan sektor yang strategis untuk membangun dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.

a. Sektor Pertanian

Prioritas Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan luas panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2016 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo antara lain bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan



nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip *zero waste* melalui *reduce, re-use dan re-cycle*.

Dari prioritas pengembangan tersebut, pencapaian kinerja sektor pertanian di tahun 2016 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2016 (ASEM) sebesar 345.263 ton Gabah Kering Giling (GKG) meningkat 14.043 ton dibanding angka tetap tahun 2015 sebesar 331.220 ton Gabah Kering Giling (GKG). Capaian produksi padi untuk tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 328.521 ton. Namun demikian peningkatan produksi ini berbanding terbalik dengan produktivitas dimana terjadi penurunan produktivitas pada dari 55,51 Ku/ha tahun 2015, mengalami penurunan tahun 2016 sebesar 52,16 Ku/Ha.

Hal ini disebabkan tahun 2016 Provinsi Gorontalo mendapat bantuan benih Padi Sawah seluas 71.140 ha yang terdiri dari : APBD I seluas 11.000 ha menurun 6.000 ha dibanding tahun 2015, dari anggaran APBN mendapat bantuan benih padi sebanyak 54.000 ha yang terdiri dari bantuan padi in hibrida untuk ekstensifikasi 15.000 ha, intensifikasi 39.000 ha, teknologi hazton 100 ha dan padi organik 40 ha. Peningkatan luas tanam dan luas panen meningkatkan total produksi padi secara keseluruhan. Meskipun produktivitas menurun tetapi karena luas panen meningkat maka total produksi padi meningkat.

Produksi jagung tahun 2016 (ASEM) mencapai 911.341 ton pipilan kering, capaian produksi jagung tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 927.436 ton, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari angka tetap tahun 2015 sebesar 643.512 ton pipilan kering. Bantuan benih jagung dari anggaran APBD 2016 sebanyak 7.000 ha dan APBN sebanyak 77.000 ha ditanam pada periode musim tanam I dan II. Selanjutnya untuk musim tanam III (September-Desember) mendapat tambahan anggaran APBDP 4.000 ha dan APBNP 25.000 ha (full paket). Tetapi karena pengadaan benih jagung untuk APBDP mengalami keterlambatan sehingga penanaman yang semestinya bulan September bergeser penanaman menjadi bulan Oktober 2016 dan berakibat panen dan berproduksi nanti di Januari 2017.

Produksi kedelai tahun 2016 (ASEM) sebesar 3.910 ton juga mengalami peningkatan dibanding produksi tahun 2015 sebesar 3.203 ton biji kering. Produksi kedelai untuk tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 2.502 ton pertahun. Sementara produktivitas kedelai 2016 mencapai 15,68 Ku/Ha, mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 13,48 Ku/Ha.

Jumlah produksi Cabe dari Angka Sementara (ASEM) 2016 sebesar 9.326 Ton (67%) tetapi dibanding tahun 2015 yang hanya 8.941 ton meningkat 385 ton.



Peningkatan ini disebabkan Adanya bantuan dari pemerintah baik melalui dana APBN, APBD dan APBN-P, yang di salurkan ke Kabupaten Kota. Bantuan tersebut bukan hanya bibit seperti beberapa tahun lalu, tetapi di lengkapi dengan sarana dan prasarana berupa alkon, mulsa plastik dan shading nett, dan juga benih di salurkan pada bulan April 2016, penanaman dilaksanakan pada Mei – Juni, Panen di bulan July – agustus, dimana kondisi Gorontalo dalam keadaan musim panas, dengan bantuan alat dan mesin untuk pengairan lahan cabe rawit, sehingga produksinya meningkat. Tidak tercapainya target produksi sesuai Renstra karena tidak tercapainya total luas panen. Namun produksi sebanyak 9.326 ton untuk kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo sudah tercukupi.

Produksi Buah-buahan sesuai ASEM 2016 BPS sebesar 14.523 Ton atau naik sebesar 4% dari target renstra. Hal ini disebabkan tanaman buah bantuan tahun 2012-2013 mulai berbuah nanti tahun 2016-2017 ini.

Total produksi tanaman sayuran tidak mencapai target hanya 57% dari target renstra, namun jika dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 12.70 meningkat tajam. Hal ini disebabkan beberapa komoditi sayuran meningkat produksi seperti Bawang Merah meningkat dari produksi 1.121 Ton dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 303 Ton, Tanaman Tomat yang 1.106 ton

Tanaman obat/biofarmaka belum mencapai target yaitu hanya 28% ini disebabkan petani masih kurang berminat dalam pembudidayaan tanaman biofarmaka, selain itu bantuan dari pemerintah yang sangat minim dari APBD hanya menganggarkan benih jahe 200 kg saja.

Ketahanan Pangan, kestabilan ekonomi suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ketahanan pangan, sehingga ketahanan pangan fungsinya menjadi sangat penting dan strategis. Ketahanan pangan identik dengan bagaimana menjaga ketersediaan pangan serta kemampuan rumah tangga dalam mengaksesnya. Sehingga ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) yang terbagi atas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi. Skor PPH Ketersediaan menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan di daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2015 mencapai 74,2 capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 62,81, namun angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yakni sebesar 88,5, sementara target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 94,3. Demikian halnya dengan skor PPH Konsumsi merupakan parameter yang digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam. Hasil analisa yang



ditunjukkan bahwa pola konsumsi pangan tahun 2016 mencapai 79,4 capaian ini lebih baik dibanding tahun 2015 sebesar 72,8. Skor PPH Konsumsi Gorontalo juga masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 84,7. Capaian Skor PPH Ketersediaan maupun konsumsi Provinsi Gorontalo belum mencapai Standar Pelayanan Minimal 90 serta skor PPH ideal 100 point.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan ketersediaan bahan makanan adalah dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian.

Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih dan Pupuk, Perbaikan Jaringan Irigasi, Pengembangan Optimasi Lahan, Bantuan Alsintan Pra Panen dan Pasca Panen, Bantuan Bangunan dan Revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan TNI. Sementara untuk peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan bantuan alat tangkap, seperti perahu fiber <5GT bermesin temple 15 PK, dan <3 GT bermesin katinting 9 PK, bantuan katinting 5 PKm, bantuan sarana produksi perikanan budidaya air payau, bantuan pupuk dan pakan ikan untuk pembudidaya, bantuan sarana produksi pembudidayaan ikan untuk pembudidaya. Khususnya dalam mendorong peningkatan produksi telah terbukti mengungkit pencapaian produksi, namun kedepan dengan berbagai tantangan yang lebih beragam maka diperlukan penyempurnaan dan atau peningkatan kualitas baik pada tatanan perencanaan dan operasionalisasi di lapangan.

Implikasi dari pencapaian kinerja sektor pertanian tersebut terlihat berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Gorontalo pada Desember 2016 105,95 persen, mengalami kenaikan dibanding NTP Desember 2015 sebesar 104,77 dan NTP November 2016 sebesar 105,77. Kenaikan NTP pada Desember 2015 disebabkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan indeks harga hasil produksi pertanian.

Pada periode Januari 2016 – Desember 2016, NTP Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2016 sebesar 106,46 dan terendah terjadi pada bulan April 2016 sebesar 100,26. Kenaikan NTP Desember 2016, disebabkan oleh naiknya subsektor tanaman pangan sebesar 1,38 persen, dan subsector perikanan sebesar 1,16 persen. Sedangkan 3 subsektor lainnya mengalami penurunan indeks yaitu subsector tanaman hortikultura sebesar -0,05 persen, subsector tanaman



perkebunan rakyat sebesar -0,83 persen, dan subsector peternakan sebesar -0,36 persen.

Pengembangan pertanian juga dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi dan pemberdayaan penyuluh, di tahun 2016 masih dilakukan peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluh dengan penyediaan demplot Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebanyak 22 unit dan sebanyak 77 Unit lembaga penyuluh difasilitasi dan dikembangkan, serta peningkatan kelas kemampuan kelompok sebanyak 146 kelompok. Kemudian dilakukan juga peningkatan kapasitas penyuluh PPK melalui diklat fungsional sebanyak 30 orang dan diklat teknis bagi 30 penyuluh serta diklat teknis pelaku utama dan pelaku usaha sebanyak 30 orang.

Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi. Dari upaya tersebut populasi ternak sapi mengalami peningkatan dari 197.124 ekor tahun 2015 menjadi 207.969 ekor ditahun 2016, belum mencapai target populasi tahun 2016 sebanyak 223.704 ekor.

Untuk populasi kambing pada tahun 2016 sebesar 88.426 ekor mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 84.868 ekor. Populasi kambing tahun 2016 juga belum mencapai target sebesar 96.881. Untuk Populasi ternak ayam buras tahun 2016 sebesar 1.759.516 ekor, mengalami penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 1.850.163. populasi tahun 2016 untuk ternak ayam juga belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1.932.405 ekor. Belum tercapainya target Populasi ternak Sapi, Kambing dan Ayam disebabkan karena masih rendahnya produktifitas ternak yang ada sebagai akibat dari rendahnya kualitas genetic ternak. Disamping itu, system budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice*) belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat.

Untuk menunjang peningkatan populasi ternak maupun produksi daging tersebut dilakukan upaya Pemeriksaan Produk Hasil Pangan ASUH (PMSR-CM) di Laboratorium Kesmavet sebanyak 384 sampel, Pengendalian dan pengobatan penyakit hewan menular strategis (PMHS) tahun 2016 sebanyak 16.565 ekor dari yang ditargetkan 9.328 ekor. Pengembangan Kelompok Ternak Sapi sebanyak 4.255 kelompok, Pengembangan Kelompok Ternak Kambing sebanyak 44 kelompok serta Pengembangan Kelompok Ternak Ayam Buras sebanyak 515 kelompok ditahun 2016.

Sementara untuk asupan protein hewani dari jumlah konsumsi daging ditahun 2016 sebesar 2,2 kg/kapita/thn, artinya terjadi penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 3,1, kg/kapita/tahun, dan belum mencapai target 2016 sebesar 3,7 kg/kapita/tahun. Hal ini terjadi karena kenaikan harga daging, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi ikan daripada daging.

Pengembangan bidang perkebunan juga terus di tingkatkan melalui Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan. Dari upaya tersebut kinerja perkebunan tahun 2016 untuk perluasan areal kelapa mencapai 67.489 Ha, melebihi target yang ditetapkan sebesar 67.487 dengan produksi kelapa dalam sebesar 60.932 ton dari target sebesar 62.494 ton. Untuk produksi kakao di tahun 2016 mencapai 4.564,6 ton melebihi target 2016 sebesar 4.082 ton, dari luas areal tanaman kakao untuk tahun 2016 seluas 15.882 Ha. Sementara untuk produksi tebu Tahun 2016 sebesar 49.331 ton dari target sebesar 31.297 ton. Pencapaian sektor perkebunan ini di hasilkan dari upaya revitalisasi usaha agribisnis yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi perwilayahan di Provinsi Gorontalo yang meliputi kelapa, kakao, cengkeh dan tebu dan revitalisasi pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui pola sistem kebersamaan ekonomi. Dalam meningkatkan kinerjanya di sektor peternakan dan perkebunan serta membangun sinergi dengan pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat Dinas Peternakan dan Perkebunan menjadi leading sektor dalam pengembangan pertanian secara terpadu yang dilakukan dengan pembagian kluster pada wilayah-wilayah potensial.

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar yang dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan laut seram potensinya mencapai 595.630 Ton/Tahun, dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun. Sedangkan untuk perikanan Budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan tawar potensinya sebesar 339.268 Ton per tahun. Berdasarkan hal tersebut sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pengembangannya hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang berada dan menetap diwilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan dan kelautan.

Dari program peningkatan produksi perikanan tangkap yang dilakukan, realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2015 yang hanya mencapai 105.715 Ton meningkat produksinya tahun 2016 hingga mencapai 115.873 Ton atau naik sebesar 9,60 persen. Untuk produksi perikanan Budidaya juga mengalami peningkatan dari 63.131,22 Ton ditahun 2015 naik menjadi 100.245 ton di tahun 2016, jumlah tersebut terdiri dari produksi ikan budidaya dengan capaian 38.295 Ton, dan rumput laut dengan jumlah produksi 61.950 ton.

Tabel 2.17
Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perikanan Tangkap	85.815	92.171,3	103.017,80	105.715	115.873
2	Perikanan Budidaya	133.340	125.654,50	57.392,30	63.131,22	100.245
	- Produksi Ikan	26.668	21.730,30	32.457	26.363,92	38.295



	Budidaya					
	-Produksi rumput laut	106.672	103.924,20	24.935,30	36.767,30	61.950
	Total (Tangkap dan Budidaya)	219.155	217.825,80	160.410,10	168.848,22	215.918

Sumber : Dinas Perikanan Kelautan provinsi Gorontalo, 2017

Sedangkan dilihat dari hubungan target dan realisasi pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap mencapai 101,13 persen telah melebihi target tahun 2016 sebesar 114.578 ton. Untuk Produksi Perikanan Budidaya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 186.490 ton, realisasi produksi hanya mencapai 100.245 Ton atau persentase capaiannya hanya sebesar 53,75 persen. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim yang sulit diprediksi.

Tabel 2.18
Hubungan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 - 2016

No.	Tahun	Perikanan Tangkap (Ton)			Perikanan Budidaya (Ton)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2012	85.567	85.815	100,30	133.340	133.340	100
2	2013	90.964	92.171	101,33	144.007	125.654	87,26
3	2014	97.331	103.017,8	105,84	156.248	57.392,3	36,73
4	2015	105.118	105.715	100,55	170.310	63.131	37,07
5	2016	114.578	115.873	101,13	186.490	100.245	53,75

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2017

Sementara itu produksi perikanan oleh kelompok nelayan dan pembudidaya pada tahun 2016 adalah sebesar 110.250 ton, hasil ini tidak mencapai target yang ingin dicapai sebesar 110.807 ton. Produksi perikanan ini adalah terdiri dari produksi perikanan laut dan produksi perikanan budidaya.

Dari capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tahun 2016 ini memberikan kontribusi pendapatan rata-rata bagi nelayan sebesar Rp. 2.700.000 per bulannya dan bagi pembudidaya rata-rata sebesar 2.500.000 per bulannya. Capaian rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya pada tahun 2016 melebihi target yang ditetapkan yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.648.545 untuk pendapatan nelayan, dan Rp. 2.278.085 untuk pendapatan pembudidaya. Sementara untuk pendapatan pengolah dan pemasar perikanan sebesar Rp. 3.400.000/bulan. Selain itu, tingkat capaian konsumsi ikan pada tahun 2016 mencapai 55,7 kg/kapita/thn, artinya sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 55 kg/kapita/thn.

Dalam rangka peningkatkan produksi perikanan dan peningkatan kehidupan dilakukan beberapa strategi yaitu, dengan melakukan Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan Sarana Produksi Perikanan Tangkap berupa Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat tangkapnya. Langkah ini

diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo yaitu masih tingginya (97,67 persen) armada tangkap di Provinsi Gorontalo masih berstatus dibawah > 30 GT (perahu tanpa motor dan motor tempel) dan kesemuanya dimiliki oleh nelayan kecil (nelayan tradisional). Dengan kondisi tersebut, nelayan tentu saja tidak akan mampu menghasilkan produksi yang optimal. Apalagi para nelayan juga masih tergantung pada kondisi musim, dan cuaca, yang artinya bisa dipastikan jika mereka tanpa peralatan dan kapal yang memadai dan modern, maka sulit bagi nelayan untuk bisa meningkatkan hasil produksinya, dan produktivitas.

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 tetap diarahkan untuk membangun kesiapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menghadapi tantangan, mengatasi permasalahan pembangunan perikanan budidaya dan mendayagunakan potensi sumberdaya lahan budidaya untuk mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi perikanan berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pembudidaya di pedesaan.

Intervensi anggaran diarahkan untuk melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan diimplementasikan kedalam tiga kegiatan yang mengacu pada pengembangan tiga kawasan perikanan budidaya yaitu (1). Pengembangan kawasan budidaya air tawar ; (2). Pengembangan Kawasan budidaya air payau dan : (3). Pengembangan kawasan budidaya air payau.

Dari beberapa program perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, ada tiga program/kegiatan perikanan budidaya yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu (1). Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Laut/Payau dan Operasional UPTD Balai Pengembangan Benih Ikan Laut dan Payau (BPBLP) melalui Penyediaan Benih ikan, bibit rumput laut dan pakan ikan) bagi Pembudidaya kecil, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR); (2). Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan standart CBIB.

Dalam rangka peningkatan kualitas pembudidaya, pemerintah Provinsi telah melakukan pembinaan kelompok pembudidaya, sampai dengan tahun 2016 sebanyak 313 kelompok pembudidaya yang telah tersertifikasi di Provinsi Gorontalo. Disamping itu dengan melaksanakan program PUMP perikanan budidaya, yang bertujuan untuk Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya yaitu terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri.

Disamping kegiatan tersebut, pemerintah provinsi juga mendesain Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT) yang merupakan Program Inovasi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat khususnya masyarakat nelayan pesisir. Program PDNT ini merupakan salah satu program yang sangat penting, untuk tahun 2016 Program PDNT mencakup 16 desa. Pada pelaksanaan program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo selain memberikan dan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana produksi perikanan berupa (mesin tempel, mesin katinting, perahu, alat tangkap, cool box dan peralatan perikanan lainnya) juga mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Waserda (warung serba ada) bagi kelompok perempuan pesisir yang merupakan istri-istri para nelayan. Kegiatan ini juga mengakomodir bahwa program perikanan dan kelautan juga diharapkan berbasis pada pemenuhan kebutuhan gender. Pada tahun 2016 realisasi cakupan bina kelompok mencapai 680 kelompok meningkat sebesar 120,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar 565 kelompok.

Selain Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh), Pemerintah Provinsi Gorontalo pada program kelautan dan pesisir juga mengalokasikan anggaran pada kegiatan program usaha garam rakyat (PUGAR) yang berlokasi di kec, Wonggarasi Kab. Pohuwato.

b. Sektor Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan pada tahun 2016 dilakukan dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk mengurangi isu pemanasan global seluas dengan metode areal model usaha tani melalui pemberdayaan masyarakat dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan sebanyak 40.000 bibit yang disalurkan kepada masyarakat umum dan kelompok tani secara gratis. Sedangkan untuk menjaga kelestarian kondisi hutan dilakukan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melakukan pembinaan dan pemantapan hutan tanaman rakyat (HTR) kepada 2 kelompok HTR atau seluas 40 Ha HTR.

Dari kebijakan pemerintah sector kehutanan, luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ditangani tahun 2016 sebesar 39.112 Ha, melampaui target sebesar 16.200 Ha. Sementara produksi hasil hutan terdiri dari kayu bulat dengan nilai produksi pada tahun 2016 mencapai 93.293,61 M³ meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 57.750 M³, sedangkan untuk kayu gergajian produksi di tahun 2016 mencapai 39.558,96 M³ lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 17.850 M³, dan produksi non kayu tahun 2016 sebesar 15.973 M³.

c. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan.

Dalam rangka upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetap dilakukan pengembangan koperasi dan UMKM yang pada tahun 2016 dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan strategis dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi baik kepada koperasi aktif maupun tidak aktif, juga terhadap kelompok masyarakat atau badan usaha yang hendak membentuk koperasi baru dan pembentukan koperasi. Dari upaya tersebut, maka tahun 2016 persentase pencapaian kinerja pembentukan koperasi berkualitas, mandiri dan berprestasi sebesar 100% yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 unit koperasi, dan koperasi yang berkualitas sebanyak 20 koperasi, yang tersebar di 6 kabupaten/kota, jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 1.209 unit koperasi dari yang ditargetkan 1.105 koperasi.

Sejalan dengan itu, pembangunan koperasi di Gorontalo perlu diberengi dengan upaya dan kerja keras semua pihak terkait, utamanya dalam rangka merevitalisasi kembali koperasi yang sudah tidak beroperasi, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 551 koperasi tidak aktif, atau 45,57% dari total jumlah koperasi di Gorontalo, sebagaimana ditunjukkan data berikut ini.

Tabel 2.19
Data Keragaan Koperasi per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Gorontalo tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota			Tenaga Kerja		
	Aktif	Tidak Aktif	Total	L	P	Total	L	P	Total
Kota Gorontalo	159	134	293	18.628	18.579	37.207	404	222	626
Kab. Gorontalo	190	205	395	23.236	16.429	39.665	736	415	1.151
Kab. Boalemo	81	61	142	11.050	6.392	17.442	192	89	281
Kab. Pohuwato	87	36	123	6.563	3.916	10.479	33	38	71
Kab. Bone Bolango	77	56	133	11.943	4.918	16.861	323	108	340
Kab. Gorut	59	51	110	5.259	4.936	10.195	93	63	156
Prov Gorontalo	27	13	40	2.134	720	2.854	187	25	212

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan fasilitasi permodalan kepada masyarakat baik melalui KUR maupun skim kredit lainnya dengan total realisasi KUR sebesar Rp. 488.562.753.800,00, juga dilakukan pemberian modal dari pemerintah. Kemudian disediakan juga informasi pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional, sehingga di tahun 2016 melalui upaya tersebut jumlah UMKM meningkat menjadi 98.054 UMKM dari target yang ditetapkan sebesar 68.829 UMKM. Sementara jumlah KUKM yang mengakses Kredit Usaha Rakyat yang dikelola Pemerintah Provinsi sebanyak 82.879 KUKM.

d. Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk pengembangan perdagangan di tahun 2016 masih telah dilakukan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan ekspor,

melakukan upaya efisiensi perdagangan dalam negeri dan melakukan upaya dalam meningkatkan standarisasi mutu barang. Sehingga dari upaya tersebut di tahun 2016 beberapa hasil pencapaiannya dapat ditunjukkan dari perkembangan ekspor menjadi 148.520,19 ton di tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 144.291 ton, namun untuk perdagangan antar pulau ditahun 2016 mengalami pelemahan menjadi sebesar 120.118 ton dari capaian tahun 2015 yang mencapai 620.902 ton. Selain itu untuk menjamin kualitas komoditi yang akan diperdagangkan dilakukan pengujian komoditi oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang mencapai 380 kali pengujian serta penerbitan sertifikat mutu sebanyak 62 sertifikat.

Dalam meningkatkan distribusi Barang/Jasa di tahun 2016 telah dilakukan revitalisasi pasar sebanyak 3 unit pasar tradisional. Disamping itu dari sisi pelayanan Pemerintah provinsi di tahun 2016 juga membantu penanganan kasus pengaduan konsumen, yang diindikasikan dengan pemberkasan dan penanganan kasus pengaduan konsumen terhadap seluruh kasus yang diajukan. Kemudian dilaksanakan tera dan tera ulang alat Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) sebanyak 2.810 UTTP. Dalam rangka perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan dilaksanakan Pasar Tertib Ukur, yang diindikasikan dengan tercapainya 5 Pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo, sehingga total pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo berjumlah 20 Pasar.

Untuk mengembangkan sektor perindustrian pada tahun 2016 dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah diupayakan melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, fasilitasi wirausaha baru IKM, disamping itu pengembangan kompetensi inti One Village One Product (OVOP) dan kluster industri juga dilakukan dalam meningkatkan produktivitas produk IKM. Dari upaya yang dilakukan tersebut telah meningkatkan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) menjadi sebanyak 14.339 unit di tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah IKM ditahun 2015 yang hanya 14.084 unit dan jumlah sentra IKM sebanyak 297 ditahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan IKM Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016

No	Uraian	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah IKM(Unit)	12.360	12.921	13.688	14.084	14.339
	-Industri Mikro Kecil	11.909	12.470	13.237	13.633	12.924
	- Industri Kecil	436	436	436	436	1.331
	-Industri Menengah	15	15	15	15	82
2	Jumlah Tenaga Kerja (Org)	31.910	34.564	36.978	36.817	35.620
3	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	132,94	134,14	150,23	180,74	187,52
4	Nilai Produksi (Milyar Rupiah)	510,02	476,00	530,84	548,31	538,44

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

Sementara untuk realisasi penciptaan WUB diperoleh persentasi capaian indikator sasaran sebesar 0%, yang dihasilkan dari target penciptaan WUB sebanyak 1.000 UMKM. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja hasil tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari APBD, dimana pada pasal 6 ayat (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk Koperasi dan UMKM tidak dapat lagi diberikan lagi Hibah dan Bansos.

e. Pariwisata dan Budaya

Dilihat dari segi potensi pariwisata, Provinsi Gorontalo memiliki banyak potensi wisata yang beragam yang tersebar di seluruh wilayah dimana potensi tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Namun demikian sector pariwisata perlu dikembangkan, dan dikelola secara terpadu dan menyeluruh. Sector pariwisata telah berkontribusi terhadap peningkatan PDRB Provinsi Gorontalo, namun keunggulan kompetitif ini hingga saat ini belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat di lokasi obyek wisata tersebut.

Dalam penyelenggaraan urusan pariwisata di tahun 2016 dari 8 obyek wisata unggulan Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 telah dikembangkan pada 3 obyek wisata unggulan yaitu 3 (tiga) obyek wisata yakni Olele, Botutonuo, dan Monano serta DED Obyek Wisata Lombongo dan pada tahun 2017 akan dikembangkan pada 4 Obyek Wisata yaitu Obyek Wisata Hiu Paus Botubarani di Kab. Bone Bolango, Obyek Wisata Pentadio Resort di Kab. Gorontalo, Obyek Wisata Iluta di Kab. Gorontalo dan Obyek Wisata Religi Bongo di Kab. Gorontalo

Dalam pengembangan sector pariwisata dapat dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat. Pola pengembangan ini kemudian dikenal dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT). Adapun definisi CBT adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (*local way of life*). CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal.

Dari upaya - upaya tersebut diperoleh capaian dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Gorontalo sebanyak 370.000 wisatawan di tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 368.000 wisatawan, Sedangkan realisasi lama tinggal rata-rata wisatawan sebanyak 4 hari (data dari Kab/Kota)

telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini mengalami peningkatan jumlah kunjungan dari target yang direncanakan sebagai implikasi dari adanya penyediaan dan pembenahan pada beberapa obyek wisata unggulan seperti Obyek wisata Olele, Botutonuo, Monano, Obyek Wisata Bahari Kota Gorontalo. Di tahun 2017 diperkirakan juga akan melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 120.000 wisatawan (2500 wisman dan 117.500 wisnus)

Disamping itu kegiatan budaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata telah teralisasi sebanyak 8 (delapan) kegiatan dari 5 (lima) kegiatan yang telah ditargetkan. Kegiatan tersebut yaitu Festival Karnaval Khatulistiwa, Festival tumbilotohe, Pemilihan Nou dan Uti, Bugar Wisata, Festival Beduk, Semarak Ketupat, Karapan Sapi dan Festival Tulude.

f. Pertambangan

Potensi pertambangan di provinsi Gorontalo cukup tinggi, baik itu komoditas logam maupun batuan dan non logam yang tersebar hampir di semua wilayah Gorontalo. Potensi komoditas logam terdiri dari emas yang tereka sebesar 218.133.132.151,07 ton yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi perak tereka sebesar 217.463.591.225,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi tembaga tereka sebesar 217.976.091.224,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Kemudian untuk potensi pertambangan dengan komoditi batuan dan non logam terdiri atas batuan andesit sebesar 2.506.000.000 ton, granit sebesar 888.500.000 ton, Dasit sebesar 1.776.125.000 ton, Basal sebesar 1.000.000.000 ton, batu gamping sebesar 19.948.748.500 ton, felspar sebesar 2.500.000 ton, lempung 750.000.000 ton, pasir batu & sirtu sebesar 282.250.000 ton, marmer 18.869,96 ton dan toseki sebesar 51.247.568,62 ton. Dari potensi yang ada tersebut, maka di tahun 2016 dalam rangka peningkatan pengamanan dan perlindungan terhadap sumberdaya hutan, sumberdaya mineral dan energi; peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, mineral dan energi serta memantapkan dan melindungi keberadaan kawasan hutan dan areal pertambangan di Provinsi Gorontalo dilakukan survey pendahuluan potensi calon lokasi wilayah pertambangan rakyat. Dari kebijakan dimaksud, diperoleh Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina mencapai 35,53 di tahun 2016, capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2015 sebesar 31,76 persen.

2.1.4.2. Infrastruktur Wilayah

a. Infrastruktur Transportasi

Dalam bidang transportasi pembangunan dilakukan melalui pengelolaan Jalan Provinsi hingga tahun 2016 sepanjang 432,51 km. Pada tahun 2016 untuk menjaga



kemantapan jalan dan jembatan telah dilakukan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi sepanjang 3,29 Km. Panjang jalan provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 18,52 kilometer, sedangkan panjang jalan strategis provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 16,54 kilometer. Disamping itu pembangunan jembatan diruas jalan strategis Provinsi sebanyak 1 (satu) buah. Sehingga diperoleh kondisi kemantapan jalan Provinsi sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 41,15%, sementara untuk kondisi kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo sebesar 86,48%.

Dari pengembangan tersebut, hingga tahun 2016 kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 209,00 Km, kondisi sedang 15,80 Km, kondisi rusak ringan 24,43 Km, kondisi rusak berat 73,33 Km, dan jalan yang belum tembus/terbuka masih sepanjang 109,95 Km, kondisi tersebut meningkat dibanding tahun 2015 dimana kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 196,57 Km, kondisi sedang 21,05 Km, kondisi rusak ringan 27,43 Km, kondisi rusak berat 77,51 Km.

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi melalui dinas Perhubungan untuk tahun 2016 ditingkatkan pelayanan angkutan darat perintis melalui 4 lintasan perintis (Gorontalo-Pangea, Gorontalo-Mohiyolo, Terminal Isimu Mulyonegoro-Satria, Gorontalo-Pancakarsa) serta pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ pada tahun 2016 sebanyak 2 ruas jalan, APILL 4 unit.

Provinsi Gorontalo memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan anggrek yang di khususkan untuk melayani barang secara cargo dan peti kemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, serta pelabuhan kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan Toli-Toli Sulawesi Tengah. Sedangkan dipesisir selatan terdapat pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di daerah kawasan Teluk Tomini. Kelima pelabuhan tersebut terus dilakukan upaya pengembangannya baik melalui APBN maupun APBD. Capaian peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo tahun 2016 telah mencapai rata - rata 4.419 ton/hari mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 5.076 ton/hari, melebihi target RPJMD sebesar 2.900 ton/hari. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan produktifitas pada seluruh Pelabuhan di Provinsi Gorontalo (Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tilamuta dan Pelabuhan Bumbulan), seperti di Pelabuhan Tilamuta dimana kapal pengangkut semen sudah bisa bersandar di pelabuhan tersebut sehingga terjadi peningkatan produktifitas yang cukup signifikan pada pelabuhan tersebut. Untuk Pelabuhan Anggrek, masih banyak kapal yang antrian sehingga dibutuhkan penambahan dermaga serta

penambahan sarana penunjang seperti peralatan bongkar muat. Untuk kapasitas layanan kapal di pelabuhan sudah mencapai 12.000 DWT.

Pengembangan transportasi udara di Provinsi Gorontalo terus diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana bandar udara Djalaluddin, dimana pada tahun 2016 Bandara Djalaludin dengan status bandara Nasional kelas II C dengan luas 11.865 m² telah diresmikan dan mulai beroperasi, kapasitas landasan dapat didarati Boeing 737, Run Way panjang 2.500 m x 45 m, Taxiway 2 buah ukuran 115 m x 23 m, Apron ukuran 231,5 m x 80 m untuk kapasitas parkir 2 (dua) buah pesawat. Sementara untuk pengembangan selanjutnya adalah Perluasan Runway Bandara Djalaluddin Gorontalo dan Pembangunan Bandara Pohnato.

b. Sumberdaya Air dan Irigasi

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi serta jaringan lainnya, maka hingga tahun 2016 diprioritaskan pada 7 Daerah Irigasi yang bersumber dari APBD yang terdiri dari Rehabilitasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Bulia, Huludupitango, Tolinggula, Tabulo/Latula, Taluduyunu, Pilohayanga, dan Irigasi Bongo.

Pada tahun 2016 dilakukan rehabilitasi dan peningkatan luas areal jaringan irigasi pertanian sepanjang 11.792 meter, dan juga dilakukan operasi dan pemeliharaan areal jaringan irigasi pertanian sepanjang 17.131 Ha.

Untuk menjaga dampak erosi, longsor dan sedimentasi yang akan masuk ke areal pertanian, persawahan dan pemukiman dilakukan pembangunan tebing - tebing di badan sungai sepanjang 426,6 Meter. Juga dibangun tanggul pengaman pantai bagi pemukiman masyarakat pesisir sepanjang 405 Meter. Pembangunan Penahan tebing sungai tersebut dilakukan pada 24 lokasi masing-masing pada Sungai Taluduyun, Padengo, Bone, Mohiyolo, Luwohu, Timbuolo, Juria, Molotabu, Wapo, Panca Karsa, Boliyohuto, Bakti, Alo, Tilamuta, Pentadu, Keramat, Telaga Biru, Botutonuo, Bolihutuo (2 paket), Leboto, Bone-padebuolo, Dembe, Bongopini; Normalisasi Sungai pada 4 lokasi yaitu Sungai Menggelomo, Lonuo, Latula dan serdadu dan Galian endapan lanjutan pada cekdam Buliide; sedangkan Untuk pengaman abrasi pantai diprioritaskan pada 3 kawasan (Pantai Selatan bagian Timur, Tengah dan Barat) yaitu Pengaman Abrasi Pantai Desa Taludaa, Pelita Jaya, Molamahu, Leato, Bilato dan Tutulo.

c. Pemukiman

Dalam urusan pemukiman Pemerintah Provinsi telah melakukan penanganan kawasan pemukiman melalui pembangunan jalan lingkungan di kawasan RSH, kawasan pemukiman kumuh nelayan, kawasan kumuh perkotaan yang telah mencapai lebih kurang 30.822 meter. Juga telah di bangun jalan pada kawasan agropolitan dan jalan pada Desa-Desa potensial sepanjang 19,64 km, diatas target

yang ditetapkan sepanjang 17 Km, serta penyediaan air bersih dan sanitasi untuk pencapaian target MDGs. Untuk tahun 2015 telah dilakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak kurang lebih 711 unit Mahyani dan tahun 2016 sebanyak 861 unit dari target yang ditetapkan 1.000 unit yang tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. Disamping itu untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat desa, maka Pemerintah Provinsi membangun infrastruktur dasar untuk 59 desa tertinggal. Dari upaya yang dilakukan tersebut, capaian indikator dalam mewujudkan desa maju dan mandiri dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 3 desa dan 3 kelurahan.

d. Persampahan dan Sanitasi

Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dilakukan dengan pembangunan pengelolaan persampahan secara terpadu. Disamping itu juga telah dibangun tempat pembuangan akhir (TPA) Talumelito yang diperuntukkan untuk melayani 2 (dua) wilayah yaitu kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dengan kapasitas tampung kurang lebih 355.670 m³. TPA tersebut telah beroperasi dengan sistem sanitasi landfill dan juga berfungsi sebagai Kawasan Industri Pengelolaan Sampah (KIPS). Sampai saat ini di Provinsi Gorontalo telah dibangun beberapa TPA dengan sistem *sanitari landfill* yang konstruksinya dibiayai oleh dana APBN, sedangkan pembebasan lahan dan fasilitas pelengkap lainnya dibiayai oleh APBD kabupaten.

Adapun kebutuhan untuk layanan daya tampung TPA 5 (lima) tahun kedepan adalah + 4.745.000 m³, sehingga masih dibutuhkan pembangunan TPA yang ramah lingkungan + 4.089.849 m³. Berdasarkan kemampuan daya tampung TPA tersebut maka dibutuhkan pembangunan baru di Kab. Bone Bolango serta pengembangan sarana prasarana TPA yang ada saat ini. Khusus TPA Talumelito diperlukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pada tahun 2016 dilaksanakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman sebanyak 55 unit yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Program PPSP dimaksudkan sebagai program pembangunan sanitasi menyeluruh yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, dimana pembangunan dan pengelolaan sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah diseluruh tingkatan masyarakat.

e. Air Minum dan Air Bersih

Tahun 2016 Jumlah Sambungan rumah (SR) yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan sebesar 3.250 jiwa. Untuk itu realisasi s/d tahun 2016 (2012-2016) sebesar 21.428 Jiwa dari target 108.090 jiwa, serta bangunan

penyediaan sanitasi yang terbangun tahun 2016 sebanyak 55 unit, sehingga total sampai dengan tahun 2016 sebesar 348 Unit dari target renstra 546 Unit.

Di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2016, pencapaian target air minum baru mencapai 69,56 persen dan untuk sanitasi layak tahun 2015 cakupan yang terlayani baru mencapai 56,27 persen.

f. Sumber Daya Energi

Hingga tahun 2016 sistem jaringan energi listrik di Provinsi Gorontalo terdiri dari 10 (sepuluh) PLTD, 1 (satu) PLTM dan 2 (dua) PLTU masing-masing PLTU Molotabu dan PLTU Anggrek 2 x 25 Watt yang masih dalam proses pembangunan serta ketambahan 1 (satu) PLTG yang berlokasi di Paguat. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energy dan pengembangan ketenagalistrikan, maka di tahun 2016 dilakukan pengembangan energy terbarukan terhadap 20 unit PLTS, pemeliharaan 1 unit PLTMH dan menggalakkan program "Listrik Pintar" bekerjasama dengan PLN yang melakukan penyambungan listrik untuk rumah ibadah tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo dan pada tahun 2016 juga dilakukan sambungan baru listrik untuk rumah tangga miskin sebanyak 500 RTM. Dari upaya yang dilakukan tersebut capaian peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 78,16 persen ditahun 2016 meningkat dari tahun 2015 sebesar 77,48 persen. Dan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas kehutanan dan pertambangan melakukan fasilitasi demi terselenggaranya konversi minyak tanah ke elpiji dan melakukan pengawasan distribusi BBM dan elpiji di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

Selain itu, Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air \pm 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan yang baru termanfaatkan adalah potensi energi air sebesar 3,5 MW, sedangkan Potensi panas bumi Suwawa 110 MW telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dengan SK Menteri ESDM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang. Potensi panas bumi pentadio dengan temperature 70°C telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri ESDM. Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperature 50° C, Kecamatan Botumoito dengan temperature 42° C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperature 62° C dan Kecamatan Kwandang dengan temperatur 65° C. Dengan total sumberdaya diperkirakan sebesar 160° (MWe).



g. Penataan Ruang

Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang efektif dan efisien sejak tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 04 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo tahun 2010 - 2030 dan untuk tahun 2016 dilakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.

h. Pemerintahan Umum

Dalam urusan pemerintahan umum, beberapa capaian yang telah dilakukan hingga tahun 2016 adalah :

- a. Dalam rangka pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dilakukan dengan pemberian bantuan tugas belajar S-2 dan PNS provinsi, bantuan akhir studi, perbaikan sistem promosi dan analisa jabatan, penyelenggaraan diklat formal dan non formal, penataan sistem administrasi kepegawaian secara elektronik dan penerapan SIMPEG. Hingga tahun 2015 Pemerintah provinsi dapat menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat PIM IV dan Diklat PIM III yang terakreditasi masing - masing "B" untuk Prajabatan, "B" untuk diklat PIM IV dan "B" untuk diklat PIM III, juga mendiklatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-A) pada diklat LEMHANNAS sebanyak 5 orang, Diklat PIM I sebanyak 1 orang, Diklatpim II sebanyak 4 Orang, 32 Peserta Diklat PIM III dan 40 Peserta Diklat PIM IV. Disamping itu dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka tahun 2016 dilaksanakan penilaian dan penghargaan terhadap PNS Teladan dan berprestasi yang diseleksi sebanyak 105 pegawai. Sementara itu pemberian bantuan studi Belajar kepada 38 pegawai yang melanjutkan studi.
- b. Peningkatan kesejahteraan aparatur, dilakukan dengan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dengan azas berkeadilan yaitu adanya perubahan metode perhitungan TKD berdasarkan beban kerja, dimana tahun 2016 telah diterapkan metode perhitungan beban kerja dan disiplin melalui aplikasi Sistem Informasi Pengukuran Kinerja (Siransija), yang dijadikan dasar dalam penilaian tunjangan kinerja daerah. Pemberian tunjangan kinerja daerah dimaksudkan untuk untuk mendorong spirit dan motivasinya dalam meningkatkan kinerja, yang berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan aparatur.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur. Pada obyek ini disediakan prasarana penunjang kegiatan perkantoran, pemberian Kendaraan Dinas Operasional (KDO) bagi pejabat eselon III serta pembangunan gedung kantor pemerintah daerah di lokasi blok plan perkantoran yang terletak di desa ayula kabupaten bone bolango yang tahun 2016 ini sudah terbangun 8 gedung dan telah digunakan.



- d. Reformasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan melalui implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis IPM, pelaksanaan kualitas Musrenbangda dengan melakukan revitalisasi mekanisme pelaksanaannya, evaluasi kecamatan IPM dibawah rata-rata Provinsi, mengadvokasi pengembangan dan penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gorontalo, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. Atas kinerja tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2016 memperoleh penghargaan berupa penganugerahan Pangripta Nusantara kategori Perencanaan Progresif, selain itu dari pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan seluruh Kabupaten kota yang ada memperoleh penghargaan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2016.
- e. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan membuka komunikasi dengan masyarakat melalui media elektronik dan cetak. Keterbukaan informasi juga dilakukan dengan penyebarluasan pelaksanaan program dan kegiatan yang disebarluaskan melalui media local. Disamping itu Radio Rakyat Hulondhalo bentukan Pemerintah Provinsi menjadi wadah dalam menjaring aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat.
- f. Pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan penguatan kapasitas SDM dilaksanakan Bimtek Penguatan Kapabilitas APIP Kab/Kota dalam rangka reuiu RKA SKPD, laporan hasil evaluasi lakip SKPD, laporan hasil pemeriksaan dana hibah dan bantuan sosial. Sementara itu di tahun 2016 telah dilakukan penguatan kapasitas SDM pengawas dan pemeriksa bagi Auditor sebanyak 10 Orang dan aparat pengawas yang kompeten dalam pelaksanaan teknis pemeriksaan berjumlah 16 orang, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD secara berkala, penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah sebanyak 46 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, peningkatan koordinasi pengawasan ditingkat Provinsi, Regional dan Nasional, identifikasi dini jenis pelanggaran dan tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (SOP).
Sebagai wujud keseriusan Pemerintah terhadap kasus korupsi, maka tahun 2016 dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo.
- g. Pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta

E-Report. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan aset diupayakan melalui penerapan aplikasi SIMDA.

Berbagai upaya penerapan teknologi informasi disegala bidang mulai digagas pemerintah Provinsi Gorontalo, mulai dari e-Monev (*electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan*), aplikasi SIMDA, e-Data, e-Monev, e-Protrack dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik, serta penerapan Siransija untuk pengukuran prestasi kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- h. Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, di tahun 2016 Sekretariat DPRD dalam hal memfasilitasi Legislatif telah menyelesaikan 12 (dua belas) buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah.
- i. Keberhasilan dan penghargaan ditingkat Nasional yang diperoleh pada tahun 2015-2016 adalah :
 1. Penghargaan dalam pengelolaan keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI;
 2. Terbaik I Nasional dari Menkopolhukam dalam bidang Keamanan;
 3. Terbaik I Nasional dari UKP4 tentang Pengelolaan dan Penyerapan Keuangan;
 4. Penghargaan kategori Award Akselerasi Penerapan e-Procurement dari LKPP
 5. Penghargaan Kesatria Bakti Husada pada acara puncak Hari Kesehatan Nasional
 6. Penghargaan Pangripta Nusantara 2016 Kategori Perencanaan Progresif
 7. Terbaik II Pemenang Penghargaan Pencapaian Indikator MDGs Terbaik Tahun 2013-2015
 8. Terbaik III Pemenang Penghargaan Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2013-2015

2.1.4.3. Investasi

Realisasi investasi di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah nilai investasi berskala nasional dan international terus meningkat, dimana pada tahun 2016 mencapai 4.145 Trilyun meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 4,112 trilyun. Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN telah mencapai 50 PMA/PMDN dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 12.234. Berbagai capaian tersebut tidak lepas dari semakin meningkatnya iklim investasi yang kondusif disertai dengan peningkatan penanganan permasalahan yang dihadapi PMA/PMDN, dan penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk penanaman modal dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan SIPD serta penyelenggaraan promosi dan peningkatan kerjasama investasi.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2016 Secara umum, komposisi umur penduduk Provinsi Gorontalo adalah 29,17 persen penduduk usia muda (0-14 tahun), 59,18 persen usia produktif 15-64 tahun dan 3,95 persen penduduk usia tua (65 tahun lebih). Dengan demikian, angka ketergantungan yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 55,97 persen yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo menanggung sekitar 56 orang penduduk usia belum/tidak produktif.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif, untuk itu pada tahun 2016 melalui kegiatan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta tanpa secara langsung mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan keterampilan bagi para pencari kerja dengan tingkat pendidikan rendah terutama dikecamatan dengan IPM rendah.

2.1.5 Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Hasil capaian kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari Indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 2.21
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016
Misi Pertama, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat			
1.	Pertumbuhan Ekonomi %	7,8 – 8,3	6,52
2.	IPM	73,26	65,86 (2015)
3.	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	12.509.103	27.654.340,21
4.	Indeks Gini	0,36	0,30
5.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.)	4,069 Trilyun	4.145 Trilyun
6.	Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang dibangun & yang ditingkatkan	10 Km	18,52 Km
7.	Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Strategis provinsi	2 Buah	1 Bh
8.	Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan	5 Km	16,53 Km
9.	Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang	17.131 Ha	17.131 Ha



No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016
	dipelihara (Operasi & Pemeliharaan)		
10.	Ratio Elektrifikasi	77,75%	78,16%
Misi Kedua, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.			
1.	Angka Melek Huruf	97,00%	99,81%
2.	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar)	8,93	9,00
3.	Angka Kematian Ibu/100.000	102,0	301,7
4.	Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup	12,8	15,0
7.	Angka usia harapan hidup	68,6	68,6
8.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,75	2,76
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,75%	67,89%
Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat.			
1.	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	87	72,09
2.	Meningkatnya nilai tukar petani (NTP)		
	- Subsektor tanaman pangan	91,91	111,15
	- Subsektor Hortikultura	110,45	112,50
3.	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	108,41	102,65
4.	Nilai Tukar Petani Kebun	128,05	98,29
5.	Jumlah Populasi Ternak Besar (sapi/Ekor)	223.704	207.969
6.	Jumlah Konsumsi Daging (Sapi)(kg/kapita/th)	3,7	2,2
Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan.			
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	59,72	-
2.	Indeks Pembangunan Gender	67,02	-
Misi Kelima, Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.			
1.	Persentase penduduk miskin (%)	14,5 - 12	17,63
2.	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, maka kebijakan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dan mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran serta pemerataan distribusi pendapatan.

Untuk melaksanakan strategi pembangunan melalui langkah-langkah strategis di atas tentunya perlu didasari oleh pemahaman yang komprehensif berkenaan dengan kondisi ekonomi makro daerah dan trend perkembangannya yang tentunya menjadi dasar untuk dilakukan perkiraan/proyeksi perkembangan ekonomi di tahun 2018.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Perekonomian Gorontalo tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 31.823,65 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp.27,65 juta atau US\$2.078,33.

Ekonomi Gorontalo tahun 2016 tumbuh 6,52 persen lebih cepat dibanding tahun 2015 yang sebesar 6,22 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,45 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,35 persen. Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan IV-2015 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 7,02 persen, lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,65 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2016 mengalami kontraksi 3,36 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 12,26 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen Ekspor.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertanian, kehutanan dan Perikanan (37,44 persen); Konstruksi (12,00 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,95 persen) masih mendominasi PDRB Gorontalo.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2016, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,34 persen, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,02 persen; dan kategori Jasa Keuangan sebesar 0,68 persen.



Tabel 3.1
Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 & 2016 (Tahun Dasar 2010)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		Triw IV-2015	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw IV-2015	Triw III-2016	Triw IV-2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.516,05	3.307,87	2.910,05	1.848,49	2.362,01	2.072,43
B	Pertambangan dan Penggalian	98,17	95,52	102,13	77,08	73,41	78,37
C	Industri Pengolahan	313,21	340,45	337,40	225,17	238,42	236,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,85	3,66	3,84	3,93	4,82	5,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,82	4,48	4,56	2,77	3,17	3,21
F	Konstruksi	990,10	963,59	1.009,38	745,59	716,96	746,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	801,04	903,63	895,93	584,37	642,39	641,07
H	Transportasi dan Pergudangan	472,50	510,09	503,67	340,62	362,61	359,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	170,71	184,34	189,10	125,74	133,91	136,98
J	Informasi dan Komunikasi	191,43	211,47	215,18	166,56	180,38	184,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	282,88	330,40	356,53	212,09	242,24	258,57
L	Real Estate	144,75	155,58	159,35	112,09	116,26	119,12
M,N	Jasa Perusahaan	7,38	7,95	8,02	5,44	5,72	5,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	640,05	596,71	615,09	526,77	483,48	501,86
P	Jasa Pendidikan	322,46	318,99	339,23	253,53	246,76	255,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271,79	289,46	290,99	209,42	219,38	220,21
R,S, T,U	Jasa lainnya	126,82	131,50	132,98	101,09	103,57	104,64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7.356,01	8.355,70	8.073,42	5.540,71	6.135,51	5.929,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2016 (persen)

Lapangan Usaha		Triw III- 2016 Terhadap Triw II-2016	Triw IV-2016 Terhadap Triw III-2016	Triw IV-2016 Terhadap Triw IV-2015
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-12,26	12,12	6,43
B	Pertambangan dan Penggalian	6,76	1,67	0,08
C	Industri Pengolahan	-0,63	5,22	6,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,28	27,82	12,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,20	16,12	14,92
F	Konstruksi	4,16	0,16	5,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,21	9,70	9,91
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,97	5,43	6,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	8,94	8,71
J	Informasi dan Komunikasi	2,33	10,82	10,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,74	21,91	18,45
L	Real Estate	2,46	6,29	8,31
M,N	Jasa Perusahaan	0,74	5,96	5,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,80	-4,73	-0,09
P	Jasa Pendidikan	3,34	0,58	3,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	5,15	8,48
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,03	3,51	3,54
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-3,36	7,02	6,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo



Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau *percapita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.3 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel 3.3
PDRB Perkapita Gorontalo Tahun Dasar 2010
Tahun 2015 - 2016

PDRB Perkapita	2015	2016
Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)	25.181.098,75	27.654.340,21

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo

Inflasi, Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2016 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Gorontalo, perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2016 secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga terutama pada kelompok bahan makanan. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 121,21 pada bulan November 2016 menjadi 121,78 pada bulan Desember 2016 menyebabkan inflasi sebesar 0,47 persen. Laju inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,30 persen dan inflasi "year on year" (Desember 2016 terhadap Desember 2015) sebesar 1,30 persen.

Inflasi Kota Gorontalo menjadi barometer inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks/inflasi pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,17 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,11 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,31 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,17 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,06 persen dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,45 persen. Kelompok yang mengalami penurunan indeks/deflasi yaitu kelompok sandang sebesar -0,11 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami **kenaikan harga** selama bulan Desember 2016 antara lain: mie kering instant, daging ayam kampung, daging ayam ras, daging sapi, bandeng/bolu, baronang, bubara, cakalang/sisik, cumi-cumi, deho,



kakap merah, kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso, udang basah, galafea, ikan asin belah, teri, susu bubuk, susu untuk balita, susu untuk bayi, telur ayam kampung, telur ayam ras, kangkung, kentang, ketimun, tomat sayur, wortel, kacang tanah, jeruk, pisang, bawang merah, bawang putih, kecap (isi), kemiri, cabai rawit, jahe, kunyit, kembang gula, teh, rokok kretek, rokok kretek filter, rokok putih, cat tembok, seng, tariff listrik, sabun cair/cuci piring, sabun detergen bubuk, baju kaos berkerah laki-laki, celana dalam pria, kemeja panjang katun laki-laki, celana panjang jeans wanita, baju anak stelan, obat dengan resep, obat flu, shampoo, bimbingan belajar, kertas HVS, sepatu olahraga pria, angkutan udara, bensin dan tariff telepon seluler.

Tabel 3.4
Laju Inflasi Kota Gorontalo Desember 2016, Tahun Kalender 2016 dan Desember 2016 Terhadap Desember 2015 menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)

No	Kelompok / Sub kelompok	IHK Desember	IHK November	IHK Desember	Inflasi Desember '16 (P to P)	Laju Inflasi Thn kalender	Y o Y
		2015	2016	2016	1)	2)	3)
1	2	3	4	5	6	7	8
UMUM		120,22	121,21	121,78	0,47	1,30	1,30
1	Bahan Makanan	125,01	126,50	127,78	1,17	2,38	2,38
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	124,44	128,72	128,86	0,11	3,55	3,55
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	114,86	115,76	116,12	0,31	1,10	1,10
4	Sandang	110,85	113,66	113,53	-0,11	2,42	2,42
5	Kesehatan	115,30	120,49	120,69	0,17	4,67	4,67
6	Pendidikan Rekreasi dan Olahraga	108,10	108,94	109,01	0,06	0,84	0,84
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	126,32	122,62	123,17	0,45	-2,49	-2,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

1) Inflasi Point to Point (P to P) - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks November 2016

2) Laju Inflasi / Inflasi Tahun kalender - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks Desember 2015

3) Inflasi Year on Year (Y on Y) - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks Desember 2015

Beberapa komoditas yang mengalami **penurunan harga** selama bulan Desember 2016 antara lain: tepung terigu, ekor kuning, laying/benggol, malalugis/sohiri, selar/tude, susu kental manis, bayam, daun bawang, kacang panjang, kol putih/kubis, sawi hijau, terong panjang, kacang hijau, alpukat, gula merah, jeruk nipis/limu, lada/merica, cabai merah, minyak goreng, gula pasir, kayu lapis, kompor, mukena, celana pendek, emas perhiasan, obat batuk, vitamin, buku tulis bergaris dan sepatu olah raga anak-anak. Pada bulan Desember 2016 masing-masing kelompok komoditas yang memberikan andil/ sumbangan inflasi adalah sebagai berikut : kelompok bahan makanan sebesar 0,2821 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,0175 persen, kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,0848 persen, kelompok sandang sebesar -0,0056 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,0069 persen, kelompok pendidikan,

rekreasi dan olahraga sebesar 0,0029 persen, dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,0835 persen.

Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau **Gini Ratio** telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Gorontalo yang ditahun tahun 2013 berdasarkan perhitungan BPS berada di angka 0,43 bisa ditekan hingga turun pada angka 0,40 di tahun 2014 dan membaik di tahun 2015 di angka 0,32. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara lapisan penduduk di Gorontalo sudah mulai dapat diminimalisir.

Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dari kemiskinan.

Pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2016 mencapai 2,76 persen (dari angkatan kerja), mengalami penurunan dibandingkan Februari 2016 sebesar 3,88 persen atau TPT Agustus 2015 sebesar 4,65 persen. Sementara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 mencapai 562.196 orang, berkurang 1.206 orang dari keadaan Februari 2016 sebesar 563.402 orang, atau bertambah 44.408 orang dari keadaan Agustus 2015 sebesar 517.788 orang. Uraian jelas mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Penduduk Provinsi Gorontalo Berumur 15 tahun keatas
menurut Jenis kegiatan

Kegiatan Utama	2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Angkatan Kerja	534.012	517.788	563.402	562.196
Bekerja	517.687	493.687	541.549	546.668
Pengangguran	16.325	24.101	21.853	15.528
Bukan Angkatan Kerja	270.619	295.718	257.849	265.935
Sekolah	70.311	78.825	79.484	75.928
Mengurus Rumah Tangga	166.751	185.526	152.535	168.119
Lainnya	33.557	31.367	25.830	21.888
Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas	804.613	813.506	821.251	828.131
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,06	4,65	3,88	2,76
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,37	63,65	68,60	67,89
Pekerja Tidak Penuh	147.329	140.344	139.239	140.242

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Kemiskinan, Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September tahun 2016 sebesar 17,63 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2016 sebesar 17,72 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 0,09 persen. Jumlah penduduk miskin September 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak **203,69** ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2016 sebanyak **203,19** ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2016-September 2016 bertambah sebanyak 500 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk



miskin di perkotaan mencapai 60 jiwa, sedangkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 560 jiwa. Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2016 sebagian besar masih tinggal di perdesaan yaitu sebesar 88,21 persen dan sisanya 11,79 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pada periode Maret 2016-September 2016 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,72 persen menjadi 17,63 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,787 pada September 2016, yang sebelumnya pada Maret 2016 sebesar 4,116. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2016 sebesar Rp284.232 per kapita per bulan dan pada September 2016 menjadi Rp286.968 per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp2.736 per kapita per bulan atau naik sebesar 0,96 persen.

Pada September 2016, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp211.756 dan perdesaan sebesar Rp226.546. Disini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp75.400 dan perdesaan sebesar Rp59.453 maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi. Hal ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2016 sebesar Rp287.156 per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp285.999 per kapita per bulan.



Tabel 3.6
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menurut Daerah
Tahun 2016

Rincian	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2016	209.232	75.076	284.308
September 2016	211.756	75.400	287.156
Perubahan (%)	1,21	0,43	1,00
Perdesaan			
Maret 2016	224.958	59.232	284.190
September 2016	226.546	59.453	285.999
Perubahan (%)	0,71	0,37	0,64
Kota+Desa			
Maret 2016	219.469	64.764	284.232
September 2016	221.772	65.196	286.968
	1,05	0,67	0,96

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Selain indikator kemiskinan dalam bentuk persentase dan jumlah penduduk miskin yang dijadikan sebagai dasar pengukuran kemiskinan, sebenarnya terdapat dimensi lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks.

Periode Maret 2016- September 2016 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,72 persen menjadi 17,63 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,787 pada September 2016, yang sebelumnya pada Maret 2016 sebesar 4,116. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan.

Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Tabel 3.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Indikator	Maret 2016	September 2016	Perubahan (Mar'16-Sept'16)
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4,116	2,787	-1,329
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,466	0,649	-0,816

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2016 masih menunjukkan peningkatan yang baik, tumbuh lebih cepat dibanding tahun 2015 dan masih berada



diatas capaian pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka perkiraan kondisi indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2017 diuraikan dalam tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2017

No	Indikator	Perkiraan capaian tahun 2017
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6.81 - 7.10 %
2.	Inflasi	4 - 7 %
3.	Penduduk miskin	17,1 %
4.	Tingkat pengangguran terbuka	2.7 %
5.	PDRB per kapita ADHB (Rp)	30.128.680

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, (diolah)

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2017 DAN TAHUN 2018

Global, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 2,4 persen dari prakiraan pada bulan Januari, yakni 2,9 persen. Langkah ini diambil akibat melambatnya pertumbuhan di Negara-negara maju , harga komoditas yang tetap rendah, lemahnya perdagangan global dan arus modal yang berkurang.

Menurut laporan terbaru *Global Economic Prospects*, Negara berkembang dan Negara berkembang pengekspor komoditas berupaya keras beradaptasi terhadap jatuhnya harga minyak dan komoditas utama lain, dan ini menjadi penyebab separuh dari revisi pemangkasan. Pertumbuhan di Negara-negara tersebut tahun ini diproyeksikan 0,4 persen, jauh lebih rendah dari proyeksi pada bulan Januari sebesar 1,2 persen.

Pertumbuhan yang lambat ini kembali menegaskan betapa pentingnya bagi Negara untuk menerapkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Pertumbuhan ekonomi adalah motor utama pengurangan kemiskinan. Karena itu kami prihatin ketika pertumbuhan di Negara-negara pengekspor komoditas berkurang akibat tekanan terhadap harga komoditas.

Negara berkembang yang mengimpor komoditas lebih tahan daripada Negara pengekspor, meski keuntungan dari turunnya harga energy dan komoditas lain belum terlalu terasa. Pertumbuhan mereka diproyeksikan sebesar 5,8 persen pada 2016, berkurang sedikit dari angka 5,9 persen pada 2015, seiring dengan rendahnya harga energy dan mulai pulihnya ekonomi Negara-negara maju yang telah mendukung kegiatan ekonomi.

Diantara Negara-negara berkembang yang besar, pertumbuhan Tiongkok diperkirakan berkisar antara 6,7 persen pada 2016 setelah tahun lalu berada di angka 6,9 persen. Ekspansi ekonomi India yang besar diperkirakan akan stabil di angka 7,6 persen. Brazil dan Rusia diproyeksikan berada pada resesi yang lebih



dalam dibanding prakiraan bulan Januari. Afrika Selatan diperkirakan tumbuh sekitar 0,6 persen pada 2016, 0,8 persen lebih lambat dibanding proyeksi pada bulan Januari.

Menurut laporan *Global Economic Prospects*, peningkatan signifikan dalam sector kredit swasta – didorong oleh suku bunga rendah dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan, yang belakangan ini semakin tinggi – ikut mempertajam potensi risiko bagi beberapa Negara berkembang.

Seiring dengan upaya Negara-negara untuk mengatasi tantangan, Negara-negara di Asia Timur dan Tenggara tumbuh solid, seperti halnya Negara-negara berkembang pengimpor komoditas di seluruh dunia. Namun, satu perkembangan yang perlu diantisipasi adalah pesatnya tingkat hutang swasta di beberapa Negara berkembang. Saat tren pinjaman melonjak, tidak mengherankan jika tingkat pinjaman macet, sebagai bagian naiknya pinjaman sebanyak empat kali lipat.

Dalam situasi pertumbuhan yang melamban ini, ekonomi global menghadapi risiko-risiko lebih besar, diantaranya pelambatan lebih lanjut pada negara-negara berkembang, perubahan besar pada sentimen pasar finansial, stagnasi pada negara-negara maju, periode rendahnya harga komoditas yang lebih lama dari perkiraan, risiko geopolitis berbagai negara, dan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan. Laporan ini memperkenalkan cara untuk mengkaji risiko-risiko terhadap proyeksi global dan menemukan bahwa situasinya lebih condong ke penurunan dibanding proyeksi bulan Januari lalu.

Prospek pertumbuhan yang lambat di negara-negara berkembang akan memperlambat, atau bahkan memutar balik kemajuan yang telah dicapai dalam mengejar tingkat pendapatan agar setara dengan negara-negara maju. Namun selama tiga tahun terakhir, beberapa negara berkembang pengimpor komoditas mampu mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan.

Ekonomi Nasional, Perekonomian Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,90 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,87 persen dan Jasa Lainnya sebesar 7,80 persen.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (20,51 persen), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,45 persen), dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil Sepeda Motor (13,19 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,92 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil Sepeda Motor sebesar 0,53 persen dan Konstruksi sebesar 0,51 persen.



Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2016 masih didominasi kelompok Provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,49 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, Pulau Kalimantan 7,85 persen dan Pulau Sulawesi 6,01 persen, dan sisanya 5,59 persen di pulau-pulau lainnya.

Ekonomi Gorontalo, Perekonomian Gorontalo pada triwulan II 2016 tumbuh sebesar 5,40% (yoy) tercatat mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar 6,61% (yoy). Dari sisi penggunaan, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh perlambatan kinerja ekspor yang disebabkan penurunan hasil produksi di sektor pertanian terutama komoditas jagung yang merupakan komoditas utama Gorontalo yang di ekspor ke luar negeri. Selain itu perlambatan pertumbuhan juga disebabkan oleh perlambatan kinerja investasi pada triwulan II 2016 seiring belum optimalnya realisasi belanja modal pemerintah. Disisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan di seluruh komponen konsumsi disebabkan oleh terjaganya daya beli masyarakat akibat peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi swasta nirlaba tercatat tumbuh seiring dengan adanya bulan puasa Ramadhan di bulan Juni 2016. Sedangkan dari sisi penawaran, perlambatan terjadi di sebagian lapangan usaha utama perekonomian Provinsi Gorontalo yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi, lapangan usaha konstruksi juga tumbuh melambat akibat adanya pemotongan anggaran pada dana belanja modal konstruksi pemerintah dan minimnya realisasi belanja investasi pemerintah terhadap proyek-proyek strategis. Disisi lain, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan laporan seiring meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga mendorong peningkatan permintaan masyarakat pada triwulan laporan.

Memasuki triwulan III 2016, perkembangan berbagai indikator terkini mengindikasikan arah pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mengalami perbaikan. Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian seiring dimulainya musim panen di akhir triwulan III 2016 dan realisasi gaji keempatbelas di awal triwulan III 2016 diperkirakan menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatnya kinerja sektor konsumsi rumah tangga dan kinerja lapangan usaha perdagangan seiring adanya perayaan hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Idul Adha) dan dimulainya tahun ajaran baru anak sekolah tahun ajaran 2016, Selanjutnya, percepatan realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal dan belanja barang dan jasa di triwulan III diperkirakan akan meningkatkan kinerja sektor konstruksi seiring dengan telah selesainya proses pengadaan barang dan jasa serta dimulainya pelaksanaan pekerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Gorontalo.



Disamping itu, dengan kondisi dan dinamika nasional yang diyakini makin kuat serta mulai membaiknya perekonomian global beberapa tahun terakhir ini, secara makro pada tahun 2017 - 2018 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di prediksi masih dalam kondisi baik, berdasarkan hal tersebut, maka indikator makro ekonomi Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel. 3.9
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2017 - 2018

Indikator	Proyeksi	
	2017	2018
Pertumbuhan Ekonomi	6.81 - 7.10 %	7.18
Kemiskinan	17,1 %	16,59%
Tingkat Pengangguran Terbuka	2.7 %	3.65
PDRB Perkapita	30.128.680	27.820.514
Inflasi	4 - 7 %	3,80 %

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo (diolah)

Kedepan Provinsi Gorontalo akan fokus pada kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk membuat struktur ekonomi yang kuat agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengupayakan pembangunan yang inklusif agar kesejahteraan lebih merata dan lebih berkeadilan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tercipta terjadi secara berkelanjutan. Penguatan ekonomi tersebut akan diupayakan melalui ***penguatan sektor primer dan mendorong industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah*** sesuai keunggulan wilayah juga ***modernisasi sektor jasa*** yang didukung oleh ketersediaan layanan ***infrastruktur yang memadai***. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan ***penguatan peranan UKM*** yang lebih besar, peningkatan jumlah ***kesempatan kerja***, khususnya ***tenaga kerja produktif (decent jobs)***, dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (***financial inclusion***). Selanjutnya ketahanan ekonomi juga dibangun di samping terus menjaga stabilitas makro juga dengan terus membangun ***ketahanan pangan dan ketahanan air*** serta meningkatkan sector pariwisata dan mendorong masuknya investasi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan atau anggaran daerah didasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan

secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Gorontalo dititik beratkan pada:

1. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo yang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.
2. Kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added).
3. Arah pembiayaan Provinsi Gorontalo diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.2.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah Di Provinsi Gorontalo perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu-waktu mendatang, proporsi dana transfer secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018 adalah dengan terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menghitung potensinya secara sistematis dan rasional yang minimal mendekati angka riil,



disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Gorontalo seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, income perkapita dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menutup kesenjangan fiskal.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping hal tersebut diatas, kebijakan anggaran pendapatan tahun 2018 sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017–2022 adalah "Mendorong Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan Indikator Kinerja yaitu pengelolaan/penatausahaan penerimaan PAD yang akuntabel, tersedianya Perda tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta prosentase peningkatan PAD yang signifikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka, perlu dilihat perkembangan realisasi semester I tahun anggaran 2017 (Tabel 3.10), perkembangan laporan realisasi anggaran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang telah diaudit oleh BPK RI (Tabel 3.11) dan pertumbuhan persentase realisasi pendapatan daerah terhadap target tahun 2012 – 2016 yang dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Pendapatan
Semester I Tahun 2017

No	Uraian	SEMESTER I 2016		% REALISASI	SEMESTER I 2017		% REALISASI
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	PENDAPATAN	1,632,037,855,814.69	862,904,183,273.95	50.71	1,831,692,629,014.00	616,684,026,249.02	44.63
1.1	PAD	349,144,605,814.69	144,431,930,777.95	41.37	368,396,686,000.00	140,401,124,794.02	38.39
1.1.1	Pajak Daerah	319,869,262,401.65	128,848,606,315.00	40.28	326,098,685,000.00	129,217,690,888.00	39.63
1.1.2	Retribusi Daerah	5,000,000,000.00	2,546,150,827.00	50.92	6,000,000,000.00	2,113,381,506.00	35.22
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg dipisahkan	4,000,000,000.00	-	-	4,000,000,000.00	2,772,045,784.00	69.30
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	20,255,343,413.04	13,037,173,835.95	64.36	20,300,000,000.00	6,298,006,816.02	31.02
1.2	Dana Perimbangan	1,292,689,010,000.00	688,294,862,383.00	53.25	1,467,294,144,914.00	667,413,073,004.00	45.49
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak	29,046,717,000.00	14,250,469,383.00	49.09	33,691,177,000.00	19,066,511,604.00	56.59
1.2.2	DAU	834,557,753,000.00	515,992,001,000.00	58.33	1,019,760,418,014.00	485,865,924,000.00	47.64
1.2.3	DAK Fisik	152,985,140,000.00	45,895,542,000.00	30.00	106,209,000,000.00	-	-
1.2.4	DAK Non Fisik	225,999,400,000.00	112,146,850,000.00	-	307,613,548,000.00	162,480,637,400.00	52.82
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	40,304,240,000.00	20,177,390,113.00	50.06	8,000,000,000.00	7,769,827,461.00	97.12
1.3.1	Hibah	500,000,000.00	275,270,113.00	-	500,000,000.00	269,827,451.00	53.97
1.3.2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	39,804,240,000.00	19,902,120,000.00	50.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00
1.3.3	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana penguatan infrastruktur dan prasana daerah	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Dana tambahan penghasilan bagi GURU PNSD	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.7	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-



Tabel 3.11
Perkembangan Realisasi Pendapatan daerah
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	% ±	2014	% ±	2015	% ±	2016	% ±	Rata2 Kenaikan
1	PENDAPATAN	933,169,936,457.83	1,062,866,928,696.13	12.79	1,209,049,489,262.64	14.87	1,389,324,212,789.95	14.91	1,684,307,613,579.81	14.03	14.16
1.1	PAD	180,039,376,122.83	214,614,627,491.13	19.20	281,920,210,038.64	31.36	289,867,161,141.96	2.71	311,233,202,411.81	7.48	16.19
1.1.1	Pajak Daerah	168,068,663,005.00	200,883,464,795.00	19.52	247,137,060,459.00	23.03	260,996,261,660.00	5.61	280,594,563,403.23	7.51	13.92
1.1.2	Retribusi Daerah	88,420,000.00	571,212,007.00	100.00	1,967,050,132.00	244.36	4,072,217,710.00	107.02	6,081,260,233.00	49.34	125.16
1.1.3	Hasil Pengenaan Keuangan Daerah yg dipersihkan				1,946,292,181.00		3,181,275,405.00	100.00	2,101,314,049.00	(33.95)	16.51
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	11,682,293,117.83	13,159,850,679.13	10.75	30,869,897,266.54	134.58	21,307,396,366.95	(30.98)	22,446,074,726.58	5.34	29.92
1.2	Dana Perimbangan	637,007,899,335.00	722,099,498,896.00	15.34	800,313,828,664.00	10.83	934,046,394,549.00	16.71	1,232,492,163,684.00	31.86	18.21
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak	30,858,457,335.00	26,800,697,896.00	(13.15)	23,660,390,654.00	(11.72)	20,766,783,149.00	(12.23)	27,939,248,043.00	34.54	(0.64)
1.2.2	DAU	582,140,302,000.00	652,284,261,000.00	12.05	734,279,438,000.00	12.57	845,395,651,000.00	15.13	884,557,753,000.00	4.63	11.10
1.2.3	DAK Fisik	24,008,330,000.00	43,013,530,000.00	79.16	42,374,060,000.00	(1.49)	67,883,960,000.00	60.20	95,304,533,000.00	40.39	44.57
1.2.4	DAK Non Fisik							224,690,629,651.00			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	116,123,470,000.00	115,842,912,317.00	(0.24)	126,816,460,670.00	9.47	165,720,667,499.00	30.68	40,892,247,474.00	(76.61)	(8.90)
1.3.1	Hibah		453,672,317.00	-	513,944,633.00	100.00	652,487,633.00	26.96	788,007,474.00	20.77	36.93
1.3.2	Dana penyusunan dan olonomi khusus	116,123,470,000.00	115,389,040,000.00	(0.63)	126,301,505,937.00	9.46	165,068,179,866.00	30.69	38,804,240,000.00	(75.89)	(9.09)
1.3.3	Bantuan keuangan dan provinsi atau Pemda Lainnya										
1.3.4	Dana penguatan infrastruktur dan sarana daerah										
1.3.5	Dana tambahan penghasilan bagi GURU PNSD										
1.3.6	Pendapatan dana darurat										
1.3.7	Pendapatan Lainnya										



Tabel 3.12
Pertumbuhan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahun
2012 – 2016

Uraian	2012		%	2013		%	2014		%	2015		%	2016		%	Rata2
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
PENDAPATAN	913.640.971.488,20	933.189.954.457,83	99,47	1.049.794.096.373,20	1.052.565.978.036,13	99,13	1.214.702.778.438,41	1.228.043.443.262,54	99,28	1.471.425.813.577,25	1.383.824.212.789,89	97,80	1.678.042.907.414,43	1.584.307.811.578,81	94,53	97,97
PAD	141.638.366.904,20	140.030.376.122,83	99,18	156.534.471.014,20	214.674.527.801,53	139,76	201.036.554.036,41	204.828.274.820,54	99,28	330.972.267.577,25	289.547.481.141,89	90,49	357.084.282.114,20	311.225.282.411,81	86,99	94,02
Pajak Daerah	150.012.733.985,00	160.058.263.006,00	112,04	183.779.936.351,42	200.883.466.226,00	109,31	249.341.088.515,86	217.137.081.450,00	86,97	298.758.173.653,00	267.088.261.050,00	89,39	319.889.262.411,65	280.594.653.420,23	87,72	94,86
Retribusi Daerah	80.000.000,00	88.420.000,00	89,42	225.000.000,00	571.212.000,00	253,87	1.628.000.000,00	1.967.081.000,00	120,75	3.078.000.000,00	4.092.217.000,00	132,95	6.000.000.000,00	6.081.262.250,00	101,35	144,61
Hasil Pengalihan Kasangan Daerah yg dipisahkan							4.000.000.000,00	1.945.292.181,00	48,66	3.200.000.000,00	3.181.275.455,00	99,41	4.000.000.000,00	2.871.314.048,00	71,78	50,16
Lain-lain PAD yang sah	11.526.862.298,20	11.892.022.117,83	102,69	11.529.475.652,78	13.159.859.029,13	114,14	25.521.084.518,76	30.852.807.266,54	120,84	44.628.468.164,17	21.300.286.269,95	47,73	27.895.342.113,04	22.465.071.078,58	80,19	116,78
Dana Perimbangan	636.378.863.184,00	637.007.659.333,00	100,10	734.255.635.368,00	722.808.438.828,00	98,39	800.445.554.491,00	800.313.828.654,00	99,99	846.448.844.000,00	834.845.104.143,00	98,63	1.277.822.042.000,00	1.251.482.463.000,00	98,45	98,71
Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil lain pajak	30.220.153.314,00	30.858.457.335,00	102,08	28.957.844.359,00	28.800.697.026,00	92,55	23.792.086.401,00	23.692.330.654,00	99,55	31.284.058.000,00	29.786.751.148,00	95,20	29.911.476.000,00	27.208.242.043,00	90,95	93,18
DAU	582.140.822.000,00	582.140.822.000,00	100,00	652.284.261.000,00	652.284.261.000,00	100,00	734.279.438.000,00	734.279.438.000,00	100,00	846.226.651.000,00	846.226.651.000,00	100,00	884.557.753.000,00	884.557.753.000,00	100,00	100,00
DAK	24.000.200.000,00	24.000.200.000,00	100,00	43.013.530.000,00	43.013.530.000,00	100,00	42.374.059.000,00	42.374.059.000,00	100,00	63.789.200.000,00	67.683.980.000,00	97,30	137.653.434.000,00	98.304.553.000,00	68,24	91,53
DAK Non Fisik													225.999.400.000,00	231.680.659.000,00	99,42	
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	174.430.600.000,00	116.123.478.000,00	66,47	174.007.998.000,00	115.842.112.317,00	66,37	137.221.000.000,00	136.815.469.571,00	99,68	165.463.000.000,00	165.720.627.499,00	100,19	41.394.242.000,00	43.852.817.811,00	105,71	99,68
Hilang				350.000.000,00	453.872.317,00	129,68	375.000.000,00	513.944.633,00	137,05	375.000.000,00	652.482.633,00	174,00	500.000.000,00	789.027.474,00	157,60	149,58
Dana penyelesaian dan pemenuhan tugas	121.530.830.000,00	116.123.478.000,00	95,47	120.557.590.000,00	115.306.640.000,00	95,63	126.546.000.000,00	126.304.516.937,00	99,87	150.008.000.000,00	163.659.179.856,00	109,02	39.804.240.000,00	39.804.240.000,00	100,00	98,84
Bantuan keuangan dari provinsi dan Pemda Lainnya																
Dana pengisian indikator dan prestasi daerah																
Dana bantuan pengabdian bagi (GURU) PKSD																
Pendapatan Itra Umum																
Pendapatan Lainnya																

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah jika dilihat dari perkembangan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 naik rata-rata 14,15%, namun jika dilihat berdasarkan realisasi pendapatan terhadap target yang dianggarkan (tabel 4.3), justru belum sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu hanya rata-rata 97,97%. Penurunan realisasi terendah terjadi pada 2015 yang hanya tercapai 97,03% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2016 walaupun lebih tinggi dari tahun 2015 yaitu 97,97% dari target yang ditetapkan namun dari sisi penyalurannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan oleh realisasi dana DAU yang mengalami penundaan dan di transfer pada akhir bulan Desember 2016, sehingga berpengaruh terhadap realisasi belanja daerah. Beberapa penyebab lain terhadap penurunan realisasi pendapatan daerah sebagian berasal komponen PAD yang mengalami penurunan realisasi. Realisasi PAD sebagian



besar berasal dari pajak daerah. penurunan pajak daerah tersebut antara lain dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang menurun dan meningkatnya piutang pajak daerah.

Faktor lain yang cukup memberikan dampak yaitu kondisi perekonomian daerah. Turunnya daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan berbanding lurus dengan menurunnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan baru dan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD.

Belum maksimalnya realisasi pendapatan khususnya dari PAD, dipengaruhi antara lain oleh situasi perekonomian nasional dan daerah, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor, kebijakan pemerintah untuk menerapkan tarif pajak kendaraan bermotor yang berbeda antara kendaraan umum dan kendaraan pribadi, kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi mobil murah, kebijakan uang muka kendaraan bermotor, fluktuasi harga BBM serta beberapa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Provinsi Gorontalo.

Kebijakan perencanaan pendapatan juga disesuaikan dengan regulasi atau ketentuan perundang undangan yang berlaku (terbaru) yaitu Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, dengan beberapa hal penting seperti yang disampaikan dalam sosialisasi Permendagri 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2018 oleh Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.

1. Kebijakan keuangan negara khususnya terkait dengan dana transfer Tahun 2018 (sesuai sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2018) adalah:
 - a. Pengurangan transfer dana ke daerah dan pengelolaan APBD ;
 - b. Pendanaan APBD terhadap pengalihan urusan pemda ke pemerintah pusat yang belum selesai pasca UU Nomor 23 Tahun 2014;
 - c. Struktur Pendapatan dan Belanja APBD serta dana yang di parkir di Bank;
 - d. Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar khususnya menyangkut SPM, Hibah dan Bansos;
 - e. Regulasi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Oleh Bendahara dan Non Bendahara.
2. Isu-isu terkini pengelolaan keuangan daerah:
 - a. Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan pendapatan APBD yang bersumber dari dana BOS dan BOK (Tidak melalui RKUD);
 - c. Kualitas Belanja APBD (Porsi Belanja Pegawai dan Struktur Belanja Daerah);
 - d. Kualitas Penganggaran Belanja APBD (Money Follow Program);
 - e. Penyederhanaan laporan dan surat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD;
 - f. Besaran (pagu) dan realisasi penyaluran DAU per daerah akan mengikuti dinamisasi perkembangan PDN Neto yang akan berimplikasi pada penyesuaian alokasi DAU pada APBN-P dan APBD-P;
 - g. Indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari:



- Ketepatan waktu penetapan perda APBD;
 - Kualitas pendapatan APBD;
 - Kualitas belanja APBD (Postur APBD);
 - Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - Jika PDN Neto naik, Pagu DAU Nasional naik, daerah perlu :
 - a. Identifikasi program/kegiatan urgent dan prioritas yang dapat diselesaikan sd akhir TA;
 - b. Jika tidak ada program/kegiatan urgent dan prioritas, maka tambahan DAU digunakan untuk membentuk Dana cadangan atau dana darurat.
 - Jika PDN neto turun, pagu DAU nasional turun, daerah perlu:
 - a. Membuka ruang fleksibilitas penyesuaian belanja APBD-P dengan identifikasi & efisiensi pos-pos belanja kurang prioritas dan tdk produktif (misal: biaya perjalanan dinas, rapat dinas, konsinyering, honorarium);
 - b. Membuka ruang fleksibilitas kontrak proyek dengan klausul yang relatif fleksibel;
 - c. Memperkuat perencanaan kas (cash flow management).
 - Untuk jangka panjang, daerah perlu:
 - a. Menata kembali jumlah PNSD;
 - b. Mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Memperkuat penggunaan sumber pembiayaan lainnya dan kerjasama dengan badan usaha.
3. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp16,39 triliun atau 12,64%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp10,22 triliun atau 11,41% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,17 triliun atau 15,73%. Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-rata sebesar 77,89%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,53% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 61,80%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-rata sebesar 17,61%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,10% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 7,34%.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak



- daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
6. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 7. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 8. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 9. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 10. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 11. Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp0,43 triliun atau 6,92%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi meningkat rata-rata sebesar Rp0,18 triliun atau 6,06% dan untuk pemerintah kabupaten/kota meningkat rata-rata sebesar Rp0,25 triliun atau 7,94%. Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-rata sebesar 3,47%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 2,73% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 4,75%.
 12. Selanjutnya, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional rata-rata sebesar 0,78%, untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 1,31% dan pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 0,56%.
 13. Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, pemerintah



daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

14. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
15. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.
16. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
17. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.
18. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.

19. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.
20. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
21. Dalam rangka membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, Pemerintah Provinsi agar menganggarkan DBH-DR dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang berasal dari DBH-



- Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
22. Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.
 23. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2017.
 24. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.
 25. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
 26. DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.
 27. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018.
 28. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 29. Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.
 30. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.
 31. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan



- pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
32. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
 33. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
 34. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 ditetapkan atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
 35. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.
 36. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
 37. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
 38. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.



39. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
40. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
41. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.
42. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
43. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
44. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
45. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
46. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan

setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

3.2.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan.

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya.

Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan unit satuan kerja terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti belum sepenuhnya



kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilihat perbandingan antara target pendapatan daerah pada RPJMD dan target pendapatan daerah pada KU-APBD TA 2018, yang belum terlampaui karena penganggaran dana perimbangan masih didasarkan pada tahun 2017. Target RPJMD sampai dengan tahun 2017 dan KU-APBD TA 2018 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.13 dan tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.13
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Berdasarkan Perubahan RPJMD 2012-2017

No	Uraian	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan	933,169,935,457.83	1,040,484,478,035.48	1,155,140,193,009.56	1,275,556,315,205.66	1,402,315,291,854.31	1,537,181,549,971.56
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	52,968,778,545.91	41,656,621,715.94	33,325,297,372.75	26,660,237,898.20	21,328,190,318.56	17,062,552,254.85
	Total Penerimaan	986,138,714,103.74	1,082,141,099,751.42	1,188,465,490,382.31	1,302,216,553,103.86	1,423,643,811,772.87	1,554,244,102,226.41
	Dikurangi						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembayaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	492,159,936,782.50	525,665,738,471.19	577,558,788,905.09	640,958,156,293.77	711,369,766,635.79	792,681,108,217.22
7	Kapabilitas Riil	493,978,777,321.24	556,475,361,280.23	610,906,701,477.22	661,258,396,810.09	712,273,715,137.07	761,562,994,009.19

sumber : RPJMD 2012 - 2017

Tabel 3.14
Perbandingan Pendapatan Daerah
Pada APBD T.A 2017 dan KU-APBD T.A 2018

URAIAN	APBD 2017	KUA 2018	LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN	1,831,692,829,014.00	1,705,162,733,810.57	(126,530,095,203.44)	(6.91)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	356,398,685,000.00	362,576,085,810.57	6,177,400,810.57	1.73
Pendapatan Pajak Daerah	326,098,685,000.00	330,849,905,660.59	4,751,220,660.59	1.46
Hasil Retribusi Daerah	6,000,000,000.00	7,325,000,000.00	1,325,000,000.00	22.08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000.00	2,422,751,264.98	(1,577,248,735.02)	(39.43)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20,300,000,000.00	21,978,428,885.00	1,678,428,885.00	8.27
DANA PERIMBANGAN	1,467,294,144,014.00	1,334,336,648,000.00	(132,957,496,014.00)	(9.06)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,691,177,000.00	33,691,177,000.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Umum	1,019,780,418,014.00	997,598,871,000.00	(22,181,547,014.00)	(2.18)
Dana Alokasi Khusus Fisik	106,209,000,000.00	0.00	(106,209,000,000.00)	(100.00)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS, Sertifikasi Guru dan Tamsil Guru)	307,613,549,000.00	303,046,600,000.00	(4,566,949,000.00)	(1.48)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8,000,000,000.00	8,250,000,000.00	250,000,000.00	3.13
Pendapatan Hibah	500,000,000.00	750,000,000.00	250,000,000.00	50.00
Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	0.00	0.00

Berdasarkan tabel 3.14 tersebut, beberapa catatan penting pada kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2018 adalah:



1. Pendapatan daerah 2018 dibandingkan dengan target tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp126,530,095,203.44 (6.91%).
2. Kenaikan PAD 2018 dibandingkan dengan target PAD 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp6,177,400,810.57 (1.73%) menjadi sebesar Rp362,576,085,810.57. Pertimbangan kenaikan hanya sebesar 1,73% karena realisasi PAD untuk tahun 2017 sampai dengan bulan Juni (semester I 2017) baru mencapai 39.39% atau sebesar Rp140,401,124,794.02 (tabel 4.1), walaupun dari sisi perkembangan realisasi 2012-2016 tumbuh rata rata 15,19% (tabel 4.2).
3. Dana perimbangan turun sebesar Rp132,957,496,014.00 (9.06%). Penurunan tersebut disebabkan oleh:
 - Dasar penyusunan dana transfer khususnya DAU adalah APBD tahun 2017, sementara pada penyusunan APBD tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2016, jumlah alokasi dana perimbangan khususnya DAU ditetapkan berdasarkan lampiran XIV tentang DAU Murni dan lampiran XV tentang rincian kurang bayar DAU pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
 - Pada peraturan presiden tersebut rincian kurang bayar DAU Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp48.048.532.014,00,
 - Pada tanggal 31 Desember 2016 atau dua hari setelah Perda tentang APBD Provinsi Gorontalo ditetapkan, pemerintah pusat telah mentransfer penundaan DAU untuk Provinsi Gorontalo sebesar Rp48.048.532.014,00.
 - Alokasi anggaran kurang bayar DAU tersebut sesuai hasil pemeriksaan BPK RI menjadi komponene SiLPA Tahun 2016 atau bergesernya struktur anggaran kurang bayar DAU menjadi komponen SiLPA tahun 2016.
 - Sesuai Perpres Nomor 86 tentang rincian APBN Tahun 2017, alokasi DAU untuk Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp997,598,871,000.00
 - Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018. DAK Fisik sebesar Rp106,209,000,000.00 dan Non Fisik yang bersumber dari Akreditasi Rumah Sakit, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM dan Dana



Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp4,566,949,000.00 yang belum pasti penerimaannya tidak dianggarkan.

Dana DAK yang dianggarkan hanya DAK Non Fisik yang telah jelas dan pasti penerimaannya yaitu Dana BOS, Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang berjumlah sebesar Rp303,046,600,000.00.

- Lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar Rp250,000,000.00. Kenaikan tersebut diprediksi bersumber dari hibah dari PT. Pelindo dan PT Jasa Raharja.
4. Dalam proyeksi pendapatan belum termasuk tambahan dana DAU dan DAK untuk tahun 2018.
 5. Karena seluruh belanja sudah maksimal maka, tahun 2018 diperkirakan tidak akan terdapat SiLPA dengan jumlah yang signifikan yang bersumber dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU maupun belanja daerah, kecuali dari dana yang telah jelas peruntukannya seperti pekerjaan lanjutan dan dana DAK yang sisa anggarannya akan dianggarkan lagi pada kegiatan yang sama tahun 2018.

3.2.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2018, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas layanan Publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan Publik yang ditawarkan kemasyarakat;
- b. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
- c. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai;
- d. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama pendataan dan penagihan atas potensi dan objek pajak alat berat;
- e. Memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui pemberian insentif pembebasan BBN-KB dan denda pajak;
- f. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik;
- g. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
- h. Mengoptimalkan kinerja BUMD/perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;



- i. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi;
- j. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif;
- k. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan;
- l. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplier kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah;
- m. Mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif;
- n. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2018 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- 1) Penggalian potensi Pendapatan Daerah melalui penyusunan Database Potensi daerah;
- 2) Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
- 3) Peningkatan kualitas aparatur yang mengelola pendapatan daerah;
- 4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar SKPD penghasil;
- 5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
- 6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban;



- 7) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai (SIPAMOR).
- 8) Pemantapan kelembagaan, dengan cara :
 - a) Mengintensifkan pendapatan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
 - b) Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan kepada pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk perikanan, pertanian dan perhubungan selain infrastruktur.
 - c) Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah.
 - d) Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

3.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.



Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan.

3.3.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Pada tahun anggaran 2018 kebijakan belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan RPJMD Gubernur periode 2018-2022, khususnya untuk membiayai delapan program utama pembangunan daerah. Disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan pada empat sektor yang menjadi fokus utama pembangunan daerah.

Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan, belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai **belanja tidak langsung** berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada program prioritas yang direncanakan. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan output



dan outcome yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat.

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS dan honorarium non PNS.
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Arah kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018 sebagaimana RKPD Tahun 2018 Provinsi Gorontalo, mengacu kepada tema "**Peningkatan Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Yang Ditunjang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat**" dan program Kepala Daerah yang pengelolaannya akan didasarkan pada prioritas sebagai berikut :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.
4. Peningkatan Ekonomi.
5. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah.
6. Pengembangan Budaya dan Keagamaan.
7. Pengembangan Pariwisata.
8. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup.

Selain itu kebijakan perencanaan belanja, tidak terlepas dengan pengaruh perkembangan realisasi anggaran belanja selama lima tahun terakhir (TA 2012-2016), realisasi belanja semester I Tahun 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 3.15, tabel 3.16 dan 3.17 berikut.



Tabel 3.15
Ringkasan Perkembangan Realisasi Belanja APBD
2012-2016

No	Uraian	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	% rata2
	Belanja	886,021,160,786.00	1,060,816,776,902.00	18.73	1,204,490,038,148.65	14.62	1,407,931,048,148.00	16.99	1,690,637,697,104.70	12.87	16.80
A	Belanja Tdk Lgsng	466,099,947,678.00	606,042,856,233.00	8.80	668,126,329,827.66	10.29	620,104,488,393.00	11.10	761,737,958,728.00	22.84	13.26
1	Belanja Pegawai	209,089,424,239.00	224,332,889,461.00	7.29	239,795,986,650.55	6.89	269,685,979,652.00	12.46	286,483,783,626.00	6.23	8.22
2	Belanja Subsidi	1506,660,000.00		(100.00)							
3	Belanja Hibah	82,988,988,807.00	171,421,289,750.00	(6.32)	81,533,544,216.00	5.91	204,002,311,020.00	12.36	328,562,111,700.00	61.06	18.25
4	Belanja Bantuan Sosial	39,250,000.00	566,000,000.00	13.16	1,479,000,000.00	166.01	3,006,000,000.00	103.25	1,637,500,000.00	(45.53)	385.07
5	Belanja Bagi Hasil Kpd Pr	55,82,732,653.00	78,238,394,300.00	41.78	12,638,501,788.00	43.97	12,823,973,654.00	9.04	126,889,832,177.00	3.15	24.48
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota	6,088,905,599.00	31,158,408,722.00	93.66	21,600,082,173.00	(30.68)	8,035,976,567.00	(16.04)	16,378,646,726.00	(9.68)	9.32
7	Belanja Tak Terduga	83,987,000.00	335,873,000.00	73.34	1,058,216,000.00	25.06	2,451,047,500.00	131.62	1,985,882,500.00	(18.98)	100.21
B.	Belanja Langsung	419,921,213,108.00	644,773,921,669.00	29.73	646,364,708,321.00	18.65	787,826,669,766.00	21.89	828,799,738,376.70	6.20	18.87
	Belanja Pegawai	32,854,601,863.00	36,434,870,312.00	10.90	35,278,62,987.00	(3.17)	52,049,233,531.00	47.54	61,886,416,495.00	18.90	18.54
	Belanja Barang dan Jasa	248,669,037,584.00	323,379,711,754.00	30.04	378,661,812,137.00	17.10	391,533,251,205.00	3.40	469,988,364,796.70	20.04	17.64
	Belanja Modal	38,397,573,651.00	164,959,339,603.00	33.64	232,424,743,197.00	25.66	344,244,075,019.00	48.11	296,922,957,084.00	(13.75)	23.42

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.16
Perkembangan Prosentasi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2016
(2016 Data Sebelum hasil Audit BPK RI)

No	Uraian	2012		%	2013		%	2014		%	2015		%	2016		%	% rata2
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
	Belanja	872,907,406,719.12	886,021,160,786.00	90.97	1,131,916,649,830.20	1,060,816,776,902.00	93.84	1,316,134,795,815.28	1,204,490,038,148.55	92.54	1,518,917,829,806.11	1,407,931,048,148.00	92.78	1,744,406,888,735.60	1,690,637,697,104.70	94.18	92.31
A	Belanja Tdk Lgsng	501,216,517,216.40	466,099,947,678.00	92.79	637,473,997,951.97	606,042,856,233.00	94.15	687,263,316,464.32	668,126,329,827.66	95.84	643,242,988,324.91	620,104,488,393.00	96.49	802,664,736,045.63	761,737,958,728.00	94.97	95.14
1	Belanja Pegawai	276,793,391,656.40	209,089,424,239.00	92.21	235,393,466,247.27	224,332,889,461.00	95.30	298,667,979.12	239,795,986,650.55	92.53	281,406,000.00	269,685,979,652.00	95.84	291,333,447,209.34	286,483,783,626.00	98.33	95.59
2	Belanja Subsidi	3,500,000,000.00	1,506,660,000.00	43.05													
3	Belanja Hibah	85,053,120,000.00	82,988,988,807.00	97.16	83,745,600,000.00	171,421,289,750.00	93.29	84,600,850,000.00	81,533,544,216.00	96.35	208,453,700,000.00	204,002,311,020.00	98.01	336,324,481,700.00	328,562,111,700.00	97.69	96.64
4	Belanja Bantuan Sosial	600,000,000.00	39,250,000.00	6.54	1,000,000,000.00	566,000,000.00	56.60	1,650,000,000.00	1,479,000,000.00	89.64	4,432,000,000.00	3,006,000,000.00	67.82	2,487,500,000.00	1,637,500,000.00	65.83	69.72
5	Belanja Bagi Hasil Kpd Pr	55,82,732,653.00	55,82,732,653.00	97.36	82,205,817.00	78,238,394,300.00	95.0	15,379,141,852.00	12,638,501,788.00	97.62	126,895,068,820.78	122,823,973,654.00	96.78	144,732,721,962.29	126,889,832,177.00	87.53	94.28
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota	6,250,000,000.00	6,088,905,599.00	98.74	32,629,750,000.00	31,158,408,722.00	95.49	22,570,000,000.00	21,600,082,173.00	95.78	8,636,395,275.00	8,035,976,567.00	97.21	22,166,585,225.00	16,378,646,726.00	73.92	90.58
7	Belanja Tak Terduga	2,200,000,000.00	83,987,000.00	8.82	2,500,000,000.00	335,873,000.00	13.43	3,896,211,000.00	1,058,216,000.00	27.16	3,691,674,000.00	2,451,047,500.00	66.28	5,000,000,000.00	1,985,882,500.00	39.72	36.65
B.	Belanja Langsung	471,690,899,519.72	419,921,213,108.00	89.02	594,441,651,728.23	644,773,921,669.00	91.64	716,271,479,420.56	646,364,708,321.00	90.43	875,584,831,581.20	787,826,669,766.00	89.88	942,332,162,816.87	828,799,738,376.70	87.95	90.82
	Belanja Pegawai	35,787,652,212.00	32,854,601,863.00	91.81	38,534,953,900.00	36,434,870,312.00	94.55	37,884,589,000.00	35,278,62,987.00	93.11	55,619,566,500.00	52,049,233,531.00	93.58	65,889,893,800.00	61,886,416,495.00	94.06	94.18
	Belanja Barang dan Jasa	276,001,671,939.72	248,669,037,584.00	90.10	349,849,278,945.23	323,379,711,754.00	92.65	407,438,979,022.96	378,661,812,137.00	92.94	421,844,839,838.20	391,533,251,205.00	92.86	508,257,696,808.87	469,988,364,796.70	92.47	92.75



Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Belanja Semester I Tahun 2017

No	Uraian	SEMESTER I 2016		% REALISASI	SEMESTER I 2017		% REALISASI
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
	Belanja	1,693,867,011,320.69	695,001,704,173.70	41.03	1,839,631,898,664.00	703,787,390,802.99	38.26
A	Belanja Tdk Lgsng	806,470,914,260.82	372,173,139,910.00	46.21	1,034,870,661,628.87	466,112,746,731.00	44.07
1	Belanja Pegawai	306,120,707,120.53	166,540,657,560.00	54.58	571,774,213,560.07	249,875,508,788.00	43.70
3	Belanja Hibah	326,973,400,000.00	152,694,868,625.00		296,034,032,500.00	150,921,639,250.00	
4	Belanja Bantuan Sosial	2,487,500,000.00	926,500,000.00	37.25	2,103,000,000.00	477,500,000.00	22.71
5	Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota & Perdes	144,732,721,915.29	47,340,013,823.00	32.71	148,635,022,694.80	53,263,711,170.00	35.84
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota	22,156,585,225.00	3,230,197,402.00	14.58	11,324,382,874.00	975,298,450.00	8.61
7	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00	1,440,902,500.00	28.82	5,000,000,000.00	599,089,073.00	11.98
B.	Belanja Langsung	888,396,097,059.87	322,828,664,263.70	36.34	804,661,247,035.13	247,674,644,071.99	30.78
1	Belanja Pegawai	49,765,303,800.00	21,761,497,181.00	43.73	70,359,783,000.00	32,710,420,821.00	46.49
2	Belanja Barang dan Jasa	459,914,290,450.87	186,566,589,845.70	41.00	444,029,323,831.13	162,699,198,327.99	36.64
3	Belanja Modal	378,716,502,809.00	112,510,477,237.00	29.71	290,272,140,204.00	52,265,025,123.00	18.01

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan kebijakan belanja dan perkembangan realisasi belanja seperti dijelaskan diatas, dibawah ini dirumuskan ringkasan kebijakan umum belanja pada APBD TA 2018 disertai perbandingan dengan APBD TA 2017 yang disajikan pada Tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18
Perbandingan Kebijakan Belanja Pada APBD TA. 2017 dan KU-APBD TA. 2018

BELANDA	1,839,531,898,664.00	1,707,662,733,810.57	(131,869,164,853.43)	(7.17)
BELANDA TIDAK LANGSUNG	1,034,870,651,628.87	1,007,235,309,687.03	(27,635,341,941.84)	(2.67)
Belanja Pegawai	571,774,213,560.07	591,749,613,560.07	19,975,400,000.00	3.49
Belanja Hibah	296,034,032,500.00	251,034,589,250.00	(44,999,443,250.00)	(15.20)
Belanja Bantuan Sosial	2,103,000,000.00	2,103,000,000.00	0.00	0.00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	148,635,022,694.80	153,180,309,227.96	4,545,286,533.16	3.06
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	11,324,382,874.00	4,167,797,649.00	(7,156,585,225.00)	(63.20)
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
BELANDA LANGSUNG	804,661,247,035.13	700,427,424,123.54	(104,233,822,911.59)	(12.95)
Belanja Pegawai	70,359,783,000.00	70,359,783,000.00	0.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa	444,029,323,831.13	432,567,915,694.54	(11,461,408,136.59)	(2.58)
Belanja Modal	290,272,140,204.00	197,499,725,429.00	(92,772,414,775.00)	(31.96)

Berdasarkan tabel tersebut beberapa catatan penting terkait dengan kebijakan belanja daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Alokasi belanja berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Penurunan belanja daerah sebesar Rp131,869,164,853.43 (7.17%) menjadi sebesar Rp1,707,662,733,810.57 dibanding Tahun 2017 sebesar Rp1,839,531,898,664.00 tersebut, disesuaikan dengan sumber pendapatan dari dana DAU murni tahun 2017, berkurangnya perkiraan SILPA tahun 2017 dan belum dianggarkannya DAK Fisik, DAK Non fisik yang besumber dari akreditasi



rumah sakit, dana peningkatan kapasitas koperasi dan UKM serta dana pelayanan administrasi kependudukan serta penyertaan modal pada PT. Bank Sulutgo belum dianggarkan.

3. Alokasi anggaran belanja langsung per SKPD sebesar Rp700,427,424,123.54 terdapat pada tabel 4.10.
4. Alokasi belanja langsung belum termasuk tambahan DAU dan DAK.
5. Pemanfaatan tambahan DAU dan DAK sebagai berikut:
 - a. Untuk tambahan DAU, pemanfaatannya akan dialokasikan pada :
 - Penyesuaian anggaran fungsi pendidikan.
 - Penyesuaian anggaran fungsi Kesehatan.
 - Penyesuaian anggaran untuk infrastruktur.
 - Penyesuaian anggaran peningkatan ekonomi.
 - Penyesuaian anggaran kinerja layanan pemerintah daerah.
 - Penyesuaian anggaran pengembangan budaya dan keagamaan.
 - Penyesuaian anggaran perbaikan infrastruktur pariwisata.
 - Penyesuaian anggaran kualitas lingkungan hidup.
 - b. Tambahan DAK, pemanfaatannya akan disesuaikan dengan bidang pendidikan, Kesehatan, infrastruktur jalan dan irigasi, perikanan kelautan, pertanian, perdagangan, perhubungan, ESDM, kehutanan dan alokasi khusus lainnya yang ditetapkan dalam APBN 2018.
 - c. Tambahan untuk belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga)

Kebijakan belanja tidak langsung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD TA. 2018. Beberapa hal penting terkait dengan penganggaran belanja tidak langsung sebagaimana yang disampaikan dalam sosialisasi Permendagri 33 Tahun 2017 oleh Dirjen Keuangan Daerah sebagai berikut.

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses



- yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. JKK dan JKM bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani PP 70/2015.
 5. JKK dan JKM KDH/WaKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD disesuaikan dg yg berlaku bagi ASN.
 6. TP-PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD kriteria ditetapkan dengan Perkada.
 7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PP 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 8. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 9. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 10. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 11. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan setelah memenuhi belanja untuk urusan yang wajib dilaksanakan khususnya program prioritas daerah yang disinkronkan dengan program prioritas nasional.
 12. Dukungan pendanaan operasional yang bersumber dari APBD kepada Ormas (termasuk organisasi keagamaan) melalui hibah.
 13. Penganggaran DBH Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemprov kepada pemerintah kab/kota harus mempedomani UU 28/2009. Tata cara penganggaran DBH harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2018, sedangkan pelampauan target TA 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kab/kota ditampung dalam P-APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yang tidak melakukan P-APBD TA 2018.
 14. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018.
 15. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan setelah memenuhi belanja untuk urusan yang wajib dilaksanakan khususnya program prioritas daerah yang disinkronkan dengan program prioritas nasional.
 16. Belanja bantuan keuangan umum bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula dan diatur melalui perkada.
 17. Belanja bantuan keuangan khusus bertujuan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemda penerima sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan dan Pemanfaatan ditetapkan oleh pemberi bantuan.



18. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
19. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan belanja tidak langsung Provinsi Gorontalo pada KU-APBD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai terutama dipengaruhi oleh gaji PNS yang dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dan berdasarkan pada realisasi semester I 2017, kebijakan belanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk tahun 2018, kenaikan belanja pegawai pimpinan dan anggota DPRD, kenaikan berkala, kenaikan pangkat, tunjangan untuk guru, ketenagakerjaan dan kehutanan. Berdasarkan hal tersebut kenaikan belanja pegawai sebesar Rp19,975,400,000.00 (4.15%) menjadi sebesar Rp591,749,613,560.07 dibanding APBD tahun 2017 sebesar Rp571,774,213,560.07.
- b) Belanja hibah, disesuaikan menjadi sebesar Rp251,034,589,250.00 atau turun sebesar Rp44,999,443,250.00 (15.20%) dari pagu yang dianggarkan dalam APBD tahun 2017 sebesar Rp296,034,032,500.00 penyesuaian tersebut berasal dari hibah dana BOS, dimana sesuai ketentuan dianggarkan sama dengan tahun 2017, hibah kepada masyarakat sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan hibah untuk komisi pemilihan umum provinsi Gorontalo, Bawaslu provinsi Gorontalo dan pengamanan Pilkada tidak dianggarkan lagi.
- c) Belanja bantuan sosial didasarkan pada Permendagri nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 dan Permendagri nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang mengatur antara lain mengenai kriteria penerimaan bantuan sosial yang lebih selektif dari pada peraturan sebelumnya.
Dalam KUA-APBD tahun 2018 alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp2,103,000,000.00 atau sama dengan APBD tahun 2017. Kebijakan belanja bansos sesuai ketentuan akan dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.



- d) Belanja bagi hasil kepada kabupatēn/kota, menjadi sebesar Rp153,180,309,227.96 atau naik sebesar Rp4,545,286,533.16 (3.06%) dibanding apbd 2017 sebesar Rp148,635,022,694.80 yang disesuaikan dengan kenaikan PAD yang harus dibagihasilkan ke pemerintah kab/kota.
- e) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, di dalam ku-APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp4,167,797,649.00. Kebijakan belanja bantuan keuangan tetap didasarkan pada permendagri no.33 tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebijakan provinsi gorontalo tahun 2018 untuk TKD camat dan lurah yang telah menjadi temuan Irjen Kemendagri dan BPK RI, sehingga tidak dianggarkan lagi dalam KUA APBD Tahun 2018, serta memperhitungkan bantuan parpol bantuan keuangan khusus serta bantuan keuangan untuk desa terpencil.
- f) Belanja tidak terduga, sama dengan APBD tahun 2017 yaitu sebesar Rp5,000,000,000.00 kebijakan belanja tidak terduga akan diarahkan/terutama untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup..

3.3.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kebijakan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar Rp686,990,838,898.54, merupakan alokasi belanja program-program daerah berdasarkan hasil sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Alokasi Belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yg menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yg berkaitan dg pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yg tidak berkaitan dg pelayanan dasar. Belanja langsung dituangkan dlm bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah tahun 2018.



- 3) Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.
- 4) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- 6) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).
- 7) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akual.



- 8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU 23/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 32/2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14/2017, serta peraturan per-
UU-an lain dibidang hibah dan bantuan sosial.
- 9) Pemda harus konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan 20%, kesehatan 10% dan belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 10) Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2017 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
- 11) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2017 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Kepala Daerah dan DPRD.
- 12) Penguatan pembinaan SAMSAT Pusat dan Provinsi melalui dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan oleh pemerintah daerah.
- 13) Penguatan peran Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) oleh pemda.

3.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat di satu sisi dan semakin terbatasnya jumlah pendapatan di sisi lain. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah



yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Komponen penyediaan dana di sektor penerimaan pembiayaan difokuskan pada dua aspek. Pertama adalah memprediksi kemampuan penerimaan yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (over-target) khususnya dari dana transfer. Kemudian yang kedua adalah estimasi efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2018 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan menghasilkan angka-angka yang dikelompokkan menjadi komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018. Pada KUA APBD Tahun 2018 ini, dengan telah maksimalnya realisasi belanja 2017 dan realisasi pendapatan yang belum sesuai dengan apa yang ditargetkan sehingga akan berpengaruh pada SiLPA, yang dianggarkan sebesar Rp2,500,000,000.00.

3.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Pada KU-APBD Tahun 2018 ini, kebijakan pengeluaran pembiayaan belum dianggarkan mengingat masih banyaknya belanja prioritas daerah yang perlu di danai. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 4.19
Kebijakan Pembiayaan Daerah pada KU-APBD Tahun 2018

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	10,415,469,650.00	2,500,000,000.00	-7,915,469,650.00	-76.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10,415,469,650.00	2,500,000,000.00	-7,915,469,650.00	-76.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,576,400,000.00	0.00	-2,576,400,000.00	-100.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,576,400,000.00	0.00	-2,576,400,000.00	-100.00
PEMBIAYAAN NETTO	7,839,069,650.00	2,500,000,000.00	-5,339,069,650.00	-68.11
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	-0.00	-0.00	-0.00

Secara keseluruhan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.



Tabel 3.20
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Pada KU-APBD Tahun 2018

URAIAN	APBD 2017	KUA 2018	LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN	1,831,692,829,014.00	1,705,162,733,810.57	-126,530,095,203.44	-6.91
PENDAPATAN ASLI DAERAH	356,398,685,000.00	362,576,085,810.57	6,177,400,810.57	1.73
Pendapatan Pajak Daerah	326,098,685,000.00	330,849,905,660.59	4,751,220,660.59	1.46
Hasil Retribusi Daerah	6,000,000,000.00	7,325,000,000.00	1,325,000,000.00	22.08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000.00	2,422,751,264.98	-1,577,248,735.02	-39.43
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20,300,000,000.00	21,978,428,885.00	1,678,428,885.00	8.27
DANA PERIMBANGAN	1,467,294,144,014.00	1,334,336,648,000.00	-132,957,496,014.00	-9.06
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,691,177,000.00	33,691,177,000.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Umum	1,019,780,418,014.00	997,598,871,000.00	-22,181,547,014.00	-2.18
Dana Alokasi Khusus Fisik	106,209,000,000.00	0.00	-106,209,000,000.00	-100.00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS, Sertifikasi Guru dan Tansil Guru)	307,613,549,000.00	303,046,600,000.00	-4,566,949,000.00	-1.48
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8,000,000,000.00	8,250,000,000.00	250,000,000.00	3.13
Pendapatan Hibah	500,000,000.00	750,000,000.00	250,000,000.00	50.00
Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	0.00	0.00
BELANJA	1,839,531,898,664.00	1,707,662,733,810.57	-131,869,164,853.43	-7.17
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,034,870,651,628.87	1,007,235,309,687.03	-27,635,341,941.84	-2.67
Belanja Pegawai	571,774,213,560.07	591,749,613,560.07	19,975,400,000.00	3.49
Belanja Hibah	296,034,032,500.00	251,034,589,250.00	-44,999,443,250.00	-15.20
Belanja Bantuan Sosial	2,103,000,000.00	2,103,000,000.00	0.00	0.00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	148,635,022,694.80	153,180,309,227.96	4,545,286,533.16	3.06
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	11,324,382,874.00	4,167,797,649.00	-7,156,585,225.00	-63.20
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
BELANJA LANGSUNG	804,661,247,035.13	700,427,424,123.54	-104,233,822,911.59	-12.95
Belanja Pegawai	70,359,783,000.00	70,359,783,000.00	0.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa	444,029,323,831.13	432,567,915,694.54	-11,461,408,136.59	-2.58
Belanja Modal	290,272,140,204.00	197,499,725,429.00	-92,772,414,775.00	-31.96
SURPLUS / DEFISIT	-7,839,069,650.00	-2,500,000,000.00	5,339,069,650.00	-68.11
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	10,415,469,650.00	2,500,000,000.00	-7,915,469,650.00	-76.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10,415,469,650.00	2,500,000,000.00	-7,915,469,650.00	-76.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,576,400,000.00	0.00	-2,576,400,000.00	-100.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,576,400,000.00	0.00	-2,576,400,000.00	-100.00
PEMBIAYAAN NETTO	7,839,069,650.00	2,500,000,000.00	-5,339,069,650.00	-68.11
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	-0.00	-0.00	



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD 2017 - 2022 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode ketiga dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu **Gorontalo Maju Dan Mandiri**. Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (*quality-sustainable growth*).

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Dengan memperhatikan arahan RPJPD 2007-2025 dan RPJMN 2015-2019, serta mempertimbangkan masalah dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi diakhir tahun 2016 dan 2017, maka Visi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera”

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

Gorontalo Maju dan Unggul, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*), dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian



laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

4.1 Tema Pembangunan 2018

Sebagai RKPD pertama dalam periodisasi RPJMD tahun 2017 – 2022, maka tema pembangunan untuk tahun 2018 adalah:

“Peningkatan Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Yang Ditunjang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Unsur - unsur tema RKPD 2018 adalah :

<p>Peningkatan Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sector yang masih persoalan utama daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Infrastruktur. • Pengembangan sector yang menjadi potensi daerah, yaitu Pertanian, Perikanan dan kelautan, Kehutanan • Pengembangan sector jasa untuk peningkatan ekonomi, Koperasi, UMKM, Industri, Pariwisata yang ditunjang tenaga kerja yang berkompeten • Konservasi hutan dan lahan, pengembangan sumberdaya
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah	alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none">• Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);• Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;• Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;• Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi nasional (jalan, bandara pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta api ekonomi);• Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta Desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian dan perikanan;• Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan energy ketenagalistrikan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan public, keamanan dan ketertiban daerah• Mengupayakan peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan• Peningkatan kelestarian budaya dan mendorong penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam percepatan pencapaian visi dan misi RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 - 2022

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : " Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"		
Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan	Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai destinasi nasional/internasional	Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara
	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan
	Memelihara daya dukung lingkungan untuk pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana
Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi	Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat
		Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq
	Penurunan angka kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman
Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan lebih melayani	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan kebijakan utama pembangunan daerah yang menjadi arahan fokus dan titikberat dalam pendanaan pembangunan tahun 2018, yaitu;

- 1. Pendidikan yang berkualitas;** Setelah sukses dengan "Prodira" maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global
- 2. Kesehatan yang prima;** Setelah sukses dengan "JAMKESTA" maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo.
- 3. Infrastruktur lebih merata;** Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil



- dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo.
4. **Ekonomi yang lebih meningkat;** Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
 5. **Pemerintah yang lebih melayani;** melakukan reformasi birokrasi yang focus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman.
 6. **Agama dan Budaya;** Sebagai daerah dengan filosofi "adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah" maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragam serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak.
 7. **Pariwisata yang lebih mendunia;** Perbaiki infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international.
 8. **Lingkungan yang lebih lestari;** Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

4.3 Isu Strategis

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan yang dikemukakan diatas dan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan yang diuraikan pada BAB II, maka isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah :

1. Kemiskinan dan Pengangguran.

Jumlah penduduk miskin Maret 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203.186 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin September 2015 sebanyak 206.513 orang. Dengan demikian penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2015 - Maret 2016 berkurang sebanyak 3.327 orang. Persentase kemiskinan pada bulan September 2016 sebesar 17,63%, mengalami penurunan dibanding Maret 2016 sebesar 17,72%, kondisi tersebut menunjukkan kemiskinan menjadi hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelempok



berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa ketrampilan wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk didalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Berbagai kebijakan untuk mencapai penurunan persentase angka kemiskinan hingga 14,69 persen ditahun 2022, dilakukan melalui :

- Peningkatan layanan dan cakupan jaminan kesehatan (JAMKESTA) di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo
- Pemberian Bantuan Operasional Siswa "Prodira" bagi siswa sekolah menengah untuk seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.
- Peningkatan penyediaan listrik untuk Rumah tangga miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo
- Penyediaan Rumah Hunian Layak dan utilitasnya Bagi Masyarakat Miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.
- **Penyediaan dan perluasan akses pangan, Pemberian bantuan pangan non tunai** untuk menjamin pertumbuhan dan gizi masyarakat miskin di seluruh Kabupaten dan Kota.
- Peningkatan Pendapatan melalui Ekonomi Kelautan (TIP - EK) untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara
- Pengembangan Ekonomi Produktif masyarakat.

Secara umum, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 167.445 jiwa atau 30,63 persen dari total penduduk yang bekerja. Meskipun merupakan yang paling dominan, namun selama periode 2012-2016 persentasenya cenderung menurun. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan dan sektor jasa cenderung mengalami peningkatan.



Dari status pendidikan ditahun 2016 pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebanyak 76.896 atau 14,07 persen.

Pola Pembangunan Provinsi Gorontalo pada lima tahun kedepan akan didorong untuk menciptakan pertumbuhan inklusif, memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (*Decent Work*) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

2. Sumber daya alam yang berkelanjutan.

Isu ini dititikberatkan pada upaya dalam pengembangan sektor – sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata yang ditunjang oleh pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk keberlanjutan pembangunan.

3. Infrastruktur dasar dan strategis.

Dukungan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan sosial ekonomi daerah relative masih belum optimal, sehingga kedepan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dilaksanakan di daerah, seperti pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GOR), pengembangan bandara Djalaluddin, pembangunan bandara Pohuwato, Pembangunan Waduk Bone Hulu, Pembangunan Bendung Bolango Hulu, Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Anggrek.

Pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, pembangunan jalan strategis provinsi, pengembangan transportasi dan teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti pemukiman layak, sanitasi, air bersih, serta pembangunan infrastruktur dalam meminimalisir dampak bencana.

Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal, serta mempercepat perumusan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya.

4. Kualitas sumber daya manusia.

Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya manusia (SDM), Oleh karena itu perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada

pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah.

5. Tata Kelola Pemerintahan.

Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah dengan meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*).

4.4 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan Visi, Misi, dan kebijakan utama pembangunan daerah, maka dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai di tahun 2018, melalui penerapan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

4.4.1 Sasaran meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Strategi : Mengembangkan objek wisata dan kawasan potensial untuk Pariwisata

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal;
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata fokus pada 3 kawasan destinasi wisata strategis provinsi Taman Laut Olele, Pantai Biluhu dan Bubohu Wisata Religi dan destinasi pariwisata lainnya yang ditetapkan dalam RIPPDA dan KSPN Provinsi Gorontalo, dan;
3. Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata daerah dan peningkatan sumberdaya manusia pariwisata.

4.4.2 Sasaran meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Pengembangan produk, sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor;
2. Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan agro industri daerah;
3. Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan;

4. Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM.

4.3.3 Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan produksi, peningkatan sarana prasarana dan distribusi.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan; (ii) Revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi produksi tanaman pangan; (iii) Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik, (iv) Mengembangkan produksi pertanian melalui pola tumpang-sari antara tanaman kehutanan sebagai pelindung dan tanaman pertanian sebagai tanaman utama di lahan-lahan pertanian. (v) Peningkatan teknologi dan pola penanganan pasca panen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil termasuk pembangunan penggilingan padi (vi) Mendorong pengembangan bibit lokal yang bernilai tinggi (padi dan jagung) melalui pengembangan Desa Mandiri Benih.
2. Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya melalui : (i) penambahan populasi bibit sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya; (ii) pengembangan kawasan peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan untuk pengendalian penyakit terutama Zoonosis.
3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan: (i) peningkatan produktivitas dan pengembangan perikanan tangkap; (ii) peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi garam (iii) pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasi-lokasi potensial; (iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (v) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis; (vi) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan, (vii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting.
4. Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui : (i) pemberian pelatihan kemampuan teknis

- untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (ii) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan; (iii) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (iv) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan, petambak garam, pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.
5. Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi: (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk keluarga; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (iv) penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di masyarakat, (v) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.
 6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan.

4.3.4 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan, dengan penerapan kebijakan sebagai berikut :

1. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi;
2. Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan;
3. Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan;
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui, (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto; (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (viii) peningkatanutupan lahan/hutan;
6. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;

7. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
8. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
9. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana;
10. Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, danau, dan pantai.

4.3.5 Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah

Strategi yang dilakukan adalah Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, layanan E-Government dan komunikasi informatika di daerah dengan kebijakan :

1. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada koridor ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);
2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;
3. Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;
4. Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).
5. Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintahan.

4.3.6 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UKM, pengembangan sarana distribusi barang dengan menjaga stabilitas harga, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handai dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal yang dialokasikan melalui bantuan langsung Pemerintah Provinsi ke Pemerintah kabupaten/Desa serta mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.

Kebijakan yang dilakukan, melalui :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;
2. Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi serta jangkauan dan pemasaran produk UKM dan koperasi;
3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;
4. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
5. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
6. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke sentra produksi pertanian dan perikanan;
7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa tertinggal meliputi aspek peningkatan aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan keuangan desa;
8. Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah dan peningkatan infrastruktur unit yang menjadi sumber pendapatan daerah, dan;
9. Peningkatan investasi melalui promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah.

4.3.7 Sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

Strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, pelaksanaan pendidikan menengah universal dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (yang didukung oleh pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan serta peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan agar seluruh sumberdaya pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien), serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas, peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.

2. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah (pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru); Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa; Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru, dan pemerataan distribusi guru.
4. Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya budaya.
5. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; mengembangkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu.

4.3.8 Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan lansia, pencegahan dan pengendalian penyakit, pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, yang didukung dengan perlindungan pelayanan kesehatan universal melalui Jamkesta, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan;
2. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan, peningkatan pelayanan dan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping.

4.3.9 Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi mewujudkan pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan adat dan budaya.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat;
2. Peningkatan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan.

4.3.10 Menurunnya tingkat kemiskinan

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia; Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan SJSN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan layanan kesehatan; pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan gizi serta Penguatan institusi implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
2. Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber pembiayaan, penerapan teknologi, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis), pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

4.3.11 Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman

Strategi yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

4.3.12 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Strategi untuk pencapaian sasaran, yaitu dengan penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan:

1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan Grand Design dan Road Map yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;
2. Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen yang transparan yang berbasis IT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.
3. Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pembangunan melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs; penguatan pengendalian kinerja pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; dan peningkatan kualitas regulasi daerah.
5. Peningkatan percepatan pencapaian Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan fokus penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), regulasi, dan pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum politik serta ekonomi, Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak dan Peningkatan pemenuhan hak perempuan dengan fokus pada pencegahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum secara khusus pada Kab/Kota dengan tingkat kerentanan tinggi, serta peningkatan kerjasama antar pelaku dan lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak;
6. Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah melalui: pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; penguatan karakter dan

wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan; dan menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

7. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah lainnya; membangun hubungan kemitraan untuk pembangunan daerah dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional.
8. Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah, seperti pertanian dan pangan, energi baru dan terbarukan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek serta mengupayakan penyediaan sarana prasarana iptek.

4.3.13 Kebijakan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan

Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar dalam menginternalisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pembangunan daerah, diantaranya adalah:

- I. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui:
 1. Peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH;
 2. Pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 4. Penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati;
 5. Pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau, dan;
 6. Pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

II. Peningkatan Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan

Mandat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa.



Sebagai upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan, maka dilakukan melalui:

1. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, penegakan dan bantuan hukum.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, kebijakan yang dilakukan adalah: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di daerah; (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; Peningkatan partisipasi dan kesempatan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat, dan (3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota tentang penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk data terpilah; (2) Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (3) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (4) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta (5) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.

Tabel. 4.2
Sasaran Strategis Pembangunan Daerah

Indikator	Target Capaian	
	2017	2018
Wisatawan Mancanegara (orang)	6,219	6,530
Wisatawan Nusantara (kunjungan)	594,714	624,450
Rata-rata lama tinggal wisatawan	2 hari	2 hari
Persentase Kontribusi sektor pertanian pada PDRB	12,273.53	12,641.74



Indikator	Target Capaian	
	2017	2018
(trilyun rupiah)		
Nilai Tukar Petani	102.80	103.32
Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	65.5	65.8
Skor PPH Ketersediaan	77.9	79.5
Skor PPH Konsumsi	101	101.1
Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT)	102.92	103.22
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	71.7	72.06
Luas lahan kritis	705,930	1,000
Indeks Resiko Bencana	0.60 - 0.94	0.54 - 0.88
Kondisi Mantap Jalan Provinsi (%)	45.96	50.77
Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km)	227.52	237.52
Indeks E-Government	3.77	3.78
Pertumbuhan Ekonomi	7.02	7.18
Indeks Gini	4.53	3.80
Laju Inflasi (%)	0.40	0.39
PDRB Perkapita	27,737,303	27,820,514.43
Tingkat Pengangguran Terbuka	3.88	3.65
Pendapatan Daerah (trilyun rupiah)	1,78	1,82
Desa tertinggal yang diantaskan (desa tertinggal)	0	100
Indeks Pembangunan Manusia	66.83	67.38
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	76,27	76,50%
Angka Melek Huruf	99,82	99,86
Angka Rata - Rata Lama Sekolah	7.15	7,20
Usia Harapan Hidup	67.12	67
Angka Kelahiran Total (Fertility Rate)	2.58	2.56
Warisan Budaya yang memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	-	3
Rasio tempat ibadah (mesjid) per satuan penduduk	0.23	0.23
Persentase Angka Kemiskinan (%)	17.10	16.59
Penduduk Miskin (orang)	199,831	196,876
Persentase cakupan akses air minum yang layak	73.38%	75.21%
Persentase cakupan akses sanitasi layak	61.35%	62.88%
Persentase penurunan luas Kawasan kumuh	100%	80%
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B
Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	CC	B
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
Survey kepuasan masyarakat		60

4.5 Prioritas Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Program prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan di tahun 2018 dikelompokkan berdasarkan sasaran utama yang ingin dicapai sebagai berikut.



Tabel 4.3
Program Prioritas Provinsi Tahun 2018

Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
Sasaran meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara		
1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
2.	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Dinas Pariwisata
4.	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (khusus jalan strategis provinsi, akses pariwisata, pertanian, transmigrasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		
1.	Program Peningkatan nilai tambah hasil pertanian	Dinas Pertanian
2.	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian & Perdagangan
4.	Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian & Perdagangan
5.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
6.	Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan)	Dinas Perikanan dan Kelautan (UPTD-BP2MDPP)
7.	Program Pengembangan SDM Pertanian	Dinas Pertanian (BPSDMP)
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan		
1.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ populasi ternak Berkelanjutan	Dinas Pertanian
2.	Program Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH)	Dinas Pertanian
3.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan
4.	Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;	Dinas Perikanan dan Kelautan
5.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
6.	Program Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis (UPTD-Balai Budidaya Perikanan Laut & Payau)	Dinas Perikanan dan Kelautan (UPTD Balai Budidaya perikanan laut & Payau)
7.	Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda)	Dinas Perikanan dan kelautan (UPTD-PPI Gentuma-Tenda)
8.	Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
9.	Program pengembangan distribusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta penguatan cadangan pangan	Dinas Pangan
10.	Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Dinas Pangan



11.	Program Pengembangan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah dan Rawa & Tambak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana		
1.	Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.	Program Pengelolaan pertambangan mineral	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
4.	Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	Program Pemanfaatan Potensial Sumberdaya Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.	Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam	Dinas Perikanan dan Kelautan
9.	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Program Kedaruratan Dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.	Program Pengendali Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah		
1.	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Program peningkatan layanan transportasi	Dinas Perhubungan
4.	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi	Dinas Perhubungan
5.	Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi	Dinas Perhubungan
6.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Diskominfo & Statistik
7.	Program Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan		
1.	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2.	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
3.	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
4.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
5.	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
6.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
7.	Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi



	Daerah	
8.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
9.	Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
10.	Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
11.	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
12.	Program Pengembangan Perdesaan	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
13.	Program Pengembangan kawasan Strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (khusus jalan strategis provinsi, akses pariwisata, pertanian, transmigrasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Serta Kawasan Perdesaan	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
16.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	Program Penataan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
18.	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Badan Keuangan
19.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
20.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
21.	Program Pengendalian Ekonomi	Biro Kesra dan Ekoomi
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan		
1.	Program Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga
2.	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga
3.	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga
4.	Program pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat		
1.	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
2.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan
4.	Program Peningkatan Mutu Fasyankes	Dinas Kesehatan
5.	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS	Dinas Kesehatan (RS Ainun Habibie)
6.	Peringkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS	Dinas Kesehatan (RS Ainun Habibie)



7.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan
8.	Program Peningkatan Layanan KB	Dinas Kesehatan
Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq		
1.	Program Pembinaan Kebudayaan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga
2.	Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya	Biro Kesejahteraan Rakyat
3.	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Menurunnya tingkat kemiskinan		
1.	Program Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
5.	Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
6.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan
7.	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Dinas Kesehatan
8.	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat & Ekonomi
9.	Program Pendidikan Untuk Rakyat	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga
10.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan (penyediaan listrik RT tidak mampu)	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
11.	Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak pembangunan Provinsi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
12.	Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman		
1.	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan provinsi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3.	Program Peningkatan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		
1.	Program Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Inspektorat
2.	Program Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah
3.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah
4.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen PNS	Badan Kepegawaian Daerah



5.	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pendidikan dan Pelatihan
6.	Program Peningkatan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur	Badan Pendidikan dan Pelatihan
7.	Program Pengembangan Kapasitas, Mutu dan Kerjasama Kediklatan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
8.	Program Pengembangan Aplikasi, Sistem Informasi & Jurnal Ilmiah Kediklatan	Badan Pendidikan dan Pelatihan
9.	Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pemajuan HAM	Biro Hukum dan Organisasi
10.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Biro Hukum dan Organisasi
11.	Program Penyelenggaraan Kearsipan	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
12.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo	Biro Umum
13.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo	Sekretariat DPRD
14.	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Sekretariat DPRD
15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
16.	Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas & Kebakaran
17.	Program Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Biro Hukum dan Organisasi
18.	Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Biro Hukum dan Organisasi
19.	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biro Hukum dan Organisasi
20.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Biro Humas dan Protokol
21.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat
22.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
23.	Program Pengembangan Data / Informasi	BAPPEDA
24.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
25.	Program pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Badan Keuangan Daerah
26.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
27.	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28.	Program Pengendalian Pembangunan	Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
29.	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
30.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Badan Penghubung
31.	Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas & Kebakaran
32.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum dan Organisasi
33.	Program Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan
34.	Program Penataan Wilayah Provinsi	Biro Pemerintahan
35.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	Biro Pemerintahan
36.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan PUG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
37.	Program Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak



38.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
39.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
40.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
41.	Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas & Kebakaran
42.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas & Kebakaran
43.	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	BAPPEDA
44.	Program Penataan MOU dan Perjanjian Kerja sama	Biro Hukum dan Organisasi
45.	Program penyelidikan dan pelayanan geologi	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
46.	Program Pengembangan Riset Daerah	BAPPEDA

Program prioritas daerah Provinsi Gorontalo juga mendukung sasaran pembangunan nasional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagaimana persandingan yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Program Prioritas Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi
1.	Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 2. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pendidikan Untuk Rakyat 4. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 5. Program pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca
2.	Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Jiwa 4. Program Peningkatan Mutu Fasyankes 5. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS 6. Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS 7. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 8. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.	Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi 2. Program Peningkatan Kawasan Permukiman 3. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi



4.	Revolusi Karakter Bangsa	1. Program Pendidikan Politik
5.	Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat restorasi sosial	1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6.	Revolusi Mental	1. Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 2. Program Pengembangan Aparatur 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen PNS 4. Program Pengembangan kapasitas, mutu dan kerjasama kediklatan 5. Program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional aparatur
7.	Kedaulatan Pangan	1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ populasi ternak Berkelanjutan 2. Program Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH) 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4. Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 6. Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 7. Program pengembangan distribusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta penguatan cadangan pangan 8. Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 9. Program Pengembangan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah dan Rawa & Tambak 10. Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah
8.	Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
9.	Kemaritiman	1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan 3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
10.	Industri	1. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
11.	Pariwisata	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM Pariwisata



		<ol style="list-style-type: none">4. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat Dan Budaya5. Program Pembinaan Kebudayaan6. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
12.	Inovasi dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Riset Daerah



BAB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 ini, rencana program yang disajikan adalah program prioritas setiap SKPD yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan utama dan potensi daerah dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022.

Untuk itu, diharapkan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Provinsi Gorontalo dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 mengacu pada program prioritas sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1 yang menjadi lampiran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 ini.



BAB VI PENUTUP

Demikian perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 ini disusun dalam rangka mengakomodir program kegiatan yang perlu disesuaikan atas dampak penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan dokumen tahun pertama dalam periodisasi RPJMD 2017 – 2022, yang mana RPJMD dimaksud menjadi tahap ketiga dalam periode RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2007 – 2022.

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

Tabel 5.1
Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	43,794,757,759.00	193,912,568,783.00	277,014,440,340.20	514,721,766,882.20
1.01	Pendidikan	30,315,000,000.00	70,501,147,964.00	53,909,858,186.00	154,726,006,150.00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	30,315,000,000.00	70,501,147,964.00	53,909,858,186.00	154,726,006,150.00
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Pendidikan)	3,259,800,000.00	3,417,352,000.00	1,256,898,000.00	7,934,050,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dikbudpora	3,065,760,000.00	2,364,965,000.00	0.00	5,430,725,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04	Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum Daerah)	194,040,000.00	310,377,000.00	0.00	504,417,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dikbudpora	0.00	160,000,000.00	1,044,148,000.00	1,204,148,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-Museum)	0.00	0.00	212,750,000.00	212,750,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi) Prov Gorontalo	0.00	465,200,000.00	0.00	465,200,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan Sosialisasi) pada UPTD-Museum Daerah	0.00	116,810,000.00	0.00	116,810,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi dan Penatausahaan Keuangan (Dinas Pendidikan)	0.00	3,062,790,000.00	0.00	3,062,790,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01	Kegiatan Perencanaan, Pendataan, Koordinasi, dan Pelaporan	0.00	1,660,585,000.00	0.00	1,660,585,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02	Monitoring dan Evaluasi Program	0.00	270,190,000.00	0.00	270,190,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	0.00	654,352,000.00	0.00	654,352,000.00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04	Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	0.00	477,663,000.00	0.00	477,663,000.00
1.01 . 1.01.01 . 03	Program Pendidikan Untuk Rakyat	0.00	3,784,078,950.00	0.00	3,784,078,950.00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01	Kegiatan Pemberian Bantuan Studi Bagi Mahasiswa Miskin dan atau Berprestasi	0.00	3,015,420,000.00	0.00	3,015,420,000.00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02	Kegiatan Penyiapan Penilaian Akreditasi sekolah	0.00	80,285,000.00	0.00	80,285,000.00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03	Kegiatan Lomba PAUDNI/Dikmas/ Dikdas Tingkat Provinsi	0.00	529,649,650.00	0.00	529,649,650.00
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05	Kegiatan Penyediaan Ujian Sekolah SD/MI, Paket A/UULA	0.00	158,724,300.00	0.00	158,724,300.00
1.01 . 1.01.01 . 04	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0.00	9,596,859,700.00	26,105,700,000.00	35,702,559,700.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01	Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA	0.00	20,495,000.00	2,500,000,000.00	2,520,495,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04	Kegiatan Revitalisasi /penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SLB	0.00	6,700,000.00	2,594,000,000.00	2,600,700,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 07	Kegiatan Penyediaan meubelair SMA/SLB	0.00	41,345,000.00	1,927,100,000.00	1,968,445,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 12	Kegiatan Boarding School SMA/SLB	0.00	3,552,525,000.00	0.00	3,552,525,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 14	Kegiatan Diklat Vokasi/Sertifikasi Bagi Siswa/Lulusan SMK	0.00	589,370,000.00	0.00	589,370,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 17	Kegiatan Penyediaan Media Pembelajaran/ Alat praktek dan alat peraga siswa SMA/SLB	0.00	5,950,000.00	4,950,000,000.00	4,955,950,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 18	Kegiatan Penyediaan Media Pembelajaran/ Alat praktek dan alat peraga siswa SMK	0.00	91,804,000.00	6,631,216,000.00	6,723,020,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 19	Kegiatan Pelatihan Proktor Ujian Sekolah/Madrasah	0.00	327,170,000.00	0.00	327,170,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 20	Pembinaan Minat Bakat/Kreatifitas/Prestasi Siswa SMA/SLB	0.00	1,335,445,000.00	0.00	1,335,445,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 21	Kegiatan Pembinaan Minat Bakat/Kreatifitas/Prestasi Siswa SMK	0.00	1,096,598,000.00	0.00	1,096,598,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 24	Kegiatan Pembangunan Ruang Praktek/ Laboratorium/ display SMK	0.00	73,416,000.00	3,343,784,000.00	3,417,200,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 27	Kegiatan Pelatihan/Bimtek Penerapan kurikulum 2013 SMA/SLB	0.00	279,350,000.00	0.00	279,350,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 28	Pelatihan/Bimtek Penerapan kurikulum 2013 SMK	0.00	560,169,000.00	0.00	560,169,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 29	Kegiatan Penyediaan Ujian Sekolah/Madrasah	0.00	289,890,700.00	0.00	289,890,700.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 35	Kegiatan Praktek kerja Industri SMK	0.00	1,326,632,000.00	0.00	1,326,632,000.00
1.01 . 1.01.01 . 04 . 37	Kegiatan Revitalisasi/lanjutan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK	0.00	0.00	617,600,000.00	617,600,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 04 . 38	Kegiatan Penyediaan meubelair SMK	0.00	0.00	3,542,000,000.00	3,542,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	27,055,200,000.00	1,437,527,500.00	0.00	28,492,727,500.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03	Kegiatan Pemberian Insentif/Tunjangan bagi guru dan tenaga kependidikan Non PNS	27,055,200,000.00	232,270,000.00	0.00	27,287,470,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06	Kegiatan Pemberian Beasiswa Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	0.00	701,000,000.00	0.00	701,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 08	Pelaksanaan Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik	0.00	504,257,500.00	0.00	504,257,500.00
1.01 . 1.01.01 . 61	Program Perluasan Akses Dikmen (DAK)	0.00	1,027,250,076.00	12,083,749,924.00	13,111,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 01	Peningkatan Akses Layanan SMK (DAK)	0.00	318,220,000.00	6,601,780,000.00	6,920,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 02	Peningkatan Akses Layanan SMA (DAK)	0.00	635,030,076.00	5,481,969,924.00	6,117,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 61 . 03	Peningkatan Akses Layanan SLB (DAK)	0.00	74,000,000.00	0.00	74,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 62	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ DAK Non Fisik	0.00	48,175,289,738.00	14,463,510,262.00	62,638,800,000.00
1.01 . 1.01.01 . 62 . 01	Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK/DIKSUS Negeri (DAK Non Fisik)	0.00	48,175,289,738.00	14,463,510,262.00	62,638,800,000.00
1.02	Kesehatan	3,564,160,000.00	65,475,079,804.00	36,891,525,000.20	105,930,764,804.20
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	3,564,160,000.00	65,475,079,804.00	36,891,525,000.20	105,930,764,804.20
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Kesehatan)	105,060,000.00	5,404,247,100.00	2,972,040,000.00	8,481,347,100.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	102,960,000.00	1,450,974,100.00	0.00	1,553,934,100.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Labkesda	2,100,000.00	212,720,000.00	0.00	214,820,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran RSUD Ainun Habibie	0.00	2,499,123,000.00	0.00	2,499,123,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dikes	0.00	294,050,000.00	610,322,000.00	904,372,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda	0.00	383,700,000.00	384,300,000.00	768,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ainun Habibie	0.00	0.00	1,977,418,000.00	1,977,418,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dikes	0.00	216,100,000.00	0.00	216,100,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD Labkesda	0.00	57,780,000.00	0.00	57,780,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur RSUD Ainun Habibie	0.00	289,800,000.00	0.00	289,800,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Kesehatan)	370,920,000.00	939,863,954.00	0.00	1,310,783,954.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	0.00	304,848,954.00	0.00	304,848,954.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02	Rakorev IKP dan IKK Dinas Kesehatan	81,840,000.00	112,700,000.00	0.00	194,540,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03	Diseminasi hasil riset kesehatan nasional dan isu-isu strategis kesehatan	0.00	121,890,000.00	0.00	121,890,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04	Forum Koordinasi Penyusunan Renja Dikes	80,520,000.00	79,355,000.00	0.00	159,875,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	Pemutakhiran data Profil Kesehatan	52,800,000.00	33,460,000.00	0.00	86,260,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06	Rapat Koordinasi Kepegawaian	80,520,000.00	90,740,000.00	0.00	171,260,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07	Penilaian Nakes Teladan Tingkat Provinsi	0.00	146,445,000.00	0.00	146,445,000.00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08	Penyusunan Laporan Keuangan dan TLHP	75,240,000.00	50,425,000.00	0.00	125,665,000.00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	109,560,000.00	354,594,000.00	0.00	464,154,000.00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Diseminasi dan informasi Road Map Penurunan AKI dan AKB	55,440,000.00	77,260,000.00	0.00	132,700,000.00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	KIE Kesehatan dan Akselerasi Penurunan AKI AKB ke Dunia Usaha dalam Pemanfaatan Dana CSR untuk Kesehatan	26,400,000.00	52,220,000.00	0.00	78,620,000.00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03	Pengawasan dan Penyehatan Lingkungan	27,720,000.00	225,114,000.00	0.00	252,834,000.00
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	211,200,000.00	1,689,470,500.00	0.00	1,900,670,500.00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01	Pendampingan Ibu hamil oleh Mitra dalam akselerasi penurunan AKI/AKB	105,600,000.00	1,152,920,000.00	0.00	1,258,520,000.00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	Penanganan Kegawat Daruratan Ibu & Bayi	27,720,000.00	45,545,000.00	0.00	73,265,000.00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Implementasi Pelaksanaan Kelas Balita	27,720,000.00	60,091,000.00	0.00	87,811,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			Jumlah 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	Pengadaan PMT Bumil KEK dan PMT Balita Kurang Gizi	50,160,000.00	430,914,500.00	0.00	481,074,500.00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Jiwa	286,680,000.00	1,412,000,000.00	0.00	1,698,680,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penemuan, Penanganan dan Pembinaan Tata Laksana Penyakit Menular	95,640,000.00	323,940,000.00	0.00	419,580,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Deteksi Dini Penyakit Hepatitis B & C pada Populasi Beresiko (ibu hamil)	0.00	51,360,000.00	0.00	51,360,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03	Sero Survey HIV/AIDS	27,720,000.00	72,280,000.00	0.00	100,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Orientasi petugas dalam deteksi dini penyakit menular pada ibu hamil	10,800,000.00	26,510,000.00	0.00	37,310,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Surveilans PD3I dan Monev Program Imunisasi	72,000,000.00	128,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Penyelidikan Epidemiologi KLB/Wabah Penyakit	52,800,000.00	272,200,000.00	0.00	325,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07	Sosialisasi Istioah Kesehatan Jemaah Haji	0.00	81,000,000.00	0.00	81,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Deteksi Dini faktor risiko PTM pada cantin dan ibu hamil	27,720,000.00	349,830,000.00	0.00	377,550,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Evaluasi Implementasi KTR dan IPWL Pecandu Narkotika yang Aktif	0.00	37,180,000.00	0.00	37,180,000.00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	0.00	69,700,000.00	0.00	69,700,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24	Program Peningkatan Mutu Fasyankes	354,480,000.00	1,329,242,000.00	0.00	1,683,722,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01	Workshop Akreditasi FKTP	0.00	117,924,000.00	0.00	117,924,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 02	Workshop Akreditasi FKTP	27,720,000.00	108,200,000.00	0.00	135,920,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 03	Visitasi Akreditasi FKTP	27,720,000.00	423,842,000.00	0.00	451,562,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04	Penguatan Kapasitas Program Pelayanan Kesehatan Primer	25,080,000.00	52,637,500.00	0.00	77,717,500.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 05	Pemetaan Sarana, Prasarana dan Alkes penunjang pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi sesuai standar di FKTP	27,720,000.00	62,022,500.00	0.00	89,742,500.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 06	Pencegahan dan Penanggulangan Risiko akibat krisis kesehatan	87,840,000.00	149,510,000.00	0.00	237,350,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 07	Rakor Pelayanan Kesehatan Tradisional dan pemetaan kearifan lokal Tanaman Berkhasiat Obat	79,200,000.00	70,800,000.00	0.00	150,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 08	Rakorev Peningkatan Mutu dan Akses pelayanan kesehatan di FKTL	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 09	Penguatan Manual Rujukan Ibu dan Bayi di Provinsi Gorontalo	79,200,000.00	189,200,000.00	0.00	268,400,000.00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 10	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	0.00	105,106,000.00	0.00	105,106,000.00
1.02 . 1.02.01 . 26	Orientasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	138,600,000.00	628,800,000.00	29,471,300,000.00	30,238,700,000.00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS	138,600,000.00	126,000,000.00	29,471,300,000.00	29,735,900,000.00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Rumah Sakit	0.00	502,800,000.00	0.00	502,800,000.00
1.02 . 1.02.01 . 28	Pemeliharaan Saspras RS	1,450,200,000.00	16,164,326,000.00	0.00	17,614,526,000.00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01	Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS	1,450,200,000.00	280,800,000.00	0.00	1,731,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 02	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	0.00	15,883,526,000.00	0.00	15,883,526,000.00
1.02 . 1.02.01 . 33	Pelayanan Medik RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	429,220,000.00	35,267,058,750.00	0.00	35,696,278,750.00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	373,780,000.00	492,613,000.00	0.00	866,393,000.00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02	Penanganan Keluhan JKN	0.00	307,300,000.00	0.00	307,300,000.00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03	Kebijakan Teknis Program Jamkesta	0.00	32,884,825,750.00	0.00	32,884,825,750.00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 05	Jamkesta	55,440,000.00	1,019,620,000.00	0.00	1,075,060,000.00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 06	Kerjasama Pelayanan Pasien Rujukan ke luar daerah dengan RS di Luar Provinsi Gorontalo	0.00	562,700,000.00	0.00	562,700,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34	Pelayanan Pasien Miskin/tidak mampu	108,240,000.00	447,149,500.00	0.00	555,389,500.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	55,440,000.00	44,172,000.00	0.00	99,612,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02	Pemetaan, perencanaan dan distribusi nakes di FKTP dan FKTL Tingkat Provinsi	52,800,000.00	47,259,000.00	0.00	100,059,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03	Sosialisasi peraturan dan kebijakan pelayanan kefarmasian di FKTP Tingkat Provinsi	0.00	138,903,000.00	0.00	138,903,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03	Orientasi pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota	0.00	85,972,500.00	0.00	85,972,500.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUM LAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05	Monitoring dan Evaluasi Sarana Produksi, Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan yang terjamin khasiat mutu dan keamanan	0.00	130,843,000.00	0.00	130,843,000.00
1.02 . 1.02.01 . 39	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi (DAK Fisik)	0.00	0.00	307,000,000.00	307,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 39 . 01	Sarana Prasarana Instalasi Farmasi (DAK Fisik)	0.00	0.00	307,000,000.00	307,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 42	Pelayanan Medik (DAK)	0.00	0.00	4,141,185,000.20	4,141,185,000.20
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01	Pelayanan Medik (UPTD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie) (DAK Fisik)	0.00	0.00	4,141,185,000.20	4,141,185,000.20
1.02 . 1.02.01 . 43	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	0.00	1,838,328,000.00	0.00	1,838,328,000.00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 01	BOK Provinsi (DAK Non Fisik)	0.00	1,662,918,000.00	0.00	1,662,918,000.00
1.02 . 1.02.01 . 43 . 02	Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik)	0.00	175,410,000.00	0.00	175,410,000.00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,897,440,000.00	20,398,745,376.00	182,178,952,154.00	207,475,137,530.00
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4,897,440,000.00	20,398,745,376.00	182,178,952,154.00	207,475,137,530.00
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas PU-PR)	578,000,000.00	1,971,018,982.00	0.00	2,549,018,982.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	276,600,000.00	1,685,995,982.00	0.00	1,962,595,982.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03	Bimbingan Teknis Serta Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi SDM Aparatur	301,400,000.00	135,023,000.00	0.00	436,423,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas PU-PR)	84,700,000.00	1,052,200,000.00	0.00	1,136,900,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01	Perencanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi	84,700,000.00	379,150,000.00	0.00	463,850,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02	Peningkatan Kinerja Penyusunan Program	0.00	473,050,000.00	0.00	473,050,000.00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 03	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD LABORATORIUM)	278,300,000.00	385,096,886.00	225,568,445.00	888,965,331.00
1.03 . 1.03.01 . 03 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium	278,300,000.00	198,784,596.00	0.00	477,084,596.00
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium	0.00	186,312,290.00	225,568,445.00	411,880,735.00
1.03 . 1.03.01 . 04	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD TPA TALUMELITO)	0.00	160,480,000.00	0.00	160,480,000.00
1.03 . 1.03.01 . 04 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD TPA Talumelito	0.00	160,480,000.00	0.00	160,480,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	677,380,000.00	2,982,001,998.00	117,423,000,000.00	121,082,381,998.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan	0.00	392,000,000.00	0.00	392,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02	Pembangunan Jalan Strategis Provinsi dan jalan menuju pariwisata, potensi pertanian dan daerah transmigrasi	0.00	58,550,000.00	29,813,000,000.00	29,871,550,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan Provinsi	0.00	70,300,000.00	42,350,000,000.00	42,420,300,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04	Pembangunan Jembatan Provinsi	0.00	23,725,000.00	2,800,000,000.00	2,823,725,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi	0.00	32,650,000.00	6,750,000,000.00	6,782,650,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan	0.00	258,200,000.00	3,300,000,000.00	3,558,200,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (DAK)	0.00	0.00	19,510,000,000.00	19,510,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08	Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi (Dau)	0.00	65,475,000.00	12,900,000,000.00	12,965,475,000.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09	Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi	0.00	289,751,998.00	0.00	289,751,998.00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi	677,380,000.00	1,791,350,000.00	0.00	2,468,730,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah dan Rawa & Tambak	1,597,860,000.00	1,936,395,493.00	4,846,710,000.00	8,380,965,493.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	1,585,320,000.00	1,329,339,750.00	1,500,000,000.00	4,414,659,750.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis Irigasi	0.00	481,450,000.00	0.00	481,450,000.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber Daya Air	0.00	72,855,743.00	0.00	72,855,743.00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04	Peningkatan Fungsi Jaringan Yang Telah Dibangun (DAK)	12,540,000.00	52,750,000.00	3,346,710,000.00	3,412,000,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi	343,200,000.00	1,976,842,500.00	17,675,000,000.00	19,995,042,500.00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	343,200,000.00	803,010,000.00	0.00	1,146,210,000.00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02	Pembangunan Prasarana Air Minum	0.00	69,350,000.00	13,600,000,000.00	13,669,350,000.00
1.03 . 1.03.01 . 27 . 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	0.00	1,104,482,500.00	4,075,000,000.00	5,179,482,500.00
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendali Banjir	0.00	1,432,450,000.00	6,500,000,000.00	7,932,450,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01	Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing	0.00	484,650,000.00	4,000,000,000.00	4,484,650,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 02	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	0.00	485,000,000.00	2,500,000,000.00	2,985,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air	0.00	462,800,000.00	0.00	462,800,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Kawasan Strategis	0.00	2,773,301,000.00	14,506,000,000.00	17,279,301,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis	0.00	685,705,000.00	0.00	685,705,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02	Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran Provinsi	0.00	68,900,000.00	8,006,000,000.00	8,074,900,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 03	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman	0.00	77,140,000.00	4,175,000,000.00	4,252,140,000.00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Umum	0.00	1,941,556,000.00	2,325,000,000.00	4,266,556,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	181,500,000.00	840,150,000.00	0.00	1,021,650,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01	Teknis Jasa Konstruksi	181,500,000.00	201,675,000.00	0.00	383,175,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02	Bina Jasa Konstruksi	0.00	278,070,000.00	0.00	278,070,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03	Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi	0.00	360,405,000.00	0.00	360,405,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	0.00	1,092,543,000.00	0.00	1,092,543,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01	Penyusunan Rencana Umum dan Rencana Rinci tata Ruang provinsi	0.00	352,738,000.00	0.00	352,738,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02	Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	0.00	284,310,000.00	0.00	284,310,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 03	Sosialisasi Produk Hukum bidang tata Ruang	0.00	233,745,000.00	0.00	233,745,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04	Koordinasi Pemanfaatan dan Legalisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang	0.00	221,750,000.00	0.00	221,750,000.00
1.03 . 1.03.01 . 33	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah UPTD TPA TALUMELITO	804,200,000.00	721,415,517.00	127,280,000.00	1,652,895,517.00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA	804,200,000.00	642,465,517.00	127,280,000.00	1,573,945,517.00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02	Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	0.00	78,950,000.00	0.00	78,950,000.00
1.03 . 1.03.01 . 34	Program Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum	352,300,000.00	3,074,850,000.00	20,875,393,709.00	24,302,543,709.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	352,300,000.00	3,074,850,000.00	20,875,393,709.00	24,302,543,709.00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	813,120,000.00	24,902,108,154.00	3,519,915,000.00	29,235,143,154.00
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	813,120,000.00	24,902,108,154.00	3,519,915,000.00	29,235,143,154.00
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN)	369,600,000.00	989,405,000.00	1,382,165,000.00	2,741,170,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	369,600,000.00	637,850,000.00	0.00	1,007,450,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran	0.00	101,555,000.00	1,382,165,000.00	1,483,720,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN)	0.00	1,421,036,760.00	0.00	1,421,036,760.00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	0.00	91,600,000.00	0.00	91,600,000.00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0.00	312,150,760.00	0.00	312,150,760.00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03	Peningkatan Kinerja Penyusunan Program	0.00	1,017,286,000.00	0.00	1,017,286,000.00
1.04 . 1.04.01 . 21	Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi	376,200,000.00	20,896,046,394.00	0.00	21,272,246,394.00

KODE 1	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
1.04 . 1.04.01 . 21 . 01	Penyusunan Perencanaan Teknis, Perumusan Kebijakan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Bidang Perumahan	0.00	385,997,500.00	0.00	385,997,500.00
1.04 . 1.04.01 . 21 . 02	Penyediaan Rumah Hunian layak bagi Masyarakat Miskin	376,200,000.00	19,637,022,500.00	0.00	20,013,222,500.00
1.04 . 1.04.01 . 21 . 03	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Hunian Layak bagi Korban Bencana Alam Provinsi dan dampak pembangunan Provinsi	0.00	205,000,000.00	0.00	205,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 21 . 04	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan bidang perumahan	0.00	668,026,394.00	0.00	668,026,394.00
1.04 . 1.04.01 . 22	Program Peningkatan Kawasan Permukiman	67,320,000.00	1,595,620,000.00	2,137,750,000.00	3,800,690,000.00
1.04 . 1.04.01 . 22 . 01	Pembangunan/peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	0.00	116,199,750.00	2,137,750,000.00	2,253,949,750.00
1.04 . 1.04.01 . 22 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan bidang permukiman	67,320,000.00	573,150,000.00	0.00	640,470,000.00
1.04 . 1.04.01 . 22 . 03	Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana kawasan permukiman	0.00	485,250,000.00	0.00	485,250,000.00
1.04 . 1.04.01 . 22 . 04	Advokasi dan Pembinaan masyarakat di kawasan permukiman kumuh provinsi	0.00	421,020,250.00	0.00	421,020,250.00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2,931,397,759.00	4,441,352,585.00	109,740,000.00	7,482,490,344.00
1.05 . 1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	332,730,000.00	2,513,270,169.00	34,500,000.00	2,880,500,169.00
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Kesbangpol)	34,200,000.00	483,717,259.00	34,500,000.00	552,417,259.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	34,200,000.00	256,211,259.00	0.00	290,411,259.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	134,306,000.00	34,500,000.00	168,806,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	0.00	93,200,000.00	0.00	93,200,000.00
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Kesbangpol)	89,040,000.00	171,137,259.00	0.00	260,177,259.00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 01	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo	61,320,000.00	88,680,000.00	0.00	150,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	27,720,000.00	82,457,259.00	0.00	110,177,259.00
1.05 . 1.05.01 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	55,440,000.00	738,904,000.00	0.00	794,344,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01	Koordinasi Dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Gorontalo	27,720,000.00	368,440,000.00	0.00	396,160,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03	Sosialisasi Kewaspadaan Dan Deteksi dini bagi pemuda dan pelajar terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme	0.00	75,235,000.00	0.00	75,235,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05	Fasilitasi Rapat Forkopimda	0.00	76,446,500.00	0.00	76,446,500.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 06	Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 07	Rapat Kerjasama Intelejen Dan Pencegahan Konflik Sosial Terorisisme	0.00	51,575,000.00	0.00	51,575,000.00
1.05 . 1.05.01 . 15 . 08	Pelatihan Dasar-Dasar Intelejen bagi Aparat Kesbang kab/kota Provisinsi Gorontalo	27,720,000.00	92,207,500.00	0.00	119,927,500.00
1.05 . 1.05.01 . 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	27,720,000.00	185,830,166.00	0.00	213,550,166.00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01	Rapat Koordinasi Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	0.00	53,060,166.00	0.00	53,060,166.00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02	Pemantapan Wawasan Kebangsaan, cinta Tanah Air Kesadaran Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Bagi Generasi Muda Dan Masyarakat	27,720,000.00	132,770,000.00	0.00	160,490,000.00
1.05 . 1.05.01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	101,250,000.00	515,482,678.00	0.00	616,732,678.00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01	Kajian Implementasi Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo	43,200,000.00	44,941,807.00	0.00	88,141,807.00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 02	BIMTEK Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Aparatur Kesbang Kab/Kota dan Parpol Serta Verifikasi bantuan Keuangan Parpol	32,970,000.00	55,171,807.00	0.00	88,141,807.00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 04	Penguatan Peran Politik bagi Perempuan	25,080,000.00	115,369,064.00	0.00	140,449,064.00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 05	Monitoring Dan Pemantauan Tahapan Pilkada Gubernur/Bupati/Walikota	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 21 . 06	Peningkatan Partisipasi Indeks Demokrasi	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 23	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat	25,080,000.00	280,503,807.00	0.00	305,583,807.00
1.05 . 1.05.01 . 23 . 01	Penguatan dan Verifikasi Kelembagaan LSM/ORMAS	25,080,000.00	86,048,750.00	0.00	111,128,750.00
1.05 . 1.05.01 . 23 . 03	Dialog dan Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)	0.00	73,045,057.00	0.00	73,045,057.00
1.05 . 1.05.01 . 23 . 05	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	0.00	56,775,000.00	0.00	56,775,000.00

KODE 1	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
1.05 . 1.05.01 . 23 . 23	Sosialisasi Pencegahan Praktek Prostitusi Perjudian dan Peredaran Miras	0.00	64,635,000.00	0.00	64,635,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah	0.00	137,695,000.00	0.00	137,695,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 01	Penyusunan Laporan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah	0.00	49,820,000.00	0.00	49,820,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 02	Dialog Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Daerah	0.00	87,875,000.00	0.00	87,875,000.00
1.05 . 4.01.09	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,598,667,759.00	1,928,082,416.00	75,240,000.00	4,601,990,175.00
1.05 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Satpol PP dan Linmas)	382,400,000.00	551,714,310.00	75,240,000.00	1,009,354,310.00
1.05 . 4.01.09 . 01 . 01	Kegiatan Pelayanan jasa administrasi perkantoran	382,400,000.00	122,341,310.00	0.00	504,741,310.00
1.05 . 4.01.09 . 01 . 02	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	343,173,000.00	75,240,000.00	418,413,000.00
1.05 . 4.01.09 . 01 . 03	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesekretariatan	0.00	86,200,000.00	0.00	86,200,000.00
1.05 . 4.01.09 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Satpol PP dan Linmas)	0.00	199,956,984.00	0.00	199,956,984.00
1.05 . 4.01.09 . 02 . 01	Kegiatan Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Keuangan	0.00	99,736,984.00	0.00	99,736,984.00
1.05 . 4.01.09 . 02 . 02	Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan lintas Kementerian/Lembaga	0.00	100,220,000.00	0.00	100,220,000.00
1.05 . 4.01.09 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	0.00	179,760,871.00	0.00	179,760,871.00
1.05 . 4.01.09 . 15 . 01	Penguatan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Pengangguran, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	0.00	53,400,000.00	0.00	53,400,000.00
1.05 . 4.01.09 . 15 . 02	Peningkatan Koordinasi dalam membangun Kemitraan Perlindungan Masyarakat dengan Kab/Kota	0.00	52,580,000.00	0.00	52,580,000.00
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03	Peringatan Dini/Deteksi Dini	0.00	57,838,371.00	0.00	57,838,371.00
1.05 . 4.01.09 . 15 . 04	Rapat Koordinasi pengamanan dan penanganan Pemilu dan Pemilukada	0.00	15,942,500.00	0.00	15,942,500.00
1.05 . 4.01.09 . 20	Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	0.00	545,368,119.00	0.00	545,368,119.00
1.05 . 4.01.09 . 20 . 01	Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,	0.00	113,508,119.00	0.00	113,508,119.00
1.05 . 4.01.09 . 20 . 02	Kegiatan Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0.00	95,750,000.00	0.00	95,750,000.00
1.05 . 4.01.09 . 20 . 03	Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk penyakit masyarakat (Pekat)	0.00	160,090,000.00	0.00	160,090,000.00
1.05 . 4.01.09 . 20 . 04	Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0.00	48,975,000.00	0.00	48,975,000.00
1.05 . 4.01.09 . 20 . 05	Rapat Koordinasi PPNS	0.00	127,045,000.00	0.00	127,045,000.00
1.05 . 4.01.09 . 25	Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	0.00	76,807,248.00	0.00	76,807,248.00
1.05 . 4.01.09 . 25 . 01	Kegiatan Fasilitas bahaya bencana kebakaran dan bencana lainnya	0.00	76,807,248.00	0.00	76,807,248.00
1.05 . 4.01.09 . 26	Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	2,216,267,759.00	374,474,884.00	0.00	2,590,742,643.00
1.05 . 4.01.09 . 26 . 01	Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	2,216,267,759.00	136,450,000.00	0.00	2,352,717,759.00
1.05 . 4.01.09 . 26 . 02	Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan hari-hari besar keagamaan	0.00	69,840,000.00	0.00	69,840,000.00
1.05 . 4.01.09 . 26 . 03	Patroli tempat-tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit, Rumah-rumah Jabatan	0.00	40,029,884.00	0.00	40,029,884.00
1.05 . 4.01.09 . 26 . 04	Apel Siaga Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo	0.00	60,055,000.00	0.00	60,055,000.00
1.05 . 4.01.09 . 26 . 05	Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP, Linmas dan Kebakaran dalam Penanganan Trantibum	0.00	68,100,000.00	0.00	68,100,000.00
1.06	Sosial	1,273,640,000.00	8,194,134,900.00	404,450,000.00	9,872,224,900.00
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	891,900,000.00	4,826,131,100.00	192,500,000.00	5,910,531,100.00
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)	0.00	1,131,768,600.00	192,500,000.00	1,324,268,600.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	0.00	517,659,000.00	0.00	517,659,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	507,759,600.00	192,500,000.00	700,259,600.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	0.00	106,350,000.00	0.00	106,350,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak)	225,720,000.00	593,616,000.00	0.00	819,336,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.06 . 1.06.01 . 02 . 01	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	50,160,000.00	79,436,000.00	0.00	129,596,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 02	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	150,480,000.00	455,960,000.00	0.00	606,440,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 03	Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (RASTRA)	25,080,000.00	58,220,000.00	0.00	83,300,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Sosial	334,920,000.00	843,066,500.00	0.00	1,177,986,500.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Fakir Miskin	0.00	110,900,000.00	0.00	110,900,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0.00	165,044,000.00	0.00	165,044,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	53,640,000.00	213,815,000.00	0.00	267,455,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Pembinaan Organisasi Kesejahteraan Sosial	1,020,000.00	148,980,000.00	0.00	150,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	278,220,000.00	76,367,500.00	0.00	354,587,500.00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Sosial	2,040,000.00	127,960,000.00	0.00	130,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Rehabilitasi Sosial	127,680,000.00	958,510,000.00	0.00	1,086,190,000.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO	13,200,000.00	228,200,000.00	0.00	241,400,000.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	114,480,000.00	281,570,000.00	0.00	396,050,000.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	0.00	95,840,000.00	0.00	95,840,000.00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Anak	0.00	352,900,000.00	0.00	352,900,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	165,240,000.00	802,510,000.00	0.00	967,750,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	90,000,000.00	366,750,000.00	0.00	456,750,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	0.00	345,000,000.00	0.00	345,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03	Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan PMKS	75,240,000.00	90,760,000.00	0.00	166,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Penanganan Fakir Miskin	38,340,000.00	496,660,000.00	0.00	535,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	3,900,000.00	196,100,000.00	0.00	200,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	28,440,000.00	196,560,000.00	0.00	225,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03	Penanganan Fakir Miskin Wilayah Pesisir	6,000,000.00	104,000,000.00	0.00	110,000,000.00
1.06 . 1.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	381,740,000.00	3,368,003,800.00	211,950,000.00	3,961,693,800.00
1.06 . 1.06.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (BPBD)	27,720,000.00	1,174,686,300.00	211,950,000.00	1,414,356,300.00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	27,720,000.00	497,280,000.00	0.00	525,000,000.00
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	677,406,300.00	211,950,000.00	889,356,300.00
1.06 . 1.06.02 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi Monitoring dan Pelaporan (BPBD)	125,400,000.00	449,800,000.00	0.00	575,200,000.00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 01	Penatausahaan dan laporan keuangan SKPD	50,160,000.00	108,040,000.00	0.00	158,200,000.00
1.06 . 1.06.02 . 02 . 02	Perencanaan Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Penguatan Kelembagaan	75,240,000.00	341,760,000.00	0.00	417,000,000.00
1.06 . 1.06.02 . 23	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	52,800,000.00	723,317,500.00	0.00	776,117,500.00
1.06 . 1.06.02 . 23 . 01	Fasilitasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	0.00	531,037,500.00	0.00	531,037,500.00
1.06 . 1.06.02 . 23 . 02	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	52,800,000.00	192,280,000.00	0.00	245,080,000.00
1.06 . 1.06.02 . 23 . 03	Penyusunan Dokumen RAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06 . 1.06.02 . 23 . 04	Identifikasi Kerawanan Bencana	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06 . 1.06.02 . 24	Program Kedaruratan Dan Logistik	128,040,000.00	560,360,000.00	0.00	688,400,000.00
1.06 . 1.06.02 . 24 . 01	PUSDALOPS PB (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana)	77,880,000.00	180,520,000.00	0.00	258,400,000.00
1.06 . 1.06.02 . 24 . 02	Optimalisasi Tim Reaksi Cepat (TRC)	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00
1.06 . 1.06.02 . 24 . 03	Penatausahaan Gudang Logistik dan peralatan serta SDM Bencana	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.06 . 1.06.02 . 24 . 04	Mobilisasi Sumber Daya Peralatan dan Logistik	50,160,000.00	249,840,000.00	0.00	300,000,000.00
1.06 . 1.06.02 . 25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	47,780,000.00	459,840,000.00	0.00	507,620,000.00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 01	JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)	5,000,000.00	85,000,000.00	0.00	90,000,000.00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 02	Inventarisasi Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana	0.00	49,470,000.00	0.00	49,470,000.00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 03	Sosialisasi Pemulihan Psikologi Pasca Bencana	16,000,000.00	114,000,000.00	0.00	130,000,000.00
1.06 . 1.06.02 . 25 . 04	Peningkatan Peran dan Partisipasi Lembaga/Ormas dan dunia usaha pasca bencana	26,780,000.00	211,370,000.00	0.00	238,150,000.00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	6,748,769,000.00	49,796,775,794.00	6,839,388,528.00	63,384,933,322.00
2.01	Tenaga Kerja	261,360,000.00	1,707,575,000.00	0.00	1,968,935,000.00
2.01 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI	261,360,000.00	1,707,575,000.00	0.00	1,968,935,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	105,600,000.00	1,199,000,000.00	0.00	1,304,600,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02	Pemagangan Berbasis Pengguna	26,400,000.00	702,400,000.00	0.00	728,800,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 03	Pemagangan Luar Negeri	79,200,000.00	496,600,000.00	0.00	575,800,000.00
2.01 . 2.12.01 . 18	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	79,200,000.00	122,675,000.00	0.00	201,875,000.00
2.01 . 2.12.01 . 18 . 01	Pengelolaan Layanan Informasi Pasar Kerja	79,200,000.00	122,675,000.00	0.00	201,875,000.00
2.01 . 2.12.01 . 19	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	52,800,000.00	312,510,000.00	0.00	365,310,000.00
2.01 . 2.12.01 . 19 . 01	Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
2.01 . 2.12.01 . 19 . 02	Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi	52,800,000.00	162,510,000.00	0.00	215,310,000.00
2.01 . 2.12.01 . 20	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	23,760,000.00	73,390,000.00	0.00	97,150,000.00
2.01 . 2.12.01 . 20 . 01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	23,760,000.00	73,390,000.00	0.00	97,150,000.00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175,874,000.00	853,903,500.00	0.00	1,029,777,500.00
2.02 . 1.06.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	175,874,000.00	853,903,500.00	0.00	1,029,777,500.00
2.02 . 1.06.01 . 23	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan PUG	79,790,000.00	404,910,000.00	0.00	484,700,000.00
2.02 . 1.06.01 . 23 . 01	Pemberian Bantuan Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) melalui Industri Rumahan	30,800,000.00	185,890,000.00	0.00	216,690,000.00
2.02 . 1.06.01 . 23 . 02	Pelatihan PPRG bagi Aparatur Pemerintah Daerah	39,980,000.00	199,530,000.00	0.00	239,510,000.00
2.02 . 1.06.01 . 23 . 04	Penyediaan data SIGA Daerah (Sistem Informasi Gender dan Anak)	9,010,000.00	19,490,000.00	0.00	28,500,000.00
2.02 . 1.06.01 . 24	Program Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	96,084,000.00	448,993,500.00	0.00	545,077,500.00
2.02 . 1.06.01 . 24 . 01	Bimbingan teknis implementasi pencapaian Kab/Kota layak anak	0.00	209,375,000.00	0.00	209,375,000.00
2.02 . 1.06.01 . 24 . 02	Layanan perlindungan khusus anak	0.00	77,975,000.00	0.00	77,975,000.00
2.02 . 1.06.01 . 24 . 03	penguatan kapasitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak	96,084,000.00	111,578,500.00	0.00	207,662,500.00
2.02 . 1.06.01 . 24 . 04	Sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	0.00	50,065,000.00	0.00	50,065,000.00
2.03	Pangan	785,090,000.00	2,977,540,255.00	31,000,000.00	3,793,630,255.00
2.03 . 2.03.01	DINAS PANGAN	785,090,000.00	2,977,540,255.00	31,000,000.00	3,793,630,255.00
2.03 . 2.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Pangan)	102,870,000.00	315,529,614.00	16,000,000.00	434,399,614.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	102,870,000.00	163,473,614.00	0.00	266,343,614.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	0.00	118,256,000.00	16,000,000.00	134,256,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	33,800,000.00	0.00	33,800,000.00
2.03 . 2.03.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Pangan)	120,780,000.00	371,033,000.00	0.00	491,813,000.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 01	Penyusunan Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	60,390,000.00	351,553,000.00	0.00	411,943,000.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 02	Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	60,390,000.00	19,480,000.00	0.00	79,870,000.00
2.03 . 2.03.01 . 15	Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	186,970,000.00	807,429,704.00	0.00	994,399,704.00

KODE 1	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01	Peningkatan Kapasitas Pengolah data (Prognosa HBKN, NBM, PPH&AKG, Pola Panen Bulanan, SKPG, FSVA dan Akses Pangan	15,000,000.00	130,940,913.00	0.00	145,940,913.00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02	Kios Akses Pangan Masyarakat				
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03	Penanganan Daerah Rawan Pangan	134,470,000.00	248,054,907.00	0.00	382,524,907.00
2.03 . 2.03.01 . 16	Program Pengembangan Distribusi, Pemantauan dan Stabilisasi Harga serta penguatan Cadangan Pangan	37,500,000.00	428,433,884.00	0.00	465,933,884.00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01	Penguatan Kelembagaan pangan Lokal (Gapoktan/Kelompok) dalam Upaya Stabilisasi Harga di Tingkat Produsen	167,080,000.00	742,569,072.00	0.00	909,649,072.00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02	Stabilisasi Harga pangan di Tingkat Konsumen	56,680,000.00	222,197,036.00	0.00	278,877,036.00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 03	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Dan Masyarakat	50,750,000.00	212,938,000.00	0.00	263,688,000.00
2.03 . 2.03.01 . 17	Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	59,650,000.00	307,434,036.00	0.00	367,084,036.00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	207,390,000.00	740,978,865.00	15,000,000.00	963,368,865.00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berdasarkan PPH	167,790,000.00	277,485,361.00	0.00	445,275,361.00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03	Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	0.00	226,617,082.00	0.00	226,617,082.00
2.05	Lingkungan Hidup	39,600,000.00	236,876,422.00	15,000,000.00	291,476,422.00
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2,080,720,000.00	6,837,886,376.00	1,474,849,500.00	10,393,455,876.00
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (DLHK)	2,080,720,000.00	6,837,886,376.00	1,474,849,500.00	10,393,455,876.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran (DLHK)	408,000,000.00	1,021,717,560.00	384,412,000.00	1,814,129,560.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran (DLHK)	263,280,000.00	369,475,000.00	0.00	632,755,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	0.00	168,220,000.00	196,900,000.00	365,120,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 04	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTALO BARAT	0.00	149,990,000.00	0.00	149,990,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05	Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTALO BARAT	31,800,000.00	30,905,000.00	0.00	62,705,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT III - POHUWATO	0.00	15,900,000.00	40,000,000.00	55,900,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT III - POHUWATO	32,400,000.00	30,100,000.00	0.00	62,500,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT IV - GORONTALO UTARA	0.00	12,000,000.00	40,312,000.00	52,312,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT IV - GORONTALO UTARA	42,240,000.00	25,600,000.00	0.00	67,840,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT V - BOALEMO	0.00	40,900,000.00	15,000,000.00	55,900,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT V - BOALEMO	18,480,000.00	34,690,000.00	0.00	53,170,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT VI - GORONTALO	0.00	15,500,000.00	28,200,000.00	43,700,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT VI - GORONTALO	10,800,000.00	27,755,000.00	0.00	38,555,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 14	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	0.00	34,522,560.00	28,800,000.00	63,322,560.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	9,000,000.00	42,060,000.00	0.00	51,060,000.00
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (DLHK)	0.00	24,100,000.00	35,200,000.00	59,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 01	Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DLHK)	285,120,000.00	590,279,675.00	0.00	875,399,675.00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 02	Penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan keuangan SKPD	234,960,000.00	490,439,675.00	0.00	725,399,675.00
2.05 . 2.05.01 . 03	Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	50,160,000.00	99,840,000.00	0.00	150,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 01	Hutan Manunggal	977,400,000.00	3,307,527,500.00	90,437,500.00	4,375,365,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02	Pembuatan Areal Model Agroforestri dan Hutan Rakyat	127,035,000.00	153,615,000.00	0.00	280,650,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 03	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas	39,000,000.00	251,500,000.00	0.00	290,500,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 04	Kelola Kawasan Perhutanan Sosial	242,460,000.00	744,190,000.00	0.00	986,650,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 05	Operasi Represif Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	78,585,000.00	413,620,000.00	0.00	492,205,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 06	Operasi Pengamanan & Perlindungan Hutan	22,800,000.00	82,730,000.00	0.00	105,530,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 07	Pembentukan wilayah Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis Zonasi (Zonasi Kawasan Ekonomi Esensial - KEE)	45,600,000.00	222,100,000.00	0.00	267,700,000.00
		27,720,000.00	77,180,000.00	0.00	104,900,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.05 . 2.05.01 . 03 . 08	Pengembangan HHBK pada Areal KPH UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTALO BARAT	9,900,000.00	105,662,500.00	40,987,500.00	156,550,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 09	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di Areal UPTD KPH UNIT I DAN II GORONTALO BARAT	48,300,000.00	104,900,000.00	0.00	153,200,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 10	Pengembangan HHBK pada Areal KPH UPTD KPH UNIT III - POHUWATO	19,125,000.00	134,530,000.00	0.00	153,655,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 11	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di Areal UPTD KPH UNIT III - POHUWATO	65,625,000.00	89,655,000.00	0.00	155,280,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 12	Pengembangan HHBK pada Areal KPH UPTD KPH UNIT IV - GORONTALO UTARA	20,250,000.00	123,200,000.00	0.00	143,450,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 13	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di Areal UPTD KPH UNIT IV - GORONTALO UTARA	66,750,000.00	75,525,000.00	0.00	142,275,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 14	Pengembangan HHBK pada Areal KPH UPTD KPH UNIT V - BOALEMO	0.00	141,400,000.00	0.00	141,400,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 15	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di Areal UPTD KPH UNIT V - BOALEMO	63,450,000.00	111,550,000.00	0.00	175,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 16	Pengembangan HHBK pada Areal KPH UPTD KPH UNIT VI - GORONTALO	0.00	103,850,000.00	49,450,000.00	153,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 17	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di Areal UPTD KPH UNIT VI - GORONTALO	60,750,000.00	100,000,000.00	0.00	160,750,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 18	Pengembangan HHBK pada Areal KPH UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	0.00	149,570,000.00	0.00	149,570,000.00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 19	Peningkatan Produktivitas Hutan & Lahan di Areal UPTD KPH UNIT VII - BONE BOLANGO & KOTA GORONTALO	40,050,000.00	122,750,000.00	0.00	162,800,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	105,600,000.00	994,351,000.00	0.00	1,099,951,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 01	Pemantauan Kualitas lingkungan (air & udara)	25,080,000.00	196,681,000.00	0.00	221,761,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 02	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan (Ijin lingkungan, PPA, PPU)	27,720,000.00	98,795,000.00	0.00	126,515,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 03	Pembinaan teknis pelaksanaan administrasi proses AMDAL, UKL-UPL & SPPL	0.00	88,150,000.00	0.00	88,150,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 04	Penyusunan dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Gorontalo	0.00	71,715,000.00	0.00	71,715,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 05	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan	0.00	72,080,000.00	0.00	72,080,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 06	Pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R	0.00	87,700,000.00	0.00	87,700,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 07	Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Provinsi Gorontalo	27,720,000.00	135,530,000.00	0.00	163,250,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 08	Pengumpulan pengolahan dan penyusunan data DIKPLHD; IKLH	25,080,000.00	109,020,000.00	0.00	134,100,000.00
2.05 . 2.05.01 . 04 . 09	Penyusunan Valuasi ekonomi pencemaran LH dan kerusakan SDA	0.00	134,680,000.00	0.00	134,680,000.00
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	216,960,000.00	380,400,641.00	0.00	597,360,641.00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01	Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan	74,340,000.00	83,020,641.00	0.00	157,360,641.00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02	Pengawasan dan Pengendalian Penatagunaan Kawasan Hutan	70,800,000.00	149,800,000.00	0.00	220,600,000.00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03	Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan (IPHHK/IPHHBK/IUIPHHK/Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan)	71,820,000.00	147,580,000.00	0.00	219,400,000.00
2.05 . 2.05.01 . 06	Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan	5,000,000.00	95,000,000.00	0.00	100,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01	Operasi Pemantauan dan Pengawasan Bidang Lingkungan	5,000,000.00	45,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02	Operasi Justice tindak pidana LHK	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	82,640,000.00	398,610,000.00	0.00	481,250,000.00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sempadan Sungai (POKJA SADAR KONSERVASI SUNGAI) dalam	27,720,000.00	108,530,000.00	0.00	136,250,000.00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 02	Pembinaan / Penilaian Adipura & Sekolah Adiwiyata	0.00	163,000,000.00	0.00	163,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 07 . 03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Penanaman Mangrove)	54,920,000.00	127,080,000.00	0.00	182,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 11	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DAK Fisik)	0.00	50,000,000.00	1,000,000,000.00	1,050,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 11 . 01	Pemantauan Kualitas Air Sungai secara Online (DAK Fisik)	0.00	50,000,000.00	1,000,000,000.00	1,050,000,000.00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Sipil	79,835,000.00	1,812,488,000.00	34,120,000.00	1,926,443,000.00
2.06 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL	79,835,000.00	1,812,488,000.00	34,120,000.00	1,926,443,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	1,955,000.00	1,732,688,000.00	0.00	1,734,643,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 01	Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	0.00	110,456,250.00	0.00	110,456,250.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 02	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota (DAK)	0.00	157,507,500.00	0.00	157,507,500.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.06 . 2.07.01 . 16 . 03	Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota (DAK)	0.00	68,795,250.00	0.00	68,795,250.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 04	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) (DAK)	425,000.00	225,863,000.00	0.00	226,288,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 05	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	0.00	163,250,000.00	0.00	163,250,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 06	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kab./Kota dalam mewujudkan Pelayanan Pencatatan Sipil yang Prima	0.00	115,741,000.00	0.00	115,741,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 07	Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	1,530,000.00	300,229,000.00	0.00	301,759,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 08	Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Aparat Desa/Kelurahan	0.00	362,370,000.00	0.00	362,370,000.00
2.06 . 2.07.01 . 16 . 09	Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun	0.00	228,476,000.00	0.00	228,476,000.00
2.06 . 2.07.01 . 20	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,880,000.00	79,800,000.00	34,120,000.00	191,800,000.00
2.06 . 2.07.01 . 20 . 01	Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06 . 2.07.01 . 20 . 02	Bimbingan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0.00	0.00	0.00	0.00
2.06 . 2.07.01 . 20 . 03	Pengembangan dan Pemanfaatan data Kependudukan	77,880,000.00	79,800,000.00	34,120,000.00	191,800,000.00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	779,700,000.00	8,464,719,317.00	71,372,000.00	9,315,791,317.00
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL	779,700,000.00	8,464,719,317.00	71,372,000.00	9,315,791,317.00
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas PMD, Adminduk dan Capil)	180,840,000.00	816,855,350.00	58,872,000.00	1,056,567,350.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	128,040,000.00	472,443,637.00	0.00	600,483,637.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	174,180,000.00	58,872,000.00	233,052,000.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 03	Peningkatan SDM Aparatur	0.00	129,515,000.00	0.00	129,515,000.00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 04	Penunjang Kegiatan TP PKK	52,800,000.00	40,716,713.00	0.00	93,516,713.00
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas PMD Adminduk dan Capil)	52,800,000.00	676,901,120.00	0.00	729,701,120.00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 01	Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan	0.00	596,681,120.00	0.00	596,681,120.00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 02	Peningkatan Kapasitas Kader Perencana Pembangunan Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03	Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	52,800,000.00	80,220,000.00	0.00	133,020,000.00
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Pengembangan Perdesaan	25,080,000.00	365,125,000.00	0.00	390,205,000.00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02	Evaluasi Perkembangan desa dan Kelurahan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03	Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo	25,080,000.00	365,125,000.00	0.00	390,205,000.00
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan serta kawasan perdesaan	130,680,000.00	1,261,750,287.00	0.00	1,392,430,287.00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01	Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Provinsi Gorontalo	0.00	139,000,000.00	0.00	139,000,000.00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02	Penguatan Kelembagaan BUMDES Kawasan Perdesaan	0.00	157,845,287.00	0.00	157,845,287.00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03	Peningkatan Kapasitas Kader Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan	50,160,000.00	146,500,000.00	0.00	196,660,000.00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 04	Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa Dan Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Perdesaan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05	Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat	25,080,000.00	178,670,000.00	0.00	203,750,000.00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 06	Pelatihan dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pendayagunaan TTT	0.00	184,625,000.00	0.00	184,625,000.00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07	Koordinasi dan Evaluasi Program GSC	0.00	158,250,000.00	0.00	158,250,000.00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09	Peningkatan Kapasitas BP-SPAMS	55,440,000.00	296,860,000.00	0.00	352,300,000.00
2.07 . 2.07.01 . 17	Program pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin	83,160,000.00	3,421,236,595.00	0.00	3,504,396,595.00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin	0.00	2,847,023,000.00	0.00	2,847,023,000.00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Poknas dan Bumdes untuk Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin	83,160,000.00	574,213,595.00	0.00	657,373,595.00

KODE 1	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
2.07 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	98,580,000.00	1,012,835,000.00	0.00	1,11 1,415,000.00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01	Pelatihan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	42,720,000.00	156,155,000.00	0.00	198,875,000.00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	29,250,000.00	316,865,000.00	0.00	346,115,000.00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03	Pembinaan dan Pengendalian Pendamping Dana Desa	765,000.00	341,160,000.00	0.00	34 1,525,000.00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	25,845,000.00	198,655,000.00	0.00	224,500,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19	Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)	208,560,000.00	910,015,965.00	12,500,000.00	1,13 1,075,965.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 01	Peningkatan Program Tertib Administrasi	208,560,000.00	427,815,965.00	12,500,000.00	648,875,965.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02	Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong	0.00	177,700,000.00	0.00	177,700,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi serta Pendidikan dan Keterampilan	0.00	101,500,000.00	0.00	10 1,500,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 04	Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	0.00	101,500,000.00	0.00	10 1,500,000.00
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05	Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat	0.00	101,500,000.00	0.00	10 1,500,000.00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	137,280,000.00	95,469,000.00	0.00	232,749,000.00
2.08 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	137,280,000.00	95,469,000.00	0.00	232,749,000.00
2.08 . 1.02.01 . 10	Program Peningkatan Layanan KB	137,280,000.00	95,469,000.00	0.00	232,749,000.00
2.08 . 1.02.01 . 10 . 01	Pelaksanaan Grand Desain Kependudukan Dalam pencapaian cakupan KB aktif	27,720,000.00	34,834,000.00	0.00	62,554,000.00
2.08 . 1.02.01 . 10 . 02	Orientasi KB Pasca Persalinan	55,440,000.00	12,165,000.00	0.00	67,605,000.00
2.08 . 1.02.01 . 10 . 03	Orientasi Fasilitator Kesehatan Reproduksi Remaja	54,120,000.00	48,470,000.00	0.00	102,590,000.00
2.09	Perhubungan	495,000,000.00	3,496,709,714.00	570,740,000.00	4,562,449,714.00
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	495,000,000.00	3,496,709,714.00	570,740,000.00	4,562,449,714.00
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Perhubungan)	0.00	1,032,703,400.00	102,060,000.00	1,134,763,400.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	0.00	351,560,000.00	0.00	351,560,000.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	590,743,400.00	102,060,000.00	692,803,400.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	0.00	90,400,000.00	0.00	90,400,000.00
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi Monitoring dan Pelaporan (Perhubungan)	186,120,000.00	471,645,000.00	0.00	657,765,000.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01	Perencanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi	158,400,000.00	433,095,000.00	0.00	591,495,000.00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan pengelolaan Keuangan OPD	27,720,000.00	38,550,000.00	0.00	66,270,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17	Program peningkatan layanan transportasi	105,600,000.00	1,560,700,000.00	0.00	1,666,300,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03	Penyusunan Masterplan dan DED Terminal Tipe B	0.00	504,000,000.00	0.00	504,000,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05	Pengadaan Aplikasi Layanan Publik	27,720,000.00	0.00	0.00	27,720,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08	Pembinaan dan Penertiban	25,080,000.00	238,180,000.00	0.00	263,260,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09	Pelayanan Angkutan Perintis	0.00	789,570,000.00	0.00	789,570,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10	Penyusunan Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Angkutan tidak dalam trayek	52,800,000.00	28,950,000.00	0.00	81,750,000.00
2.09 . 2.09.01 . 18	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi	203,280,000.00	285,967,500.00	0.00	489,247,500.00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01	Dukungan Kelancaran Transportasi	175,560,000.00	128,605,000.00	0.00	304,165,000.00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Koordinasi dan Kerjasama pengembangan saptas perhubungan	27,720,000.00	157,362,500.00	0.00	185,082,500.00
2.09 . 2.09.01 . 19	Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi	0.00	145,693,814.00	468,680,000.00	614,373,814.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ	0.00	120,050,000.00	468,680,000.00	588,730,000.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Sosialisasi Keselamatan Transportasi	0.00	25,643,814.00	0.00	25,643,814.00
2.10	Komunikasi dan Informatika	319,440,000.00	4,219,782,315.00	3,190,203,500.00	7,729,425,815.00
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	319,440,000.00	4,219,782,315.00	3,190,203,500.00	7,729,425,815.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Kominfo)	52,800,000.00	1,157,446,500.00	2,233,153,500.00	3,443,400,000.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	52,800,000.00	415,120,500.00	0.00	467,920,500.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	395,026,000.00	2,233,153,500.00	2,628,179,500.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03	Peningkatan SDM Aparatur	0.00	347,300,000.00	0.00	347,300,000.00
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Kominfo)	27,720,000.00	117,780,000.00	0.00	145,500,000.00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 01	Penatausahaan dan Laporan Keuangan OPD	27,720,000.00	117,780,000.00	0.00	145,500,000.00
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa	238,920,000.00	2,944,555,815.00	957,050,000.00	4,140,525,815.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01	Layanan Infrastruktur TIK Provinsi	104,280,000.00	2,175,795,815.00	857,050,000.00	3,137,125,815.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	Infrastruktur Persandian Daerah	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	Pengelolaan dan Layanan Data Informasi Sistem E-Government	26,400,000.00	198,975,000.00	0.00	225,375,000.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Website Seluruh OPD	54,120,000.00	149,070,000.00	0.00	203,190,000.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05	Layanan Komunikasi Publik	27,720,000.00	181,980,000.00	0.00	209,700,000.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Layanan Informasi	0.00	44,825,000.00	0.00	44,825,000.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 07	Pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan media tradisional	0.00	49,400,000.00	0.00	49,400,000.00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah	26,400,000.00	144,510,000.00	0.00	170,910,000.00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	238,800,000.00	5,692,066,582.00	464,315,000.00	6,395,181,582.00
2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	238,800,000.00	5,692,066,582.00	464,315,000.00	6,395,181,582.00
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	174,000,000.00	867,141,582.00	464,315,000.00	1,505,456,582.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	Pelayanan jasa administrasi perkantoran	121,200,000.00	569,941,582.00	0.00	691,141,582.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	0.00	50,000,000.00	464,315,000.00	514,315,000.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB	52,800,000.00	97,200,000.00	0.00	150,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Kumperindag)	0.00	836,100,000.00	0.00	836,100,000.00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 01	Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan	0.00	778,200,000.00	0.00	778,200,000.00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 02	Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD	0.00	57,900,000.00	0.00	57,900,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	56,400,000.00	546,175,000.00	0.00	602,575,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04 . 01	Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi	0.00	90,875,000.00	0.00	90,875,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04 . 02	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	900,000.00	215,325,000.00	0.00	216,225,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04 . 03	Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan Bagi KUKM	30,420,000.00	149,980,000.00	0.00	180,400,000.00
2.11 . 2.11.01 . 04 . 04	Pengembangan Layanan Usaha KUKM	25,080,000.00	89,995,000.00	0.00	115,075,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	8,400,000.00	942,650,000.00	0.00	951,050,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01	Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UMKM	0.00	228,900,000.00	0.00	228,900,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 02	Pembinaan UMKM Naik Kelas	6,000,000.00	151,900,000.00	0.00	157,900,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 03	Lomba Inovasi/UMKM Model dan Percontohan Daerah	2,400,000.00	197,600,000.00	0.00	200,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 04	Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UKM/IKM	0.00	126,750,000.00	0.00	126,750,000.00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05	Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	0.00	237,500,000.00	0.00	237,500,000.00
2.11 . 2.11.01 . 13	Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan (DAK)	0.00	2,500,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 13 . 01	Peningkatan Kapasitas SDM UMKM (DAK)	0.00	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 13 . 02	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi (DAK)	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
2.12	Penanaman Modal	794,040,000.00	2,826,657,000.00	497,900,000.00	4,118,597,000.00

KODE 1	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI	794,040,000.00	2,826,657,000.00	497,900,000.00	4,118,597,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Penanaman Modal, ESDM dan transmigrasi)	295,800,000.00	1,122,790,250.00	497,900,000.00	1,916,490,250.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	243,000,000.00	418,920,000.00	0.00	661,920,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	429,470,250.00	497,900,000.00	927,370,250.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03	Peningkatan Kualitas SDM	0.00	129,200,000.00	0.00	129,200,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	Pelayanan Jasa Administrasi BLK Perkantoran BLK	52,800,000.00	145,200,000.00	0.00	198,000,000.00
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Penanaman Modal, ESDM dan transmigrasi)	0.00	496,090,000.00	0.00	496,090,000.00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	0.00	389,200,000.00	0.00	389,200,000.00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	0.00	106,890,000.00	0.00	106,890,000.00
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	22,440,000.00	412,756,750.00	0.00	435,196,750.00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01	Promosi Investasi	22,440,000.00	221,598,250.00	0.00	244,038,250.00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02	Identifikasi Potensi Investasi	0.00	191,158,500.00	0.00	191,158,500.00
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	26,400,000.00	262,900,000.00	0.00	289,300,000.00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01	Penyelenggaraan PTSP	26,400,000.00	135,625,000.00	0.00	162,025,000.00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0.00	127,275,000.00	0.00	127,275,000.00
2.12 . 2.12.01 . 21	Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah	449,400,000.00	532,120,000.00	0.00	981,520,000.00
2.12 . 2.12.01 . 21 . 01	Pemanfaatan Potensi Air Tanah	449,400,000.00	375,520,000.00	0.00	824,920,000.00
2.12 . 2.12.01 . 21 . 02	Survey Potensi Air Tanah	0.00	156,600,000.00	0.00	156,600,000.00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	53,650,000.00	6,432,487,000.00	0.00	6,486,137,000.00
2.13 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	53,650,000.00	6,432,487,000.00	0.00	6,486,137,000.00
2.13 . 1.01.01 . 01	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	53,650,000.00	6,432,487,000.00	0.00	6,486,137,000.00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dan Kepanduan	8,075,000.00	177,840,000.00	0.00	185,915,000.00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 02	Kegiatan Penyiapan dan Pelatihan paskibraka	41,225,000.00	1,138,902,500.00	0.00	1,180,127,500.00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 03	Kegiatan seleksi PPAN,PPAP, Kirab Pemuda, Pemuda kreatif dan KPN Nasional dan Internasional	2,550,000.00	234,650,000.00	0.00	237,200,000.00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 06	Kegiatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional/Nasional/Internasional	0.00	1,617,212,500.00	0.00	1,617,212,500.00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 07	Kegiatan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	0.00	2,745,682,000.00	0.00	2,745,682,000.00
2.13 . 1.01.01 . 01 . 09	Kegiatan Pembinaan Olahraga Tradisional	1,800,000.00	518,200,000.00	0.00	520,000,000.00
2.14	Statistik	108,240,000.00	376,301,847.00	0.00	484,541,847.00
2.14 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	108,240,000.00	376,301,847.00	0.00	484,541,847.00
2.14 . 2.10.01 . 20	Program Pengembangan Data / Informasi	108,240,000.00	376,301,847.00	0.00	484,541,847.00
2.14 . 2.10.01 . 20 . 01	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Pembangunan Provinsi Gorontalo	80,520,000.00	304,621,847.00	0.00	385,141,847.00
2.14 . 2.10.01 . 20 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Data Sektor di OPD	27,720,000.00	71,680,000.00	0.00	99,400,000.00
2.16	Kebudayaan	368,160,000.00	2,935,174,712.00	504,888,528.00	3,808,223,240.00
2.16 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0.00	2,198,955,000.00	158,500,000.00	2,357,455,000.00
2.16 . 1.01.01 . 01	Program Pembinaan Kebudayaan	0.00	2,198,955,000.00	158,500,000.00	2,357,455,000.00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 02	Kegiatan sertifikasi Ahli Cagar Budaya	0.00	181,600,000.00	0.00	181,600,000.00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 04	Jelajah Budaya Gorontalo	0.00	132,830,000.00	0.00	132,830,000.00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 07	Kegiatan Pendokumentasian adat/tradisi dan nilai budaya Gorontalo	0.00	215,150,000.00	0.00	215,150,000.00
2.16 . 1.01.01 . 01 . 08	Kegiatan Apresiasi Seni dan Budaya	0.00	1,669,375,000.00	0.00	1,669,375,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.16 . 1.01.01 . 01 . 09	Kegiatan Penyediaan Alat Kesenian Komunitas Kebudayaan	0.00	0.00	158,500,000.00	158,500,000.00
2.16 . 2.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	368,160,000.00	736,219,712.00	346,388,528.00	1,450,768,240.00
2.16 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Kearsipan)	368,160,000.00	542,069,712.00	346,388,528.00	1,256,618,240.00
2.16 . 2.17.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	368,160,000.00	407,069,712.00	0.00	775,229,712.00
2.16 . 2.17.01 . 01 . 02	Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	0.00	346,388,528.00	346,388,528.00
2.16 . 2.17.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00
2.16 . 2.17.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Kearsipan)	0.00	194,150,000.00	0.00	194,150,000.00
2.16 . 2.17.01 . 02 . 01	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan dan Perpustakaan	0.00	156,650,000.00	0.00	156,650,000.00
2.16 . 2.17.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	0.00	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00
2.17	Perpustakaan	71,580,000.00	1,068,015,176.00	0.00	1,139,595,176.00
2.17 . 2.17.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	71,580,000.00	1,068,015,176.00	0.00	1,139,595,176.00
2.17 . 2.17.01 . 04	Program pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	21,660,000.00	666,760,176.00	0.00	688,420,176.00
2.17 . 2.17.01 . 04 . 01	Kemah Bakti Literasi	1,500,000.00	255,810,000.00	0.00	257,310,000.00
2.17 . 2.17.01 . 04 . 03	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Pustakawan	20,160,000.00	98,025,000.00	0.00	118,185,000.00
2.17 . 2.17.01 . 04 . 04	Pelestarian Karya Cetak dan Penelusuran Bibliografi/Katalog Induk Daerah (BID/KID)	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
2.17 . 2.17.01 . 04 . 05	Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	0.00	162,925,176.00	0.00	162,925,176.00
2.17 . 2.17.01 . 18	Program Penyelenggaraan Kearsipan	49,920,000.00	401,255,000.00	0.00	451,175,000.00
2.17 . 2.17.01 . 18 . 01	Penelusuran, Penyelamatan dan Penduplikasian Dokumen Arsip Berbasis TIK	49,920,000.00	131,255,000.00	0.00	181,175,000.00
2.17 . 2.17.01 . 18 . 02	Jadwal Retensi Arsip dan Akuisisi Arsip	0.00	51,370,000.00	0.00	51,370,000.00
2.17 . 2.17.01 . 18 . 03	Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	0.00	153,060,000.00	0.00	153,060,000.00
2.17 . 2.17.01 . 18 . 04	Pameran Kearsipan	0.00	0.00	0.00	0.00
2.17 . 2.17.01 . 18 . 05	Bimtek Pengelolaan Kearsipan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	0.00	65,570,000.00	0.00	65,570,000.00
3	Urusan Pilihan	8,550,120,000.00	82,347,488,811.00	33,045,314,494.00	123,942,923,305.00
3.01	Kelautan dan Perikanan	2,075,940,000.00	18,212,533,301.00	11,810,042,494.00	32,098,515,795.00
3.01 . 3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,075,940,000.00	18,212,533,301.00	11,810,042,494.00	32,098,515,795.00
3.01 . 3.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Kelautan dan Perikanan)	672,960,000.00	1,022,910,301.00	292,109,179.00	1,987,979,480.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	672,960,000.00	423,859,500.00	0.00	1,096,819,500.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	Peningkatan SDM Aparatur	0.00	136,840,000.00	0.00	136,840,000.00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	462,210,801.00	292,109,179.00	754,319,980.00
3.01 . 3.01.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Kelautan dan Perikanan)	0.00	619,360,000.00	0.00	619,360,000.00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	0.00	491,240,000.00	0.00	491,240,000.00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 02	Penyelenggaraan Keuangan SKPD	0.00	128,120,000.00	0.00	128,120,000.00
3.01 . 3.01.01 . 03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau)	881,400,000.00	455,835,000.00	106,500,000.00	1,443,735,000.00
3.01 . 3.01.01 . 03 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD. Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau)	881,400,000.00	323,435,000.00	0.00	1,204,835,000.00
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD. Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau)	0.00	132,400,000.00	106,500,000.00	238,900,000.00
3.01 . 3.01.01 . 04	Program Pelayanan Administrasi Sarpras dan SDM Aparatur (UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan)	102,960,000.00	152,165,000.00	0.00	255,125,000.00
3.01 . 3.01.01 . 04 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD. BP2MDPP)	102,960,000.00	86,115,000.00	0.00	189,075,000.00
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD. BP2MDPP)	0.00	66,050,000.00	0.00	66,050,000.00
3.01 . 3.01.01 . 06	Program Pelayanan Administrasi Sarpras dan SDM Aparatur (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	318,240,000.00	156,804,000.00	56,250,000.00	531,294,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD. PP Tenda)	318,240,000.00	115,966,000.00	0.00	434,206,000.00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD PP. Tenda)	0.00	40,838,000.00	56,250,000.00	97,088,000.00
3.01 . 3.01.01 . 07	Program Pelayanan Administrasi Sarpras dan SDM Aparatur (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	59,280,000.00	103,334,000.00	88,450,000.00	251,064,000.00
3.01 . 3.01.01 . 07 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD. PP Gentuma)	59,280,000.00	68,536,000.00	0.00	127,816,000.00
3.01 . 3.01.01 . 07 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD. PP Gentuma)	0.00	34,798,000.00	88,450,000.00	123,248,000.00
3.01 . 3.01.01 . 16	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	1,500,000.00	444,125,000.00	0.00	445,625,000.00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 04	Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas Perikanan	0.00	79,250,000.00	0.00	79,250,000.00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 05	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1,500,000.00	123,115,000.00	0.00	124,615,000.00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 06	Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas/Speed Pengawas	0.00	241,760,000.00	0.00	241,760,000.00
3.01 . 3.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	0.00	383,420,000.00	0.00	383,420,000.00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 01	Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0.00	285,600,000.00	0.00	285,600,000.00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut	0.00	30,360,000.00	0.00	30,360,000.00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0.00	67,460,000.00	0.00	67,460,000.00
3.01 . 3.01.01 . 20	Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0.00	625,720,000.00	0.00	625,720,000.00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01	Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Payau	0.00	386,000,000.00	0.00	386,000,000.00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02	Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Laut	0.00	103,700,000.00	0.00	103,700,000.00
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03	Kegiatan Peningkatan Kemitraan Pelaku Usaha Perikanan	0.00	136,020,000.00	0.00	136,020,000.00
3.01 . 3.01.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	0.00	7,042,280,000.00	0.00	7,042,280,000.00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	0.00	6,832,260,000.00	0.00	6,832,260,000.00
3.01 . 3.01.01 . 21 . 02	Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	0.00	210,020,000.00	0.00	210,020,000.00
3.01 . 3.01.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	0.00	5,122,555,000.00	0.00	5,122,555,000.00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 01	Peningkatan Jaminan Mutu dan Daya Saing Komoditi Perikanan	0.00	2,807,510,000.00	0.00	2,807,510,000.00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02	Penguatan Sistem Logistik Ikan Nasional	0.00	1,818,400,000.00	0.00	1,818,400,000.00
3.01 . 3.01.01 . 23 . 03	Peningkatan Kemitraan Pelaku Usaha dan Sistem Pemasaran Hasil Perikanan	0.00	496,645,000.00	0.00	496,645,000.00
3.01 . 3.01.01 . 25	Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan)	0.00	199,255,000.00	0.00	199,255,000.00
3.01 . 3.01.01 . 25 . 01	Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)	0.00	199,255,000.00	0.00	199,255,000.00
3.01 . 3.01.01 . 26	Program Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis (UPTD-Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau)	0.00	871,925,000.00	15,000,000.00	886,925,000.00
3.01 . 3.01.01 . 26 . 01	Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD. Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau)	0.00	871,925,000.00	15,000,000.00	886,925,000.00
3.01 . 3.01.01 . 27	Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	39,600,000.00	474,645,000.00	46,733,315.00	560,978,315.00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 01	Penyediaan Sarana Penunjang Kepelabuhanan (UPTD PP. Tenda)	0.00	27,800,000.00	46,733,315.00	74,533,315.00
3.01 . 3.01.01 . 27 . 02	Peningkatan Mutu Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD PP. Tenda)	39,600,000.00	446,845,000.00	0.00	486,445,000.00
3.01 . 3.01.01 . 28	Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	0.00	70,200,000.00	30,000,000.00	100,200,000.00
3.01 . 3.01.01 . 28 . 01	Peningkatan Mutu Pelayanan Kepelabuhanan (UPTD PP. Gentuma)	0.00	70,200,000.00	30,000,000.00	100,200,000.00
3.01 . 3.01.01 . 29	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)	0.00	468,000,000.00	11,175,000,000.00	11,643,000,000.00
3.01 . 3.01.01 . 29 . 04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)	0.00	468,000,000.00	11,175,000,000.00	11,643,000,000.00
3.02	Pariwisata	525,800,000.00	7,927,301,206.00	142,400,000.00	8,595,501,206.00
3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA	525,800,000.00	7,927,301,206.00	142,400,000.00	8,595,501,206.00
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Pariwisata)	75,240,000.00	754,252,468.00	142,400,000.00	971,892,468.00

KODE 1	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2	JENIS BELANJA			
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	75,240,000.00	358,123,968.00	0.00	433,363,968.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	307,853,500.00	142,400,000.00	450,253,500.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	88,275,000.00	0.00	88,275,000.00
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Pariwisata)	52,800,000.00	386,925,000.00	0.00	439,725,000.00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	0.00	322,425,000.00	0.00	322,425,000.00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	52,800,000.00	64,500,000.00	0.00	117,300,000.00
3.02 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	113,240,000.00	3,862,660,721.00	0.00	3,975,900,721.00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01	Penyiapan Strategi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0.00	596,832,950.00	0.00	596,832,950.00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Promosi Potensi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	27,720,000.00	760,450,000.00	0.00	788,170,000.00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	Pengolahan Data dan Informasi Pariwisata	80,520,000.00	548,050,000.00	0.00	628,570,000.00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	Pengembangan Promosi Seni Budaya Pariwisata	5,000,000.00	1,957,327,771.00	0.00	1,962,327,771.00
3.02 . 3.02.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	204,000,000.00	669,606,499.00	0.00	873,606,499.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01	Penataan Obyek Wisata Provinsi Gorontalo	152,520,000.00	356,770,749.00	0.00	509,290,749.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Perencanaan Obyek Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat	26,400,000.00	61,895,000.00	0.00	88,295,000.00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 03	Pembinaan Industri Pariwisata	25,080,000.00	250,940,750.00	0.00	276,020,750.00
3.02 . 3.02.01 . 17	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM Pariwisata	80,520,000.00	589,856,518.00	0.00	670,376,518.00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01	Pengembangan Kawasan Kreatif Potensial	27,720,000.00	230,802,000.00	0.00	258,522,000.00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02	Penguatan Kelembagaan Kepariwisata	25,080,000.00	172,024,518.00	0.00	197,104,518.00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03	Pengembangan SDM Pariwisata	27,720,000.00	187,030,000.00	0.00	214,750,000.00
3.02 . 3.02.01 . 20	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (DAK)	0.00	1,664,000,000.00	0.00	1,664,000,000.00
3.02 . 3.02.01 . 20 . 01	Penataan Amenitas Pariwisata (DAK)	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
3.02 . 3.02.01 . 20 . 02	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	0.00	664,000,000.00	0.00	664,000,000.00
3.03	Pertanian	4,673,820,000.00	25,259,653,262.00	11,224,872,000.00	41,158,345,262.00
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	4,673,820,000.00	25,259,653,262.00	11,224,872,000.00	41,158,345,262.00
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas Pertanian)	415,800,000.00	3,101,243,300.00	176,000,000.00	3,693,043,300.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Dinas Pertanian)	318,780,000.00	944,277,950.00	0.00	1,263,057,950.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PPSBP)	13,860,000.00	520,959,000.00	4,500,000.00	539,319,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPTP)	13,860,000.00	448,383,000.00	0.00	462,243,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Balai Perbibitan Ternak)	13,860,000.00	222,619,750.00	0.00	236,479,750.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08	Peningkatan sarana prasarana perkantoran	0.00	214,700,000.00	171,500,000.00	386,200,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pertanian	0.00	282,520,000.00	0.00	282,520,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian)	55,440,000.00	306,138,600.00	0.00	361,578,600.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Laboratorium Veteriner)	0.00	161,645,000.00	0.00	161,645,000.00
3.03 . 3.03.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Dinas Pertanian)	445,440,000.00	1,125,624,632.00	0.00	1,571,064,632.00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 01	Perencanaan Koordinasi Program, Monitoring Dan Evaluasi	97,020,000.00	653,136,550.00	0.00	750,156,550.00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	41,580,000.00	88,760,000.00	0.00	130,340,000.00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03	Penyusunan Data Statistik dan Sistem Informasi Pertanian	306,840,000.00	383,728,082.00	0.00	690,568,082.00
3.03 . 3.03.01 . 19	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Populasi Ternak berkelanjutan	3,660,120,000.00	20,268,768,830.00	24,825,000.00	23,953,713,830.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01	Penyediaan benih padi dan jagung	138,600,000.00	4,349,680,000.00	0.00	4,488,280,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	Penyediaan benih kacang-kacangan, umbi-umbian dan pupuk	27,720,000.00	169,915,000.00	0.00	197,635,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	Produksi Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan	214,920,000.00	87,640,000.00	0.00	302,560,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 04	Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	138,600,000.00	140,200,000.00	0.00	278,800,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	193,680,000.00	155,259,000.00	0.00	348,939,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 06	Penyediaan benih Sayuran, biofarmaka dan pupuk	69,300,000.00	804,825,000.00	0.00	874,125,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07	Penyediaan benih Buah	45,360,000.00	89,645,000.00	0.00	135,005,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08	Penyediaan Benih/Bibit Unggul hortikultura	177,940,000.00	180,380,000.00	0.00	358,320,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09	Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT hortikultura	99,960,000.00	120,105,000.00	0.00	220,065,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 10	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih/bibit Hortikultura	92,285,000.00	101,230,000.00	0.00	193,515,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 11	Penyediaan benih/bibit Tanaman Semusim, Rempah dan pupuk	69,300,000.00	253,200,000.00	0.00	322,500,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 12	Penyediaan benih/bibit tanaman tahunan, penyegar dan pupuk	69,300,000.00	346,575,000.00	0.00	415,875,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 13	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	27,720,000.00	55,040,000.00	0.00	82,760,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 14	Penyediaan pakan ternak	41,580,000.00	216,160,000.00	0.00	257,740,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 15	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	221,760,000.00	204,420,000.00	0.00	426,180,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 16	Penyediaan Bibit Ternak	429,660,000.00	9,151,845,000.00	0.00	9,581,505,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17	Produksi Bibit Ternak Ruminansia	279,600,000.00	815,227,630.00	24,825,000.00	1,119,652,630.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 18	Produksi Bibit Ternak non Ruminansia	226,800,000.00	1,057,599,700.00	0.00	1,284,399,700.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19	Pengadaan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	54,720,000.00	50,250,000.00	0.00	104,970,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20	Pengadaan Sarana Pasca Panen Hortikultura	27,720,000.00	107,155,000.00	0.00	134,875,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 22	Survey Pengelolaan Lahan dan Air	41,580,000.00	96,450,000.00	0.00	138,030,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 23	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Alsintan	55,440,000.00	262,415,000.00	0.00	317,855,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24	Pelayanan Brigade Alsintan	69,300,000.00	347,722,500.00	0.00	417,022,500.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 25	Advokasi kepesertaan Asuransi	31,500,000.00	77,450,000.00	0.00	108,950,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 26	Diagnosa dan Penyidikan Secara Cepat, Tepat dan Akurat Terhadap Gejala Penyakit Hewan Menular	69,300,000.00	135,640,000.00	0.00	204,940,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 27	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	55,440,000.00	173,830,000.00	0.00	229,270,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 28	Pembinaan Kelompok Tani	55,440,000.00	126,080,000.00	0.00	181,520,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29	Penguatan Ketenagaan Penyuluh Pertanian	280,335,000.00	66,945,000.00	0.00	347,280,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30	Pengembangan Pertanian Berbasis Konservasi	210,000,000.00	342,715,000.00	0.00	552,715,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu	18,000,000.00	111,150,000.00	0.00	129,150,000.00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 32	Penyediaan Benih Unggul Tanaman perkebunan	127,260,000.00	72,020,000.00	0.00	199,280,000.00
3.03 . 3.03.01 . 36	Program Pengembangan SDM Pertanian	83,160,000.00	204,266,500.00	0.00	287,426,500.00
3.03 . 3.03.01 . 36 . 02	Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian	83,160,000.00	204,266,500.00	0.00	287,426,500.00
3.03 . 3.03.01 . 43	Program Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH)	41,580,000.00	184,785,000.00	55,000,000.00	281,365,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43 . 01	Penyediaan PAH-ASUH dan Jaminan Keamanan PAH	27,720,000.00	72,365,000.00	0.00	100,085,000.00
3.03 . 3.03.01 . 43 . 02	Diagnosa dan Penyidikan secara Cepat, Tepat dan Akurat terhadap Pangan Asal Hewan (Daging, Susu, Telur)	13,860,000.00	112,420,000.00	55,000,000.00	181,280,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50	Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian	27,720,000.00	261,015,000.00	0.00	288,735,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 01	Pengolahan Hasil Tanaman Pangan pada KPT	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 02	Pengolahan Hasil Hortikultura pada KPT	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 03	Pengolahan Hasil Peternakan pada KPT	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 04	Pengolahan Hasil Perkebunan pada KPT	27,720,000.00	137,815,000.00	0.00	165,535,000.00
3.03 . 3.03.01 . 50 . 05	Promosi produk unggulan pertanian	0.00	123,200,000.00	0.00	123,200,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
3.03 . 3.03.01 . 57	Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukung (DAK)	0.00	113,950,000.00	10,969,047,000.00	11,082,997,000.00
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01	Pembangunan UPTD Balai Diklat Pertanian dan Sarana Pendukungnya (DAK)	0.00	113,950,000.00	10,969,047,000.00	11,082,997,000.00
3.04	Kehutanan	825,000,000.00	4,278,000,000.00	1,320,000,000.00	6,423,000,000.00
3.04 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	825,000,000.00	4,278,000,000.00	1,320,000,000.00	6,423,000,000.00
3.04 . 2.05.01 . 22	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK Fisik)	825,000,000.00	4,278,000,000.00	1,320,000,000.00	6,423,000,000.00
3.04 . 2.05.01 . 22 . 01	Pembuatan Hutan Manunggal (DAK Fisik)	622,500,000.00	677,500,000.00	0.00	1,300,000,000.00
3.04 . 2.05.01 . 22 . 02	Pembuatan Model Agroforestry dan Hutan Rakyat (DAK Fisik)	202,500,000.00	1,097,500,000.00	0.00	1,300,000,000.00
3.04 . 2.05.01 . 22 . 03	Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Prioritas (DAK Fisik)	0.00	2,000,000,000.00	320,000,000.00	2,320,000,000.00
3.04 . 2.05.01 . 22 . 04	Operasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan (DAK Fisik)	0.00	100,000,000.00	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00
3.04 . 2.05.01 . 22 . 05	Kelola Kawasan Perhutanan Sosial (DAK Fisik)	0.00	403,000,000.00	0.00	403,000,000.00
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	106,800,000.00	23,241,518,250.00	8,350,000,000.00	31,698,318,250.00
3.05 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI	106,800,000.00	23,241,518,250.00	8,350,000,000.00	31,698,318,250.00
3.05 . 2.12.01 . 18	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan (DAK)	0.00	1,767,601,000.00	8,350,000,000.00	10,117,601,000.00
3.05 . 2.12.01 . 18 . 01	Pengembangan Energi Baru Terbarukan (DAK)	0.00	1,767,601,000.00	8,350,000,000.00	10,117,601,000.00
3.05 . 2.12.01 . 22	Program Penyelidikan dan Pelayanan Geologi	0.00	140,285,000.00	0.00	140,285,000.00
3.05 . 2.12.01 . 22 . 01	Penyelidikan Geologi Teknik Untuk Menunjang Infrastruktur	0.00	140,285,000.00	0.00	140,285,000.00
3.05 . 2.12.01 . 23	Program Pengelolaan Pertambangan Mineral	26,400,000.00	128,535,000.00	0.00	154,935,000.00
3.05 . 2.12.01 . 23 . 01	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan	26,400,000.00	128,535,000.00	0.00	154,935,000.00
3.05 . 2.12.01 . 24	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	80,400,000.00	21,205,097,250.00	0.00	21,285,497,250.00
3.05 . 2.12.01 . 24 . 01	Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah	26,400,000.00	553,910,000.00	0.00	580,310,000.00
3.05 . 2.12.01 . 24 . 02	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	0.00	19,918,000,000.00	0.00	19,918,000,000.00
3.05 . 2.12.01 . 24 . 03	Pengawasan Ketersediaan Energi	27,000,000.00	187,875,000.00	0.00	214,875,000.00
3.05 . 2.12.01 . 24 . 04	Pengembangan Energi Baru Terbarukan	27,000,000.00	195,312,250.00	0.00	222,312,250.00
3.05 . 2.12.01 . 24 . 05	Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah	0.00	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00
3.06	Perdagangan	3,900,000.00	1,310,176,542.00	198,000,000.00	1,512,076,542.00
3.06 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3,900,000.00	1,310,176,542.00	198,000,000.00	1,512,076,542.00
3.06 . 2.11.01 . 15	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan dalam Negeri	0.00	989,250,000.00	0.00	989,250,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01	Pengawasan Perdagangan di wilayah Perbatasan antar Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02	Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	0.00	872,400,000.00	0.00	872,400,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	0.00	116,850,000.00	0.00	116,850,000.00
3.06 . 2.11.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah	1,500,000.00	156,421,000.00	0.00	157,921,000.00
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01	Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor Daerah	1,500,000.00	156,421,000.00	0.00	157,921,000.00
3.06 . 2.11.01 . 20	Program Peningkatan Standardisasi Mutu Barang	2,400,000.00	164,505,542.00	198,000,000.00	364,905,542.00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0.00	66,637,542.00	198,000,000.00	264,637,542.00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02	Penerapan Standardisasi Mutu Barang	2,400,000.00	97,868,000.00	0.00	100,268,000.00
3.07	Perindustrian	196,660,000.00	1,153,520,000.00	0.00	1,350,180,000.00
3.07 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	196,660,000.00	1,153,520,000.00	0.00	1,350,180,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	196,660,000.00	1,153,520,000.00	0.00	1,350,180,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 01	Pengembangan Agro Industri & Industri Pangan Daerah	1,350,000.00	119,650,000.00	0.00	121,000,000.00

KODE 1	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 02	Pengembangan Industri Kerajinan Daerah	73,760,000.00	376,240,000.00	0.00	450,000,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 03	Pengembangan Industri Hulu dan Hilir	22,800,000.00	239,100,000.00	0.00	261,900,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 04	Pembinaan teknologi Industri Pangan	2,250,000.00	122,150,000.00	0.00	124,400,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 05	Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka	1,500,000.00	80,900,000.00	0.00	82,400,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 06	Pembinaan Teknologi Industri Logam dan Mesin	1,400,000.00	91,730,000.00	0.00	93,130,000.00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 07	Pengembangan sentra industri agro terpadu	93,600,000.00	123,750,000.00	0.00	217,350,000.00
3.08	Transmigrasi	142,200,000.00	964,786,250.00	0.00	1,106,986,250.00
3.08 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI	142,200,000.00	964,786,250.00	0.00	1,106,986,250.00
3.08 . 2.12.01 . 25	Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	52,800,000.00	120,816,250.00	0.00	173,616,250.00
3.08 . 2.12.01 . 25 . 01	Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Mental Spiritual bagi Masyarakat Transmigrasi	52,800,000.00	120,816,250.00	0.00	173,616,250.00
3.08 . 2.12.01 . 25 . 02	Pembinaan dan Pelatihan Aparatur UPT di Kawasan Transmigrasi	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08 . 2.12.01 . 26	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	79,200,000.00	587,610,000.00	0.00	666,810,000.00
3.08 . 2.12.01 . 26 . 01	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	52,800,000.00	382,100,000.00	0.00	434,900,000.00
3.08 . 2.12.01 . 26 . 02	Rencana Kawasan Transmigrasi	26,400,000.00	205,510,000.00	0.00	231,910,000.00
3.08 . 2.12.01 . 27	Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja , Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah.(UPTD BLK, Transmigrasi dan pengembangan Produktifitas)	10,200,000.00	256,360,000.00	0.00	266,560,000.00
3.08 . 2.12.01 . 27 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Bagi Tenaga Kerja dan Pencari Kerja	5,100,000.00	130,780,000.00	0.00	135,880,000.00
3.08 . 2.12.01 . 27 . 02	Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas Warga Transmigrasi	5,100,000.00	125,580,000.00	0.00	130,680,000.00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	12,804,788,000.00	117,305,856,529.11	13,447,183,000.00	143,557,827,529.11
4.01	Administrasi Pemerintahan	9,012,948,000.00	87,964,611,985.00	11,233,433,000.00	108,210,992,985.00
4.01 : 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	6,389,663,000.00	46,289,364,632.00	9,956,855,000.00	62,635,882,632.00
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Biro Humas dan Protokoler)	439,200,000.00	936,189,659.00	378,500,000.00	1,753,889,659.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	439,200,000.00	201,821,659.00	0.00	641,021,659.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	657,568,000.00	378,500,000.00	1,036,068,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	0.00	76,800,000.00	0.00	76,800,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Biro Hukum dan Organisasi)	110,000,000.00	286,708,162.00	0.00	396,708,162.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	110,000,000.00	135,960,000.00	0.00	245,960,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05	Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	0.00	84,641,807.00	0.00	84,641,807.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Peningkatan Kompetensi Aparatur Melalui Diklat dan Bimtek	0.00	66,106,355.00	0.00	66,106,355.00
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Biro Kesejahteraan Sosial)	312,840,000.00	121,263,584.00	69,750,000.00	503,853,584.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengadaan)	312,840,000.00	112,763,584.00	0.00	425,603,584.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengadaan)	0.00	8,500,000.00	69,750,000.00	78,250,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Biro Pengadaan)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Biro Pemerintahan dan Otda)	297,000,000.00	233,991,829.00	6,000,000.00	536,991,829.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pemerintahan)	297,000,000.00	118,666,329.00	0.00	415,666,329.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	55,325,500.00	6,000,000.00	61,325,500.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Biro Umum)	1,188,300,000.00	4,292,077,940.00	8,059,355,000.00	13,539,732,940.00

KODE 1	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 2	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	620,300,000.00	642,293,453.00	0.00	1,262,593,453.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	1,031,300,000.00	8,059,355,000.00	9,090,655,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	0.00	242,340,000.00	0.00	242,340,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	Pemeliharaan Gedung / Peralatan Kantor	558,000,000.00	1,776,000,487.00	0.00	2,344,000,487.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0.00	600,144,000.00	0.00	600,144,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (P2LP)	208,120,000.00	470,243,191.00	139,750,000.00	818,113,191.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan)	208,120,000.00	134,781,191.00	0.00	342,901,191.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan)	0.00	30,450,000.00	139,750,000.00	170,200,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan)	0.00	91,350,000.00	0.00	91,350,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	0.00	213,662,000.00	0.00	213,662,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Biro Kesra)	0.00	95,980,000.00	0.00	95,980,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi dan Monitoring/Evaluasi Kegiatan	0.00	95,980,000.00	0.00	95,980,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Biro Hukum dan Organisasi)	0.00	110,177,259.00	0.00	110,177,259.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program	0.00	110,177,259.00	0.00	110,177,259.00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Biro Humas dan Protokoler)	0.00	229,314,081.00	0.00	229,314,081.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	0.00	122,954,248.00	0.00	122,954,248.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02	Penatausahaan Laporan Keuangan	0.00	106,359,833.00	0.00	106,359,833.00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Biro Umum)	0.00	310,891,879.00	0.00	310,891,879.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	0.00	160,891,879.00	0.00	160,891,879.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program Peningkatan Layanan Kedinasan (Pimpinan Setda)	2,820,895,000.00	19,529,208,525.00	1,303,500,000.00	23,653,603,525.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01	Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)	0.00	4,485,000,000.00	115,000,000.00	4,600,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)	913,520,000.00	2,025,970,000.00	422,500,000.00	3,361,990,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03	Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)	0.00	2,431,716,000.00	59,000,000.00	2,490,716,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04	Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)	802,525,000.00	1,601,919,000.00	390,000,000.00	2,794,444,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	Pelayanan Umum Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo	1,104,850,000.00	8,651,790,560.00	317,000,000.00	10,073,640,560.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06	Pelayanan Umum Kegiatan Pemerintahan Provinsi	0.00	332,812,965.00	0.00	332,812,965.00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	0.00	485,934,000.00	0.00	485,934,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01	Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Dalam Daerah	0.00	324,084,000.00	0.00	324,084,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Luar Daerah	0.00	161,850,000.00	0.00	161,850,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo	0.00	1,043,450,000.00	0.00	1,043,450,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya	0.00	234,650,000.00	0.00	234,650,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo	0.00	527,900,000.00	0.00	527,900,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03	Monitoring Aset dan Bantuan Barang Hibah	0.00	135,450,000.00	0.00	135,450,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04	Penatausahaan dan Penyusunan Dokumen Aset	0.00	145,450,000.00	0.00	145,450,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04	Program Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	0.00	537,410,000.00	0.00	537,410,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 12	Koordinasi dan Pembinaan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pengembangan Otonomi Daerah	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 13	Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemda Kabupaten/Kota	0.00	82,410,000.00	0.00	82,410,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 14	Pelayanan Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya, Legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD)	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.01 . 4.01.03 . 04 . 15	Pelayanan Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 16	Penguatan Daerah Otonom	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 17	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Layanan Iuran APPSI	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 15	Program Penataan Wilayah Provinsi	0.00	304,828,250.00	0.00	304,828,250.00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 08	Penetapan dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas Antar Daerah dan Fasilitas Perselisihan Batas Antar Daerah	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 09	Pencataan dan Penamaan Rupabumi (Toponimi)	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 10	Koordinasi Evaluasi Kecamatan dan Pelaksanaan Pemerintahan bidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	0.00	108,860,000.00	0.00	108,860,000.00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo	0.00	70,968,250.00	0.00	70,968,250.00
4.01 . 4.01.03 . 17	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	129,880,000.00	614,420,000.00	0.00	744,300,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01	Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah	60,480,000.00	68,520,000.00	0.00	129,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02	Pengkajian dan Pendampingan Ranperda	31,500,000.00	78,500,000.00	0.00	110,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03	Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	37,900,000.00	467,400,000.00	0.00	505,300,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18	Program Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	31,500,000.00	552,712,710.00	0.00	584,212,710.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	31,500,000.00	286,606,355.00	0.00	318,106,355.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	0.00	66,106,355.00	0.00	66,106,355.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 03	Pelayanan Hukum Terpadu Melalui Sidang Itsbat Melalui Sidang Itsbat Nikah Mobile	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan	0.00	584,850,000.00	0.00	584,850,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01	Pengendalian Sistem Informasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 05	Koordinasi Pengelolaan Kelembagaan, Pendapatan Serta Kekayaan Desa/Kelurahan	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 06	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 07	Praktek Kerja Lapangan IPDN	0.00	334,850,000.00	0.00	334,850,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan Informasi	426,048,000.00	3,590,921,051.00	0.00	4,016,969,051.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 01	Kerjasama dengan media masa dan media lainnya	0.00	2,096,084,051.00	0.00	2,096,084,051.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 02	Peliputan, Publikasi dan Dokumentasi Kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah	0.00	933,625,000.00	0.00	933,625,000.00
4.01 . 4.01.03 . 18 . 03	Penyebarluasan informasi melalui Radio Suara Rakyat Hulondalo	426,048,000.00	561,212,000.00	0.00	987,260,000.00
4.01 . 4.01.03 . 19	Program Penataan MOU dan Perjanjian Kerja sama	0.00	83,343,000.00	0.00	83,343,000.00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 01	Pendampingan Penyusunan MoU dan Perjanjian Kerja Sama	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 19 . 02	Pelayanan Penyusunan MoU dan Kerjasama Terhadap Inisiatif Kerjasama Pembangunan	0.00	38,343,000.00	0.00	38,343,000.00
4.01 . 4.01.03 . 20	Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pemajuan HAM	0.00	70,025,600.00	0.00	70,025,600.00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01	Koordinasi dan konsolidasi Data PPNS Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Pendataan Rencana Aksi HAM Provinsi Gorontalo	0.00	70,025,600.00	0.00	70,025,600.00
4.01 . 4.01.03 . 22	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	27,720,000.00	364,914,786.00	0.00	392,634,786.00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01	Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	27,720,000.00	142,257,259.00	0.00	169,977,259.00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02	Bimbingan Teknis Analisis Jabatan	0.00	178,141,807.00	0.00	178,141,807.00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03	Monitoring dan Evaluasi Anjab/ABK Kabupaten/Kota	0.00	44,515,720.00	0.00	44,515,720.00
4.01 . 4.01.03 . 23	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	27,880,000.00	333,724,126.00	0.00	361,604,126.00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01	Bimbingan Teknik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2,000,000.00	222,247,186.00	0.00	224,247,186.00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi Data Kinerja Instansi Pemerintah	25,880,000.00	111,476,940.00	0.00	137,356,940.00
4.01 . 4.01.03 . 24	Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	80,280,000.00	342,720,000.00	0.00	423,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 01	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar pelayanan minimal dan penyusunan laporan capaian kinerja SPM	78,680,000.00	76,320,000.00	0.00	155,000,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02	Layanan keikutsertaan pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	800,000.00	127,200,000.00	0.00	128,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03	Penetapan dan Evaluasi SOP	800,000.00	139,200,000.00	0.00	140,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26	Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya	290,000,000.00	9,326,350,000.00	0.00	9,616,350,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02	Pelayanan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan	0.00	739,800,000.00	0.00	739,800,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03	Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan	0.00	2,172,720,000.00	0.00	2,172,720,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05	Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Budaya	105,000,000.00	108,460,000.00	0.00	213,460,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06	Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi, TC MTQ dan Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo di Tingkat Nasional	0.00	887,120,000.00	0.00	887,120,000.00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09	Pelayanan Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo	185,000,000.00	5,418,250,000.00	0.00	5,603,250,000.00
4.01 . 4.01.03 . 27	Program Pengendalian Pembangunan	0.00	415,625,000.00	0.00	415,625,000.00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 01	Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan	0.00	142,012,500.00	0.00	142,012,500.00
4.01 . 4.01.03 . 27 . 02	Konsolidasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	0.00	273,612,500.00	0.00	273,612,500.00
4.01 . 4.01.03 . 28	Pengendalian Ekonomi	0.00	248,550,000.00	0.00	248,550,000.00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 02	Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian	0.00	38,150,000.00	0.00	38,150,000.00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 03	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Sektor Ekonomi Provinsi Gorontalo pada Pemerintah Kabupaten dan Kota	0.00	55,400,000.00	0.00	55,400,000.00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 04	Rakorev bidang Ekonomi, Sosialisasi Fakta dan Angka dan Refleksi Ekonomi Provinsi Gorontalo	0.00	56,887,500.00	0.00	56,887,500.00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 05	High Level Meeting TPID, rapat teknis TPID, rapat Persiapan Sidak BBM dan Elpiji, dan Rapat Pengendalian Bidang Ekonomi	0.00	42,862,500.00	0.00	42,862,500.00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 06	Pembuatan Buku Indikator Ekonomi	0.00	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 28 . 07	Pembuatan Sistem SiagadiniGo	0.00	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00
4.01 . 4.01.03 . 32	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	0.00	669,440,000.00	0.00	669,440,000.00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 01	Peningkatan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	429,940,000.00	0.00	429,940,000.00
4.01 . 4.01.03 . 32 . 02	Klarifikasi, Verifikasi, Monev dan Konsultasi Bidang PBJ	0.00	239,500,000.00	0.00	239,500,000.00
4.01 . 4.01.03 . 33	Kesejahteraan Rakyat	0.00	104,100,000.00	0.00	104,100,000.00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01	Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan, Sosial dan Ketahanan Keluarga	0.00	89,550,000.00	0.00	89,550,000.00
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02	Rakorev Kesejahteraan Rakyat	0.00	14,550,000.00	0.00	14,550,000.00
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	980,485,000.00	38,088,435,000.00	1,171,400,000.00	40,240,320,000.00
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Sekretariat DPRD)	353,275,000.00	3,161,655,410.00	1,171,400,000.00	4,686,330,410.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 21	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	353,275,000.00	474,260,000.00	0.00	827,535,000.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 22	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	0.00	289,200,000.00	0.00	289,200,000.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	2,398,195,410.00	1,171,400,000.00	3,569,595,410.00
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Sekretariat DPRD)	0.00	318,014,000.00	0.00	318,014,000.00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	0.00	133,100,000.00	0.00	133,100,000.00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	0.00	184,914,000.00	0.00	184,914,000.00
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo	0.00	1,069,550,000.00	0.00	1,069,550,000.00
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	1,069,550,000.00	0.00	1,069,550,000.00
4.01 . 4.01.04 . 30	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	106,200,000.00	2,034,050,000.00	0.00	2,140,250,000.00
4.01 . 4.01.04 . 30 . 01	Pelayanan Umum Kehumasan	106,200,000.00	1,764,100,000.00	0.00	1,870,300,000.00
4.01 . 4.01.04 . 30 . 02	Pelayanan Protokoler dan Aspirasi	0.00	269,950,000.00	0.00	269,950,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	521,010,000.00	31,505,165,590.00	0.00	32,026,175,590.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.01 . 4.01.04 . 31 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	31,920,000.00	5,639,690,000.00	0.00	5,671,610,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 02	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	0.00	17,421,000,000.00	0.00	17,421,000,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 03	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	0.00	3,189,200,000.00	0.00	3,189,200,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 04	Kegiatan Reses	0.00	3,227,192,000.00	0.00	3,227,192,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 05	Rapat - Rapat Paripurna	0.00	403,005,000.00	0.00	403,005,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 06	Hearing, Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	0.00	796,580,000.00	0.00	796,580,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 07	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5,250,000.00	367,125,000.00	0.00	372,375,000.00
4.01 . 4.01.04 . 31 . 08	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	483,840,000.00	461,373,590.00	0.00	945,213,590.00
4.01 . 4.01.08	BADAN PENGHUBUNG	1,276,560,000.00	3,054,252,353.00	105,178,000.00	4,435,990,353.00
4.01 . 4.01.08 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Badan Penghubung)</i>	1,022,640,000.00	1,946,097,353.00	70,178,000.00	3,038,915,353.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	721,807,000.00	70,178,000.00	791,985,000.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 25	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	1,022,640,000.00	701,510,353.00	0.00	1,724,150,353.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 26	Pemeliharaan Gedung /Peralatan Kantor	0.00	307,380,000.00	0.00	307,380,000.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 27	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 28	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	0.00	185,400,000.00	0.00	185,400,000.00
4.01 . 4.01.08 . 02	<i>Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Badan Penghubung)</i>	0.00	85,400,000.00	0.00	85,400,000.00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 01	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD	0.00	85,400,000.00	0.00	85,400,000.00
4.01 . 4.01.08 . 03	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</i>	253,920,000.00	1,022,755,000.00	35,000,000.00	1,311,675,000.00
4.01 . 4.01.08 . 03 . 01	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Kepada Unsur Pemerintah Eksekutif dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi	0.00	436,800,000.00	0.00	436,800,000.00
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02	Pelayanan pada Kantor Penghubung Makassar	253,920,000.00	585,955,000.00	35,000,000.00	874,875,000.00
4.01 . 4.01.08 . 15	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01 . 4.01.08 . 15 . 01	Penyeberiusan Informasi Pembangunan daerah di Jakarta dan Makasar	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01 . 4.05.07	BADAN KEPEGAWAIAN	366,240,000.00	532,560,000.00	0.00	898,800,000.00
4.01 . 4.05.07 . 15	<i>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen PNS</i>	366,240,000.00	532,560,000.00	0.00	898,800,000.00
4.01 . 4.05.07 . 15 . 01	Pelayanan Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS	27,720,000.00	151,080,000.00	0.00	178,800,000.00
4.01 . 4.05.07 . 15 . 02	Pengangkatan dalam Jabatan JPT, Administrator, Pengawas dan Fungsional	285,720,000.00	120,280,000.00	0.00	406,000,000.00
4.01 . 4.05.07 . 15 . 03	Pelayanan Mutasi PNS	0.00	89,000,000.00	0.00	89,000,000.00
4.01 . 4.05.07 . 15 . 04	Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Pelayanan Manajemen PNS	25,080,000.00	124,920,000.00	0.00	150,000,000.00
4.01 . 4.05.07 . 15 . 05	Manajemen Arsip Kepegawaian Daerah	27,720,000.00	47,280,000.00	0.00	75,000,000.00
4.02	Pengawasan	387,840,000.00	4,660,637,976.70	336,500,000.00	5,384,977,976.70
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	387,840,000.00	4,660,637,976.70	336,500,000.00	5,384,977,976.70
4.02 . 4.02.01 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Inspektorat)</i>	123,840,000.00	1,358,280,527.00	336,500,000.00	1,818,620,527.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	123,840,000.00	646,690,527.00	0.00	770,530,527.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	238,750,000.00	336,500,000.00	575,250,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 03	Peningkatan SDM Aparatur	0.00	472,840,000.00	0.00	472,840,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02	<i>Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Inspektorat)</i>	55,440,000.00	211,900,000.00	0.00	267,340,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 01	Penyusunan Rencana Program, Data, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	55,440,000.00	121,900,000.00	0.00	177,340,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15	<i>Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	27,720,000.00	865,087,610.00	0.00	892,807,610.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	Rencana Aksi Daerah Pemberantasan, Pencegahan Korupsi dan Saber Pungli	0.00	416,670,000.00	0.00	416,670,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	Penerapan SPIP untuk Pemerintah Provinsi	27,720,000.00	165,165,000.00	0.00	192,885,000.00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03	Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional	0.00	283,252,610.00	0.00	283,252,610.00
4.02 . 4.02.01 . 20	Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	180,840,000.00	2,225,369,839.70	0.00	2,406,209,839.70
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	Audit Pengelolaan Barang dan Jasa, SDM dan Pengelolaan Keuangan	0.00	890,702,500.00	0.00	890,702,500.00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02	Pemeriksaan Atas Sekolah Menengah dan Khusus (SLB)	0.00	193,879,000.00	0.00	193,879,000.00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 03	Pengawasan Perencanaan dan Pelaporan	52,800,000.00	117,786,250.00	0.00	170,586,250.00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 04	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan	102,960,000.00	265,125,000.00	0.00	368,085,000.00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 05	Pengawasan Kabupaten/Kota	25,080,000.00	398,940,178.70	0.00	424,020,178.70
4.02 . 4.02.01 . 20 . 06	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Pelayanan Publik	0.00	156,763,536.00	0.00	156,763,536.00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 07	Penanganan Kasus Pengaduan, Permintaan dan Pemeriksaan Strategis Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah	0.00	202,173,375.00	0.00	202,173,375.00
4.03	Perencanaan	831,600,000.00	7,704,870,500.00	143,000,000.00	8,679,470,500.00
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	831,600,000.00	7,704,870,500.00	143,000,000.00	8,679,470,500.00
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (BAPPEDA)	520,800,000.00	1,178,430,500.00	143,000,000.00	1,842,230,500.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	520,800,000.00	417,410,500.00	0.00	938,210,500.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	591,020,000.00	143,000,000.00	734,020,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	0.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Bappeda)	0.00	1,281,500,000.00	0.00	1,281,500,000.00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 01	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 02	Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota dan Lintas Kementerian/Lembaga	0.00	1,181,500,000.00	0.00	1,181,500,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	310,800,000.00	4,102,940,000.00	0.00	4,413,740,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25,200,000.00	219,760,000.00	0.00	244,960,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 02	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	25,200,000.00	169,760,000.00	0.00	194,960,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 03	Perencanaan Pembangunan Daerah	50,400,000.00	557,520,000.00	0.00	607,920,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan	23,100,000.00	304,280,000.00	0.00	327,380,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha dan Industri	25,200,000.00	331,760,000.00	0.00	356,960,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Perikanan dan Pariwisata	23,100,000.00	304,280,000.00	0.00	327,380,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0.00	285,000,000.00	0.00	285,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi Mental	23,100,000.00	646,900,000.00	0.00	670,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Kebudayaan	23,100,000.00	272,280,000.00	0.00	295,380,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Ke-Ciptakarya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.	23,100,000.00	294,560,000.00	0.00	317,660,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air	23,100,000.00	422,280,000.00	0.00	445,380,000.00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 12	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Tata Ruang dan Prasarana Perhubungan	46,200,000.00	294,560,000.00	0.00	340,760,000.00
4.03 . 4.03.01 . 30	Program Pengembangan Data / Informasi (UPTB Data dan Analisis Pembangunan)	0.00	1,142,000,000.00	0.00	1,142,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 01	Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Data Pembangunan	0.00	479,000,000.00	0.00	479,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 02	Sinkronisasi dan Analisa Data Pembangunan Berbasis Spasial	0.00	235,000,000.00	0.00	235,000,000.00
4.03 . 4.03.01 . 30 . 03	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	0.00	428,000,000.00	0.00	428,000,000.00
4.04	Keuangan	1,872,480,000.00	9,366,357,004.41	1,117,250,000.00	12,356,087,004.41
4.04 . 4.04.05	BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO	1,872,480,000.00	9,366,357,004.41	1,117,250,000.00	12,356,087,004.41
4.04 . 4.04.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Badan Keuangan)	0.00	2,474,672,143.41	1,117,250,000.00	3,591,922,143.41
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	0.00	834,672,143.41	0.00	834,672,143.41
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	105,000,000.00	1,117,250,000.00	1,222,250,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 03	Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB Wilayah I)	0.00	410,000,000.00	0.00	410,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 04	Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB Wilayah II)	0.00	410,000,000.00	0.00	410,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 05	Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTB Wilayah III)	0.00	310,000,000.00	0.00	310,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 01 . 06	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keuangan Daerah	0.00	405,000,000.00	0.00	405,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Badan Keuangan)	311,300,000.00	686,789,861.00	0.00	998,089,861.00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	0.00	370,349,861.00	0.00	370,349,861.00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 02 . 03	Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi (PDE)	311,300,000.00	216,440,000.00	0.00	527,740,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	358,380,000.00	3,102,960,000.00	0.00	3,461,340,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Induk)	0.00	447,000,000.00	0.00	447,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	0.00	111,000,000.00	0.00	111,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	25,080,000.00	379,920,000.00	0.00	405,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 04	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	113,300,000.00	424,040,000.00	0.00	537,340,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 05	Pelayanan Arus Kas dan Penyediaan SPD	44,000,000.00	35,200,000.00	0.00	79,200,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 06	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	0.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 07	Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa	67,100,000.00	144,480,000.00	0.00	211,580,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 08	Penatausahaan Aset	0.00	370,000,000.00	0.00	370,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 09	Penatausahaan APBD	20,900,000.00	234,920,000.00	0.00	255,820,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 10	Pelayanan Perbendaharaan	44,000,000.00	137,200,000.00	0.00	181,200,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 11	Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah	0.00	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 12	Pembinaan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD	44,000,000.00	149,200,000.00	0.00	193,200,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 13	Kebijakan dan Pengendalian Aset	0.00	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 03 . 14	Penyusunan dan sosialisasi paket regulasi akuntansi	0.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 04	Program pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	0.00	120,565,000.00	0.00	120,565,000.00
4.04 . 4.04.05 . 04 . 01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	0.00	120,565,000.00	0.00	120,565,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1,202,800,000.00	2,981,370,000.00	0.00	4,184,170,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 01	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Wilayah I)	335,400,000.00	647,550,000.00	0.00	982,950,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Wilayah II)	328,800,000.00	582,940,000.00	0.00	911,740,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTB Wilayah III)	210,000,000.00	558,000,000.00	0.00	768,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 04	Monitoring, Evaluasi, Pendapatan Daerah	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 05	Koordinasi Pajak	0.00	121,000,000.00	0.00	121,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 06	Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah	0.00	312,000,000.00	0.00	312,000,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 07	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Samsat	328,600,000.00	389,880,000.00	0.00	718,480,000.00
4.04 . 4.04.05 . 05 . 08	Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	0.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00
4.05	Kepegawaian	347,160,000.00	2,479,733,604.00	158,000,000.00	2,984,893,604.00
4.05 . 4.05.07	BADAN KEPEGAWAIAN	347,160,000.00	2,479,733,604.00	158,000,000.00	2,984,893,604.00
4.05 . 4.05.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Badan Kepegawaian)	105,600,000.00	627,433,604.00	158,000,000.00	891,033,604.00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	105,600,000.00	323,433,604.00	0.00	429,033,604.00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	192,500,000.00	158,000,000.00	350,500,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.05 . 4.05.07 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	111,500,000.00	0.00	111,500,000.00
4.05 . 4.05.07 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (badan Kepegawaian)	108,240,000.00	233,760,000.00	0.00	342,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi	55,440,000.00	163,560,000.00	0.00	219,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	52,800,000.00	70,200,000.00	0.00	123,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16	Program Pengembangan Aparatur	83,160,000.00	823,400,000.00	0.00	906,560,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 02	Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Ijin Belajar ASN Pemprov Gorontalo	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 03	Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	0.00	186,000,000.00	0.00	186,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 04	Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi	0.00	98,000,000.00	0.00	98,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05	Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan	27,720,000.00	74,000,000.00	0.00	101,720,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 06	Pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural	55,440,000.00	215,400,000.00	0.00	270,840,000.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 07	Pelaksanaan Uji Kompetensi ASN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 08	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN Provinsi Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05 . 4.05.07 . 16 . 09	Penyusunan Pola Karier ASN di Provinsi Gorontalo	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05 . 4.05.07 . 18	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur	50,160,000.00	795,140,000.00	0.00	845,300,000.00
4.05 . 4.05.07 . 18 . 01	Pelayanan Kesejahteraan Pegawai	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 18 . 02	Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Disiplin	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 18 . 03	Penilaian dan Penghargaan ASN Berprestasi	0.00	9,690,000.00	0.00	9,690,000.00
4.05 . 4.05.07 . 18 . 04	Pembinaan Fisik, Mental dan Spiritual Anggota Korpri	25,080,000.00	147,590,000.00	0.00	172,670,000.00
4.05 . 4.05.07 . 18 . 05	Pelaksanaan Pekan Olahraga Korpri Tingkat SKPD Provinsi Gorontalo	25,080,000.00	124,920,000.00	0.00	150,000,000.00
4.05 . 4.05.07 . 18 . 06	Pembekalan ASN Purna Bakti dan Tata Upacara Persemayaman	0.00	107,940,000.00	0.00	107,940,000.00
4.05 . 4.05.07 . 18 . 07	Governour Coaching	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	304,760,000.00	4,196,245,459.00	459,000,000.00	4,960,005,459.00
4.06 . 4.06.10	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	304,760,000.00	4,196,245,459.00	459,000,000.00	4,960,005,459.00
4.06 . 4.06.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur (Badan Diklat)	100,800,000.00	1,527,699,000.00	459,000,000.00	2,087,499,000.00
4.06 . 4.06.10 . 01 . 01	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100,800,000.00	637,424,000.00	0.00	738,224,000.00
4.06 . 4.06.10 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	461,535,000.00	459,000,000.00	920,535,000.00
4.06 . 4.06.10 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	115,950,000.00	0.00	115,950,000.00
4.06 . 4.06.10 . 01 . 23	Pengembangan Kapasitas Widyaiswara	0.00	312,790,000.00	0.00	312,790,000.00
4.06 . 4.06.10 . 02	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan (Badan Diklat)	48,000,000.00	440,639,282.00	0.00	488,639,282.00
4.06 . 4.06.10 . 02 . 01	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25,200,000.00	367,199,282.00	0.00	392,399,282.00
4.06 . 4.06.10 . 02 . 02	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	22,800,000.00	73,440,000.00	0.00	96,240,000.00
4.06 . 4.06.10 . 15	Program pengembangan kompetensi manajerial	80,360,000.00	1,220,620,177.00	0.00	1,300,980,177.00
4.06 . 4.06.10 . 15 . 01	Pelaksanaan Diklat Pim Tingkat III	29,960,000.00	768,480,000.00	0.00	798,440,000.00
4.06 . 4.06.10 . 15 . 02	Pelaksanaan Diklat PIM Tingkat IV	0.00	0.00	0.00	0.00
4.06 . 4.06.10 . 15 . 03	Diklat Prajabatan/Pendidikan Dasar CPNS Gol. III	25,200,000.00	248,218,177.00	0.00	273,418,177.00
4.06 . 4.06.10 . 15 . 08	Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan I dan Kepemimpinan II Serta LEMHANAS	25,200,000.00	203,922,000.00	0.00	229,122,000.00
4.06 . 4.06.10 . 16	Program pengembangan aplikasi, sistem informasi dan jurnal ilmiah kediklatan	25,200,000.00	89,350,000.00	0.00	114,550,000.00
4.06 . 4.06.10 . 16 . 01	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan	25,200,000.00	89,350,000.00	0.00	114,550,000.00
4.06 . 4.06.10 . 17	Program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional aparatur	25,200,000.00	414,597,000.00	0.00	439,797,000.00
4.06 . 4.06.10 . 17 . 01	Pelaksanaan Diklat Training Of Course (TOC)	25,200,000.00	284,397,000.00	0.00	309,597,000.00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.06 . 4.06.10 . 17 . 02	Pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				
4.06 . 4.06.10 . 18	<i>Program Pengembangan kapasitas, mutu dan kerjasama kediklatan</i>	0.00	130,200,000.00	0.00	130,200,000.00
4.06 . 4.06.10 . 18 . 02	Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	25,200,000.00	503,340,000.00	0.00	528,540,000.00
4.06 . 4.06.10 . 18 . 03	Kerjasama Penyelenggaraan Diklat	0.00	265,540,000.00	0.00	265,540,000.00
4.06 . 4.06.10 . 18 . 04	Penjaminan Mutu, Pemeliharaan dan Peningkatan Akreditasi Lembaga Kediklatan	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4.07	Penelitian dan Pengembangan	25,200,000.00	137,800,000.00	0.00	163,000,000.00
4.07 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	48,000,000.00	933,400,000.00	0.00	981,400,000.00
4.07 . 4.03.01 . 29	<i>Pengembangan Riset Daerah</i>	48,000,000.00	933,400,000.00	0.00	981,400,000.00
4.07 . 4.03.01 . 29 . 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Prasarana Wilayah	48,000,000.00	933,400,000.00	0.00	981,400,000.00
4.07 . 4.03.01 . 29 . 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	22,800,000.00	222,640,000.00	0.00	245,440,000.00
4.07 . 4.03.01 . 29 . 03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	25,200,000.00	219,760,000.00	0.00	244,960,000.00
		0.00	491,000,000.00	0.00	491,000,000.00
	Jumlah	71,898,434,759.00	443,362,689,917.11	330,346,326,362.20	845,607,451,038.31